

**COVER DEPAN
MASING – MASING
SKPD**

DAFTAR ISI

COVER DEPAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	iv
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	ix
LAPORAN OPERASIONAL.....	x
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	xi
NERACA.....	xii
CATATAN ATAS	xiii
LAPORAN KEUANGAN.....	xiii
BAB I.....	1
1.1. Maksud dan Tujuan.....	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Sistematika Penulisan	3
BAB II.....	5
2.1. Ekonomi Makro.....	5
2.2. Kebijakan Keuangan	97
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja.....	97
BAB III	203
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	204
3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target	221
BAB IV	222
4.1 Entitas Akuntansi.....	222
4.2 Basis Akuntansi	222
4.3 Basis Pengukuran.....	222
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi.....	222
4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi.....	223
4.4.2 Defenisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan ..	223
4.4.2.1 Pendapatan – LRA.....	223
4.4.2.2 Belanja.....	224
4.4.2.3 Pendapatan - LO	224
4.4.2.4 Beban.....	225
4.4.2.5 Aset	226
4.4.2.6 Kewajiban	226
4.4.2.7 Ekuitas.....	229
BAB V.....	231
5.1 Rincian dan penjelasan pos-pos pelaporan keuangan SKPD	231
5.1.1. Pendapatan.....	231
5.1.1.1. Pendapatan pajak	232
5.1.1.1.1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	232
5.1.1.1.2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).....	233
5.1.1.1.3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	233
5.1.1.1.4. Pajak Air Permukaan	233
5.1.1.1.5. Pajak Rokok.....	233
5.1.1.2. Retribusi.....	233
5.1.1.3. Lain-lain PAD yang sah.....	238
5.1.2. Belanja	238
5.1.2.1 Belanja Operasi.....	239
5.1.2.2 Belanja Modal	242

5.1.3.	Pendapatan LO	243
5.1.3.1.	Pendapatan Pajak Daerah – LO.....	244
5.1.3.1.1.	Pajak Kendaraan Bermotor-LO	244
5.1.3.1.2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	245
5.1.3.1.3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	245
5.1.3.1.4.	Pajak Air Permukaan-LO	245
5.1.3.1.5.	Pajak Rokok-LO.....	245
5.1.3.2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO.....	245
5.1.3.2.1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	246
5.1.3.2.2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Diatas Air-LO	246
5.1.3.2.3.	Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO.....	246
5.1.3.2.4.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO.....	247
5.1.3.2.5.	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	247
5.1.3.2.6.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa-LO.....	247
5.1.3.2.7.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO.....	247
5.1.3.2.8.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LO.....	247
5.1.3.2.9.	Retribusi Kartu Perpustakaan-LO.....	247
5.1.3.2.10.	Retribusi Pelayanan Sertifikasi, Ujian Benih Tanaman-LO	247
5.1.3.2.11.	Retribusi Penggunaan Sarana Proteksi Tanaman-LO	248
5.1.3.2.12.	Retribusi Jasa Teknis Pengujian dan Kalibrasi-LO	248
5.1.3.2.13.	Retribusi Izin Trayek-LO.....	248
5.1.3.2.14.	Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO.....	248
5.1.3.3.	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	248
5.1.4.	Beban LO.....	249
5.1.4.1.	Beban Operasi	250
5.1.4.1.1.	Beban Pegawai.....	250
5.1.4.1.2.	Beban Persediaan	251
5.1.4.1.3.	Beban Jasa.....	251
5.1.4.1.4.	Beban Pemeliharaan	251
5.1.4.1.5.	Beban Perjalanan Dinas	251
5.1.4.1.6.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	252
5.1.4.1.7.	Beban Penyisihan Piutang	252
5.1.5.	Aset.....	252
5.1.5.1.	Aset Lancar.....	253
5.1.5.1.1.	Kas di Bendahara Penerimaan	253
5.1.5.1.2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	253
5.1.5.1.3.	Kas di BLUD	254
5.1.5.1.4.	Kas Lainnya	254
5.1.5.1.5.	Piutang Pajak.....	254
5.1.5.1.6.	Piutang Retribusi.....	254
5.1.5.1.7.	Piutang Lainnya	255
5.1.5.1.8.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	255
5.1.5.1.9.	Persediaan	255
5.1.5.1.10.	Belanja dibayar dimuka	255
5.1.5.2.	Aset Nonlancar	255
5.1.5.2.1.	Aset Tetap	256
5.1.5.2.1.1.	Tanah	256
5.1.5.2.1.2.	Peralatan dan Mesin.....	257
5.1.5.2.1.3.	Gedung dan Bangunan.....	259
5.1.5.2.1.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	261
5.1.5.2.1.5.	Aset Tetap Lainnya.....	262
5.1.5.2.1.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	262
5.1.5.2.1.7.	Akumulasi Penyusutan.....	263

5.1.5.2.2.	Aset Lainnya	263
5.1.5.2.2.1.	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	263
5.1.5.2.2.2.	Aset Tidak Berwujud	263
5.1.5.2.2.3.	Aset Lain-Lain	264
5.1.6.	Kewajiban.....	264
5.1.6.1.	Kewajiban Jangka Pendek.....	265
5.1.6.2.	Pendapatan Diterima Dimuka	265
5.1.6.3.	Utang Beban	265
5.1.7.	Ekuitas	265
BAB VI	266
6.1	Domisili dan Struktur Organisasi.....	266
6.2	Tugas dan Fungsi	271
6.3	Sumber Daya Manusia.....	286
BAB VII	287

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Alokasi Anggaran Perubahan Tahun 2020	5
Tabel 2 Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020	98
Tabel 3 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2020 dan 2019	231
Tabel 4 Realisasi Anggaran Pajak Daerah Tahun 2020 dan 2019	232
Tabel 5 Realisasi Anggaran Retribusi Tahun 2020 dan 2019	234
Tabel 6 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2020 dan 2019	239
Tabel 7 Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2020 dan 2019	240
Tabel 8 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2020 dan 2019	240
Tabel 9 Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019	241
Tabel 10 Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2020 dan 2019	242
Tabel 11 Realisasi Pendapatan LO Tahun 2020 dan 2019	243
Tabel 12 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 dan 2019	244
Tabel 13 Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2020 dan 2019	245
Tabel 14 Realisasi Beban LO Tahun 2020 dan 2019	250
Tabel 15 Perbandingan Aset Tahun 2020 dan 2019	252
Tabel 16 Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 2020	256
Tabel 17 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2020 dan 2019 Error! Bookmark not defined.	
Tabel 18 Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil Tahun 2020	190

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	SPJ Fungsional per 31 Desember 2020
Lampiran II	Register SP2D s.d 31 Desember 2020 terdiri dari LS, GU, TU, TU/GU NIHIL
Lampiran III	Rekap Pengembalian sisa belanja selama tahun 2020 (yang telah diotorisasi)
Lampiran IV	Foto copy STS Pengembalian belanja sesuai rekap
Lampiran V	SK Pensiun Pegawai pada tahun 2020
Lampiran VI	Berita Acara rekonsiliasi Pendapatan s.d 31 Desember 2020 (jika terdapat Pendapatan)
Lampiran VII	Berita Acara rekonsiliasi Belanja s.d 31 Desember 2020
Lampiran VIII	Perjanjian Kerjasama dengan Pihak ketiga yang menghasilkan Pendapatan (jika ada)
Lampiran IX	Perjanjian Kerjasama dengan Pihak ketiga atau Kontrak Belanja yang menghasilkan Aset Tidak Berwujud (jika ada)
Lampiran X	Rekap tagihan Belanja tahun 2020 yang ditagih / dibayar tahun 2021 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XI	Rekap Pendapatan-LO hasil retribusi & pendapatan lainnya selain pajak tahun 2020 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XII	Rekap Pendapatan-LO tahun 2020 yang belum diterima kasnya sampai dengan akhir tahun 2020 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIII	Rekap Penjualan Aset-Aset hasil lelang tahun 2020 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIV	Rekening koran Bendahara Pengeluaran SKPD/UPTD per 31 desember 2020 dengan tanggal cetak diatas 31 des 2020 dengan Validasi Bank
Lampiran XV	Berita Acara penutupan Kas akhir tahun 2020 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVI	Register Penutupan Kas akhir tahun 2020 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVII	Rekap Piutang dan Penyisihannya bila terdapat piutang (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVIII	Rekap Utang bila terdapat Utang (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIX	Rekap Belanja barang habis pakai tahun 2020 yang jadi Persediaan (yang telah diotorisasi)
Lampiran XX	Berita acara Rekonsiliasi persediaan per 31 desember 2020 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XXI	Berita acara hasil pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname) per 31 desember 2020 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)

Lampiran XXII	Rincian Hasil Pemeriksaan Barang Persediaan (stock opname) per 31 desember 2020 yang sesuai dengan butir 8 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XXIII	Rekap Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke 3 jika ada (yang telah diotorisasi)
Lampiran XXIV	Rincian Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke 3 jika ada (yang telah diotorisasi)
Lampiran XXV	Foto copy berita acara serah terima barang yang telah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tahun 2020
Lampiran XXVI	Rekapitulasi sewa dibayar dimuka / Asuransi dibayar dimuka (yang telah diotorisasi)
Lampiran XXVII	Laporan Mutasi Kontruksi dalam pengerjaan
Lampiran XXVIII	Daftar rekapitulasi barang ke Neraca per 31 desember 2020 (berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan bidang BMD BPKAD)
Lampiran XXIX	Analisis Perhitungan Vertikal dan Horizontal (Format untuk SKPD akan disesuaikan)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Drs. H. AMRULLAH, MM**
N i p : 19611214 198703 1 010
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
(Pengguna Anggaran / Barang)

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Keuangan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019, telah disusun berdasarkan sistem pengendalian yang memadai, Isinya menyajikan informasi pelaksanaan anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2020
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca per 31 Desember 2020
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, Januari 2021

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur
(Pengguna Anggaran/Barang)

DRS, H. AMRULLAH, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19611214 198703 1 010

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

NERACA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu SKPD dilindungi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Serta adanya perubahan terhadap Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal bidang kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akruah maka Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari *Laporan Realisasi Anggaran (LRA)*, *Neraca*, *Laporan Operasional (LO)*, *Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)* dan *Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)*.

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 antara lain merupakan sarana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selama TA 2021 serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah tersajinya informasi keuangan yang relevan dan memadai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam hal memenuhi tujuan tersebut maka informasi yang harus disajikan minimum meliputi:

1. Informasi mengenai apakah penerimaan perioda berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran dan telah sesuai dengan alokasi/ anggaran sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Laporan Realisasi Anggaran).
2. Informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan beserta hasil-hasilnya (Laporan Operasioanl).
3. Informasi tentang perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan (Laporan Perubahan Ekuitas).
4. Informasi tentang besarnya kekayaan dan kewajiban yang timbul pada saat kegiatan berakhir (Neraca).

4.1. Landasan Hukum

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 23 c Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang APBD TA. 2021;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD TA. 2021;
16. Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/7094/997-IV/Keu tentang Revisi Pengelolaan Persediaan.
17. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/6013/2569-IV/BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Awal Tahun Anggaran 2022 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021

4.2. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan format penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah pada SKPD

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pendapatan LO
 - 5.1.4. Beban LO
 - 5.1.5. Aset
 - 5.1.6. Kewajiban
 - 5.1.7. Ekuitas
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Berdasarkan Publikasi Data Inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur di berandanya, dapat diketahui bahwa tingkat inflasi kumulatif tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 2,28. Tingkat inflasi ini melampaui tingkat inflasi nasional yang hanya sebesar 1,87. Tingginya tingkat inflasi ini tidak terlepas dari dampak Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2021. Keadaan ekonomi makro ini cukup membebani kinerja SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai representatif dari pengaplikasian misi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan visinya.

Ekonomi makro yang kurang menguntungkan ini berkorelasi negatif dengan capaian pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini berimplikasi pula dengan tidak adanya tambahan dana yang dapat dialokasikan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk melayani masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan daerah hal tersebut tercermin dengan adanya pergeseran APBD. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini tidak melakukan pergeseran anggaran. Adapun pergeseran anggaran yang dilakukan dapat disajikan pada program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1 Alokasi Anggaran Perubahan Tahun 2020

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	141.772.084.000	0	0	141.772.084.000
01.01	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.280.000.000	0	0	1.280.000.000
01.01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	650.000.000	0	0	650.000.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
01.01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	630.000.000	0	0	630.000.000
01.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	134.357.299.000	0	0	134.357.299.000
01.01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	133.717.579.000	0	0	133.717.579.000
01.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	623.400.000	0	0	623.400.000
01.01	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	16.320.000	0	0	16.320.000
01.01	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	145.000.000	0	0	145.000.000
01.01	03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	145.000.000	0	0	145.000.000
01.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	358.352.700	0	0	358.352.700
01.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	222.252.700	0	0	222.252.700
01.01	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	136.100.000	0	0	136.100.000
01.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.657.872.300	0	0	1.657.872.300
01.01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000	0	0	12.000.000
01.01	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70.074.300	0	0	70.074.300

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
01.01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.600.000	0	0	45.600.000
01.01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85.000.000	0	0	85.000.000
01.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.445.198.000	0	0	1.445.198.000
01.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	678.000.000	0	0	678.000.000
01.01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	678.000.000	0	0	678.000.000
01.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.128.160.000	0	0	2.128.160.000
01.01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	0	0	12.000.000
01.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	488.760.000	0	0	488.760.000
01.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.627.400.000	0	0	1.627.400.000
01.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.166.220.000	0	0	1.166.220.000
01.01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	263.020.000	0	0	263.020.000
01.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	377.750.000	0	0	377.750.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Operasional atau Lapangan				
01.01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.950.000	0	0	150.950.000
01.01	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	374.500.000	0	0	374.500.000
01.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.856.195.000	25.979.325.020	0	29.835.520.020
01.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	3.888.039.020	0	3.888.039.020
01.03	15	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	194.330.000	0	194.330.000
01.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	3.693.709.020	0	3.693.709.020
01.03	15	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	0	0	0	0
01.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	0	0	0	0
01.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	0	0	0
01.03	17		Pemanfaatan Hutan	2.550.000.000	0	0	2.550.000.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung				
01.03	17	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	600.000.000	0	0	600.000.000
01.03	17	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	200.000.000	0	0	200.000.000
01.03	17	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	1.750.000.000	0	0	1.750.000.000
01.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	220.000.000	15.091.286.000	0	15.311.286.000
01.03	18	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	6.051.504.550	0	6.051.504.550
01.03	18	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	0	7.037.952.450	0	7.037.952.450
01.03	18	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	220.000.000	2.001.829.000	0	2.221.829.000
01.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	215.895.000	7.000.000.000	0	7.215.895.000
01.03	19	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	0	0	0	0

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
01.03	19	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	108.900.000	0	0	108.900.000
01.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	106.995.000	1.782.620.000	0	1.889.615.000
01.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	5.217.380.000	0	5.217.380.000
01.03	21		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	258.900.000	0	0	258.900.000
01.03	21	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	258.900.000	0	0	258.900.000
01.03	23		Perbenihan Tanaman Hutan	611.400.000	0	0	611.400.000
01.03	23	01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	407.310.000	0	0	407.310.000
01.03	23	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	204.090.000	0	0	204.090.000
01.04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	519.300.000	0	0	519.300.000
01.04	26		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting,	519.300.000	0	0	519.300.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				
01.04	26	05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	519.300.000	0	0	519.300.000
01.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.820.000.000	19.768.401.680	0	21.588.401.680
01.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.820.000.000	19.768.401.680	0	21.588.401.680
01.05	27	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	732.601.000	13.818.401.680	0	14.551.002.680
01.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	2.998.203.950	0	2.998.203.950
01.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.087.399.000	2.951.796.050	0	4.039.195.050
01.06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	810.000.000	0	0	810.000.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
01.06	28		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	810.000.000	0	0	810.000.000
01.06	28	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	340.000.000	0	0	340.000.000
01.06	28	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	200.000.000	0	0	200.000.000
01.06	28	08	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	270.000.000	0	0	270.000.000
02.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.498.511.500	0	0	1.498.511.500
02.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	159.720.000	0	0	159.720.000
02.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	159.720.000	0	0	159.720.000
02.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	114.165.000	0	0	114.165.000
02.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	114.165.000	0	0	114.165.000
02.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.717.700	0	0	174.717.700
02.01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	11.052.500	0	0	11.052.500

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Bangunan Kantor				
02.01	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.784.000	0	0	11.784.000
02.01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.516.800	0	0	29.516.800
02.01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.452.000	0	0	5.452.000
02.01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	1.920.000	0	0	1.920.000
02.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.992.400	0	0	114.992.400
02.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	240.120.000	0	0	240.120.000
02.01	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	240.120.000	0	0	240.120.000
02.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	678.315.800	0	0	678.315.800
02.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.508.000	0	0	146.508.000
02.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	531.807.800	0	0	531.807.800
02.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.473.000	0	0	131.473.000
02.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	108.363.000	0	0	108.363.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Operasional atau Lapangan				
02.01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.110.000	0	0	23.110.000
02.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	163.199.900	4.448.800.000	0	4.611.999.900
02.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	163.199.900	0	0	163.199.900
02.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	163.199.900	0	0	163.199.900
02.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	0	4.448.800.000	0	4.448.800.000
02.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	1.399.550.000	0	1.399.550.000
02.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	3.049.250.000	0	3.049.250.000
02.04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	106.288.600	3.801.200.000	0	3.907.488.600
02.04	24		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	106.288.600	3.801.200.000	0	3.907.488.600
02.04	24	01	Pencegahan,	0	3.801.200.000	0	3.801.200.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA				
02.04	24	02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	0	0	0	0
02.04	24	03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	106.288.600	0	0	106.288.600
02.04	24	05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	0	0	0	0
02.04	24	08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	0	0	0	0
02.04	24	09	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi	0	0	0	0
02.04	26		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	0	0	0	0
02.04	26	04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	0	0	0	0
02.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			KEHUTANAN				
02.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000
02.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	0	0	0
02.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000
03.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.379.000.000	0	0	1.379.000.000
03.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	163.080.000	0	0	163.080.000
03.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	163.080.000	0	0	163.080.000
03.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000	0	0	15.000.000
03.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15.000.000	0	0	15.000.000
03.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.705.421	0	0	363.705.421
03.01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.707.175	0	0	5.707.175
03.01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.780.276	0	0	16.780.276
03.01	06	05	Penyediaan Barang	7.458.970	0	0	7.458.970

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Cetakan dan Pengandaan				
03.01	06	07	Penyediaan Bahan/Material	1.785.000	0	0	1.785.000
03.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	331.974.000	0	0	331.974.000
03.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.966.511	0	0	73.966.511
03.01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.966.511	0	0	73.966.511
03.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	364.047.768	0	0	364.047.768
03.01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.075.000	0	0	5.075.000
03.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.740.000	0	0	112.740.000
03.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	246.232.768	0	0	246.232.768
03.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	399.200.300	0	0	399.200.300
03.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.210.300	0	0	96.210.300
03.01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.540.000	0	0	17.540.000
03.01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	12.000.000	0	0	12.000.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			dan Bangunan Lainnya				
03.01	09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	273.450.000	0	0	273.450.000
03.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	389.000.000	16.127.355.902	0	16.516.355.902
03.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	3.598.011.000	0	3.598.011.000
03.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	3.598.011.000	0	3.598.011.000
03.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	0	765.670.000	0	765.670.000
03.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	765.670.000	0	765.670.000
03.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	200.000.000	0	0	200.000.000
03.03	17	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	200.000.000	0	0	200.000.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
03.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	0	3.316.555.000	3.316.555.000
03.03	18	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	0	0	0
03.03	18	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	0	3.316.555.000	3.316.555.000
03.03	18	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	0	0	0	0
03.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	189.000.000	8.447.119.902	0	8.636.119.902
03.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	189.000.000	0	0	189.000.000
03.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	718.551.700	0	718.551.700
03.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	7.728.568.202	0	7.728.568.202
03.03	24		Perbenihan Tanaman Hutan	0	0	0	0
03.03	24	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	0	0	0	0
03.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN	0	687.573.100	0	687.573.100

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				
03.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	687.573.100	0	687.573.100
03.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	219.336.100	0	219.336.100
03.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	468.237.000	0	468.237.000
04.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.568.000.000	240.000.000	0	1.808.000.000
04.01	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	240.000.000	0	240.000.000
04.01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	240.000.000	0	240.000.000
04.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	172.680.000	0	0	172.680.000
04.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	172.680.000	0	0	172.680.000
04.01	05		Administrasi Kepegawaian	53.800.000	0	0	53.800.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Perangkat Daerah				
04.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53.800.000	0	0	53.800.000
04.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.864.514	0	0	300.864.514
04.01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.399.600	0	0	8.399.600
04.01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.336.264	0	0	29.336.264
04.01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.400.000	0	0	24.400.000
04.01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.768.650	0	0	27.768.650
04.01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	5.760.000	0	0	5.760.000
04.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.200.000	0	0	205.200.000
04.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	195.600.000	0	0	195.600.000
04.01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	195.600.000	0	0	195.600.000
04.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600.404.486	0	0	600.404.486
04.01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000	0	0	10.500.000
04.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171.265.046	0	0	171.265.046
04.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	418.639.440	0	0	418.639.440

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
04.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.651.000	0	0	244.651.000
04.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	232.501.000	0	0	232.501.000
04.01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.150.000	0	0	12.150.000
04.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	272.400.000	7.277.500.000	0	7.549.900.000
04.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	884.380.000	0	884.380.000
04.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	884.380.000	0	884.380.000
04.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	150.000.000	0	0	150.000.000
04.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	150.000.000	0	0	150.000.000
04.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan	0	2.972.100.000	0	2.972.100.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Negara				
04.03	18	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	2.972.100.000	0	2.972.100.000
04.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	122.400.000	3.421.020.000	0	3.543.420.000
04.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	122.400.000	0	0	122.400.000
04.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	322.670.000	0	322.670.000
04.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	3.098.350.000	0	3.098.350.000
04.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	882.500.000	0	882.500.000
04.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	882.500.000	0	882.500.000
04.05	27	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	0	32.500.000	0	32.500.000
04.05	27	02	Penguatan dan	0	0	0	0

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				
04.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	850.000.000	0	850.000.000
05.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.656.000.000	0	0	1.656.000.000
05.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	239.300.000	0	0	239.300.000
05.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	239.300.000	0	0	239.300.000
05.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91.430.000	0	0	91.430.000
05.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	91.430.000	0	0	91.430.000
05.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	513.796.068	0	0	513.796.068
05.01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	303.536.068	0	0	303.536.068
05.01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	0	0	5.000.000
05.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.260.000	0	0	205.260.000
05.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	386.225.932	0	0	386.225.932
05.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	76.315.980	0	0	76.315.980

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Daya Air dan Listrik				
05.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	309.909.952	0	0	309.909.952
05.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	425.248.000	0	0	425.248.000
05.01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	28.600.000	0	0	28.600.000
05.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	246.648.000	0	0	246.648.000
05.01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000	0	0	150.000.000
05.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	212.000.000	19.495.909.000	0	19.707.909.000
05.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	11.201.374.750	0	11.201.374.750
05.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	11.201.374.750	0	11.201.374.750
05.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada	0	0	0	0

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)				
05.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	0	0	0
05.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	106.000.000	0	0	106.000.000
05.03	17	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	106.000.000	0	0	106.000.000
05.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	5.677.387.050	0	5.677.387.050
05.03	18	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	0	0	0
05.03	18	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	2.410.860.450	0	2.410.860.450
05.03	18	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	3.066.526.600	0	3.266.526.600
05.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	106.000.000	2.617.147.200	0	2.723.147.200
05.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	106.000.000	0	0	106.000.000
05.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	576.392.000	0	576.392.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
05.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	2.040.755.200	0	2.040.755.200
05.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	504.091.000	0	504.091.000
05.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	504.091.000	0	504.091.000
05.05	27	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	0	230.004.000	0	230.004.000
05.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	0	0	0
05.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	274.087.000	0	274.087.000
06.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.696.000.000	0	0	1.696.000.000
06.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	162.480.000	0	0	162.480.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
06.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	162.480.000	0	0	162.480.000
06.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.870.000	0	0	69.870.000
06.01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	69.870.000	0	0	69.870.000
06.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	232.588.982	0	0	232.588.982
06.01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.388.702	0	0	9.388.702
06.01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.980.280	0	0	12.980.280
06.01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.300.000	0	0	8.300.000
06.01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	1.920.000	0	0	1.920.000
06.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	0	0	200.000.000
06.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	190.272.000	0	0	190.272.000
06.01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	190.272.000	0	0	190.272.000
06.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	597.763.518	0	0	597.763.518
06.01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.200.000	0	0	5.200.000
06.01	08	02	Penyediaan Jasa	93.505.150	0	0	93.505.150

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
06.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	499.058.368	0	0	499.058.368
06.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.025.500	0	0	443.025.500
06.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	197.627.700	0	0	197.627.700
06.01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.398.800	0	0	32.398.800
06.01	09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	212.999.000	0	0	212.999.000
06.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	262.000.000	8.620.678.900	0	8.882.678.900
06.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	1.304.518.220	0	1.304.518.220
06.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	1.304.518.220	0	1.304.518.220
06.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan	0	250.000.000	0	250.000.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)				
06.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	250.000.000	0	250.000.000
06.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	128.000.000	1.317.680.121	0	1.445.680.121
06.03	17	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	128.000.000	0	0	128.000.000
06.03	17	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	0	1.317.680.121	0	1.317.680.121
06.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	2.148.286.100	0	2.148.286.100
06.03	18	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	0	0	0
06.03	18	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	1.639.584.100	0	1.639.584.100
06.03	18	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	0	0	0	0
06.03	18	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	508.702.000	0	508.702.000
06.03	18	08	Pembinaan dan/atau	0	0	0	0

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				
06.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	134.000.000	1.682.087.500	0	1.816.087.500
06.03	19	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	134.000.000	0	0	134.000.000
06.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	399.350.700	0	399.350.700
06.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	1.282.736.800	0	1.282.736.800
06.03	20		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	0	1.918.106.959	0	1.918.106.959
06.03	20	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	0	1.370.632.559	0	1.370.632.559
06.03	20	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	0	547.474.400	0	547.474.400
06.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	629.321.100	0	629.321.100
06.05	27		Pelaksanaan	0	629.321.100	0	629.321.100

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				
06.05	27	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	0	77.040.000	0	77.040.000
06.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	370.579.300	0	370.579.300
06.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	181.701.800	0	181.701.800
07.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.303.000.000	0	0	1.303.000.000
07.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	221.730.180	0	0	221.730.180
07.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	221.730.180	0	0	221.730.180
07.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	111.400.000	0	0	111.400.000
07.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	81.400.000	0	0	81.400.000
07.01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	0	0	69.870.000
07.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	261.119.520	0	0	261.119.520

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
07.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	261.119.520	0	0	261.119.520
07.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.000.000	0	0	81.000.000
07.01	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.000.000	0	0	81.000.000
07.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.365.344	0	0	419.365.344
07.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.600.000	0	0	75.600.000
07.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	343.765.344	0	0	343.765.344
07.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.384.956	0	0	208.384.956
07.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.190.300	0	0	98.190.300
07.01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.760.000	0	0	8.760.000
07.01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	101.434.656	0	0	101.434.656
07.03			PROGRAM	465.000.000	14.098.000.000	0	14.563.000.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			PENGELOLAAN HUTAN				
07.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	757.112.500	0	757.112.500
07.03	15	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	200.000.000	0	200.000.000
07.03	15	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	0	0	0
07.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	557.112.500	0	557.112.500
07.03	15	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	0	0	0	0
07.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	400.000.000	0	0	400.000.000
07.03	17	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	110.000.000	0	0	110.000.000
07.03	17	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	110.000.000	0	0	110.000.000
07.03	17	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan	70.000.000	0	0	70.000.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Produksi				
07.03	17	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	110.000.000	0	0	110.000.000
07.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	4.183.937.500	0	4.183.937.500
07.03	18	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	0	0	0
07.03	18	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	1.300.000.000	0	1.300.000.000
07.03	18	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	0	300.000.000	0	300.000.000
07.03	18	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	2.583.937.500	0	2.583.937.500
07.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	65.000.000	9.156.950.000	0	9.221.950.000
07.03	19	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	0	0	0	0
07.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	65.000.000	0	0	65.000.000
07.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	1.225.592.000	0	1.225.592.000
07.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran	0	7.931.358.000	0	7.931.358.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Hutan dan Lahan				
07.03	23		Perbenihan Tanaman Hutan	0	0	0	0
07.03	23	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	0	0	0	0
07.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	1.602.000.000	0	1.602.000.000
07.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	1.602.000.000	0	1.602.000.000
07.05	27	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	0	202.000.000	0	202.000.000
07.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	400.000.000	0	400.000.000
07.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000
09.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.479.000.000	0	0	1.479.000.000
09.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	246.080.000	0	0	246.080.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
09.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	246.080.000	0	0	246.080.000
09.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.740.500	0	0	42.740.500
09.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42.740.500	0	0	42.740.500
09.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	374.369.198	0	0	374.369.198
09.01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.080.271	0	0	7.080.271
09.01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.688.927	0	0	41.688.927
09.01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.600.000	0	0	7.600.000
09.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	318.000.000	0	0	318.000.000
09.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.550.000	0	0	128.550.000
09.01	07	05	Pengadaan Mebel	23.400.000	0	0	23.400.000
09.01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.150.000	0	0	105.150.000
09.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.195.302	0	0	325.195.302
09.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.575.862	0	0	122.575.862
09.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.619.440	0	0	202.619.440
09.01	09		Pemeliharaan	362.065.000	0	0	362.065.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
09.01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	38.200.000	0	0	38.200.000
09.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	323.865.000	0	0	323.865.000
09.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	280.000.000	23.237.080.000	0	23.517.080.000
09.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000
09.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000
09.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	170.000.000	0	0	170.000.000
09.03	17	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	170.000.000	0	0	170.000.000
09.03	18		Pelaksanaan	0	8.494.275.000	0	8.494.275.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				
09.03	18	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	0	0	0
09.03	18	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	2.228.159.000	0	2.228.159.000
09.03	18	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	0	0	0	0
09.03	18	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	6.116.116.000	0	6.266.116.000
09.03	18	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	0	0	0	0
09.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	110.000.000	4.742.805.000	0	4.852.805.000
09.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	110.000.000	0	0	110.000.000
09.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	420.950.000	0	420.950.000
09.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	4.321.855.000	0	4.321.855.000
09.03	20		Pelaksanaan Pengolahan Hasil	0	0	0	0

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Hutan Bukan Kayu (HHBK)				
09.03	20	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	0	0	0	0
09.03	20	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	0	0	0	0
09.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	2.662.920.000	0	2.662.920.000
09.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	2.662.920.000	0	2.662.920.000
09.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	2.428.570.000	0	2.428.570.000
09.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	234.350.000	0	234.350.000
10.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.368.000.000	0	0	1.368.000.000
10.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	177.480.000	0	0	177.480.000
10.01	02	02	Penyediaan	177.480.000	0	0	177.480.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
10.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	125.750.000	0	0	125.750.000
10.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33.950.000	0	0	33.950.000
10.01	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	37.800.000	0	0	37.800.000
10.01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16.800.000	0	0	16.800.000
10.01	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	20.400.000	0	0	20.400.000
10.01	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	16.800.000	0	0	16.800.000
10.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	358.200.000	0	0	358.200.000
10.01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.000.000	0	0	48.000.000
10.01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.000.000	0	0	24.000.000
10.01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	6.000.000	0	0	6.000.000
10.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.200.000	0	0	280.200.000
10.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.878.468	0	0	109.878.468
10.01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.878.468	0	0	109.878.468

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
10.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396.691.532	0	0	396.691.532
10.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.260.028	0	0	162.260.028
10.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	234.431.504	0	0	234.431.504
10.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.000.000	0	0	200.000.000
10.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	190.000.000	0	0	190.000.000
10.01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	0	0	10.000.000
10.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	200.000.000	8.489.626.600	0	8.689.626.600
10.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	3.997.632.300	0	3.997.632.300
10.03	15	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	358.421.000	0	358.421.000
10.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	3.639.211.300	0	3.639.211.300

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
10.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	0	0	0	0
10.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	0	0	0
10.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	200.000.000	0	0	200.000.000
10.03	17	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	0	0	0	0
10.03	17	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	0	0	0	0
10.03	17	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	200.000.000	0	0	200.000.000
10.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	291.506.000	0	291.506.000
10.03	18	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	0	0	0
10.03	18	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	291.506.000	0	291.506.000
10.03	18	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam	0	0	0	0

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				
10.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	0	4.200.488.300	0	4.200.488.300
10.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	792.712.000	0	792.712.000
10.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	3.407.776.300	0	3.407.776.300
10.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	200.000.000	1.010.373.400	0	1.210.373.400
10.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	200.000.000	1.010.373.400	0	1.210.373.400
10.05	27	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	0	0	0	0
10.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	200.000.000	389.483.600	0	589.483.600
10.05	27	03	Penyiapan dan	0	620.889.800	0	620.889.800

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Pengembangan Perhutanan Sosial				
11.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.448.000.000	0	0	1.448.000.000
11.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	148.080.000	0	0	148.080.000
11.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.080.000	0	0	148.080.000
11.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	119.500.000	0	0	119.500.000
11.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56.500.000	0	0	56.500.000
11.01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	63.000.000	0	0	63.000.000
11.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.832.000	0	0	350.832.000
11.01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	0	0	6.000.000
11.01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	0	0	20.000.000
11.01	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.475.000	0	0	21.475.000
11.01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.032.000	0	0	40.032.000
11.01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.925.000	0	0	20.925.000
11.01	06	09	Penyelenggaraan	242.400.000	0	0	242.400.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
11.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	320.546.000	0	0	320.546.000
11.01	07	05	Pengadaan Mebel	72.285.000	0	0	72.285.000
11.01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	248.261.000	0	0	248.261.000
11.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.926.700	0	0	354.926.700
11.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	0	0	60.000.000
11.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	294.926.700	0	0	294.926.700
11.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.115.300	0	0	154.115.300
11.01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	10.685.300	0	0	10.685.300
11.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.270.000	0	0	113.270.000
11.01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.560.000	0	0	16.560.000
11.01	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	13.600.000	0	0	13.600.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Lainnya				
11.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	320.000.000	8.921.960.000	0	9.241.960.000
11.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	5.850.000.000	0	5.850.000.000
11.03	15	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	700.000.000	0	700.000.000
11.03	15	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	0	0	0
11.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	5.150.000.000	0	5.150.000.000
11.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	0	0	0	0
11.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	0	0	0
11.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	200.000.000	565.000.000	0	765.000.000
11.03	17	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	0	0	0	0
11.03	17	08	Pelaksanaan	200.000.000	565.000.000	0	765.000.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Pemanfaatan Hutan di KPH				
11.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	530.098.000	0	530.098.000
11.03	18	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	0	0	0
11.03	18	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	530.098.000	0	530.098.000
11.03	18	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	0	0	0	0
11.03	19		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	120.000.000	1.923.930.000	0	1.976.862.000
11.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	120.000.000	0	0	120.000.000
11.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	267.530.000	0	0	267.530.000
11.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	172.932.000	0	1.709.332.000
11.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI	0	578.040.000	0	578.040.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			BIDANG KEHUTANAN				
11.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	578.040.000	0	578.040.000
11.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	229.190.000	0	229.190.000
11.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	348.850.000	0	348.850.000
12.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.733.000.000	0	0	1.733.000.000
12.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	246.439.003	0	0	246.439.003
12.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	246.439.003	0	0	246.439.003
12.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87.860.000	0	0	87.860.000
12.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	87.860.000	0	0	87.860.000
12.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	331.169.048	0	0	331.169.048
12.01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.995.648	0	0	9.995.648
12.01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	165.497.000	0	0	165.497.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Kantor				
12.01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	0	0	5.000.000
12.01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.276.400	0	0	13.276.400
12.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.400.000	0	0	137.400.000
12.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.900.000	0	0	38.900.000
12.01	07	05	Pengadaan Mebel	38.900.000	0	0	38.900.000
12.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	824.749.149	0	0	354.926.700
12.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.046.601	0	0	60.000.000
12.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	668.702.548	0	0	294.926.700
12.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.882.800	0	0	203.882.800
12.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.432.800	0	0	170.432.800
12.01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.450.000	0	0	33.450.000
12.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	250.000.000	11.300.000.000	0	11.550.000.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
12.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	4.043.730.000	0	4.043.730.000
12.03	15	03	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	760.580.000	0	760.580.000
12.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	3.283.150.000	0	3.283.150.000
12.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	0	100.800.000	0	100.800.000
12.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	100.800.000	0	100.800.000
12.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	150.000.000	338.620.000	0	488.620.000
12.03	17	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	150.000.000	0	0	150.000.000
12.03	17	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	0	221.400.000	0	221.400.000
12.03	17	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu	0	117.220.000	0	117.220.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			dan/atau Jasa Lingkungan				
12.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	2.070.760.000	0	2.070.760.000
12.03	18	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	0	0	0
12.03	18	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	850.000.000	0	850.000.000
12.03	18	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	1.220.760.000	0	1.220.760.000
12.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	100.000.000	4.166.850.000	0	4.266.850.000
12.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	0	0	0	0
12.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	100.000.000	600.000.000	0	700.000.000
12.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	3.566.850.000	0	3.566.850.000
12.03	20		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	0	579.240.000	0	579.240.000
12.03	20	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	0	579.240.000	0	579.240.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
12.03			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000
12.03	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000
12.03	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	500.000.000	0	500.000.000
12.03	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	500.000.000	0	500.000.000
13.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.382.000.000	214.000.000	0	1.596.000.000
13.01	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	214.000.000	0	214.000.000
13.01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	214.000.000	0	214.000.000
13.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	126.720.000	0	0	126.720.000
13.01	02	02	Penyediaan Administrasi	126.720.000	0	0	126.720.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Pelaksanaan Tugas ASN				
13.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	161.511.000	0	0	161.511.000
13.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	59.610.000	0	0	59.610.000
13.01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	101.901.000	0	0	101.901.000
13.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	403.230.000	0	0	403.230.000
13.01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.910.000	0	0	6.910.000
13.01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.000.000	0	0	72.000.000
13.01	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.500.000	0	0	6.500.000
13.01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.400.000	0	0	34.400.000
13.01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.740.000	0	0	7.740.000
13.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275.680.000	0	0	275.680.000
13.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	153.472.200	0	0	153.472.200
13.01	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	153.472.200	0	0	153.472.200
13.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	347.066.800	0	0	347.066.800

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Daerah				
13.01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	0	0	3.000.000
13.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.411.500	0	0	67.411.500
13.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	276.655.300	0	0	276.655.300
13.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.000.000	0	0	190.000.000
13.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	190.000.000	0	0	190.000.000
13.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	386.000.000	6.703.780.000	0	7.089.780.000
13.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	2.184.000.000	0	2.184.000.000
13.03	15	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	545.000.000	0	545.000.000
13.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	1.639.000.000	0	1.639.000.000
13.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	204.000.000	0	0	204.000.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
13.03	17	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	204.000.000	0	0	204.000.000
13.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	1.350.000.000	0	1.350.000.000
13.03	18	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	1.200.000.000	0	1.200.000.000
13.03	18	04	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	150.000.000	0	150.000.000
13.03	18	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	0	0	0
13.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	182.000.000	3.169.780.000	0	3.351.780.000
13.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	0	0	0	0
13.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	182.000.000	440.000.000	0	622.000.000
13.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	2.729.780.000	0	2.729.780.000
13.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG	0	775.220.000	0	775.220.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			KEHUTANAN				
13.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	775.220.000	0	775.220.000
13.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	203.220.000	0	203.220.000
13.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	572.000.000	0	572.000.000
14.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.450.000.000	0	0	1.450.000.000
14.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	206.335.000	0	0	206.335.000
14.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	206.335.000	0	0	206.335.000
14.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.150.000	0	0	96.150.000
14.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26.550.000	0	0	26.550.000
14.01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	69.600.000	0	0	69.600.000
14.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	221.237.200	0	0	221.237.200
14.01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.237.200	0	0	23.237.200

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
14.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	198.000.000	0	0	198.000.000
14.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	477.911.672	0	0	477.911.672
14.01	07	05	Pengadaan Mebel	25.500.000	0	0	25.500.000
14.01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	240.304.372	0	0	240.304.372
14.01	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	212.107.300	0	0	212.107.300
14.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340.366.128	0	0	340.366.128
14.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.808.000	0	0	88.808.000
14.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	251.558.128	0	0	251.558.128
14.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.000.000	0	0	108.000.000
14.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.000.000	0	0	108.000.000
14.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	318.000.000	4.937.920.000	0	5.255.920.000
14.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	1.334.805.000	0	1.334.805.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)				
14.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	1.334.805.000	0	1.334.805.000
14.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	166.000.000	0	0	166.000.000
14.03	17	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	166.000.000	0	0	166.000.000
14.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	657.580.000	0	657.580.000
14.03	18	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	0	0	0
14.03	18	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	559.840.000	0	559.840.000
14.03	18	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	0	97.740.000	0	97.740.000
14.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	152.000.000	2.680.155.000	0	2.680.155.000
14.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	152.000.000	0	0	152.000.000
14.03	19	04	Koordinasi,	0	614.185.000	0	614.185.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				
14.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	2.065.970.000	0	2.065.970.000
14.03	23		Perbenihan Tanaman Hutan	0	265.380.000	0	265.380.000
14.03	23	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	0	265.380.000	0	265.380.000
14.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	562.080.000	0	562.080.000
14.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	562.080.000	0	562.080.000
14.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	240.320.000	0	240.320.000
14.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	321.760.000	0	321.760.000
15.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.334.000.000	0	0	1.334.000.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
15.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	163.246.000	0	0	163.246.000
15.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	163.246.000	0	0	163.246.000
15.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.835.000	0	0	27.835.000
15.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	27.835.000	0	0	27.835.000
15.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.000.000	0	0	200.000.000
15.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	0	0	200.000.000
15.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	439.939.000	0	0	439.939.000
15.01	07	05	Pengadaan Mebel	75.912.000	0	0	75.912.000
15.01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	264.027.000	0	0	264.027.000
15.01	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	0	0	100.000.000
15.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335.928.000	0	0	335.928.000
15.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.100.000	0	0	71.100.000
15.01	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.630.000	0	0	22.630.000
15.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	242.198.000	0	0	242.198.000
15.01	09		Pemeliharaan Barang Milik	167.052.000	0	0	167.052.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
15.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	167.052.000	0	0	167.052.000
15.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	434.000.000	7.311.334.500	0	7.745.334.500
15.03	15		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	2.408.184.700	0	2.408.184.700
15.03	15	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	89.600.000	0	89.600.000
15.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	2.318.584.700	0	2.318.584.700
15.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	0	0	0	0
15.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	0	0	0
15.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	234.000.000	0	0	234.000.000
15.03	17	04	Koordinasi dan Sinkronisasi	234.000.000	0	0	234.000.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi				
15.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	368.688.000	0	368.688.000
15.03	18	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	368.688.000	0	368.688.000
15.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	200.000.000	4.534.461.800	0	4.734.461.800
15.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	200.000.000	0	0	200.000.000
15.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	1.463.150.000	0	1.463.150.000
15.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	3.071.311.800	0	3.071.311.800
15.03	23		Perbenihan Tanaman Hutan	0	0	0	0
15.03	23	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	0	0	0	0
15.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI	0	1.656.665.500	0	1.656.665.500

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			BIDANG KEHUTANAN				
15.27	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	1.656.665.500	0	1.656.665.500
15.27	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	1.084.174.500	0	1.084.174.500
15.27	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	572.491.000	0	572.491.000
16.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.368.000.000	0	0	1.368.000.000
16.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	114.600.000	0	0	114.600.000
16.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	114.600.000	0	0	114.600.000
16.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.640.000	0	0	99.640.000
16.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	47.440.000	0	0	47.440.000
16.01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52.200.000	0	0	52.200.000
16.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	297.583.412	0	0	297.583.412
16.01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	15.294.000	0	0	15.294.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
16.01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.652.912	0	0	37.652.912
16.01	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.456.500	0	0	13.456.500
16.01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.480.000	0	0	31.480.000
16.01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.700.000	0	0	8.700.000
16.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.000.000	0	0	191.000.000
16.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	365.700.000	0	0	365.700.000
16.01	07	05	Pengadaan Mebel	84.400.000	0	0	84.400.000
16.01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	281.300.000	0	0	281.300.000
16.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361.498.088	0	0	361.498.088
16.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.400.000	0	0	116.400.000
16.01	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.325.000	0	0	2.325.000
16.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	242.773.088	0	0	242.773.088
16.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.978.500	0	0	128.978.500
16.01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	1.500.000	0	0	1.500.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan				
16.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.150.000	0	0	8.150.000
16.01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	119.328.500	0	0	119.328.500
16.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	400.000.000	8.361.980.600	0	8.761.980.600
16.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	1.949.856.490	0	1.949.856.490
16.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	1.949.856.490	0	1.949.856.490
16.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	200.000.000	0	0	200.000.000
16.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	200.000.000	0	0	200.000.000
16.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	0	0	0
16.03	18	04	Pembangunan	0	0	(0)	0

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				
16.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	200.000.000	6.412.124.110	0	6.612.124.110
16.03	19	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	0	0	0	0
16.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	200.000.000	399.815.000	0	599.815.000
16.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	6.012.309.110	0	6.012.309.110
16.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	637.269.400	0	637.269.400
16.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	637.269.400	0	637.269.400
16.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	283.086.400	0	283.086.400
16.05	27	03	Penyiapan dan	0	354.183.000	0	354.183.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Pengembangan Perhutanan Sosial				
16.06	28		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	0	493.750.000	0	493.750.000
16.06	28		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0	493.750.000	0	493.750.000
16.06	28	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	0	493.750.000	0	493.750.000
17.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.368.000.000	0	0	1.368.000.000
17.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	348.000.000	0	0	348.000.000
17.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	348.000.000	0	0	348.000.000
17.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	176.852.000	0	0	176.852.000
17.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.916.000	0	0	22.916.000
17.01	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	153.936.000	0	0	153.936.000
17.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	192.260.000	0	0	192.260.000
17.01	06	09	Penyelenggaraan	192.260.000	0	0	192.260.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
17.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	153.400.000	0	0	153.400.000
17.01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	153.400.000	0	0	153.400.000
17.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396.238.000	0	0	396.238.000
17.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.907.312	0	0	79.907.312
17.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	316.330.688	0	0	316.330.688
17.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.250.000	0	0	101.250.000
17.01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	31.150.000	0	0	31.150.000
17.01	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.100.000	0	0	65.100.000
17.01	09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	0	0	5.000.000
17.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	400.000.000	7.690.000.000	0	8.090.000.000
17.03	15		Pengelolaan	0	1.191.600.000	0	1.191.600.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				
17.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	1.191.600.000	0	1.191.600.000
17.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	200.000.000	0	0	200.000.000
17.03	17	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	200.000.000	0	0	200.000.000
17.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	0	0	0
17.03	18	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	0	0	0
17.03	18	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	0	0	0	0
17.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	200.000.000	6.498.400.000	0	6.698.400.000
17.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	200.000.000	0	0	200.000.000
17.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	383.430.000	0	383.430.000
17.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	0	6.114.970.000	0	6.114.970.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				
17.03	23		Perbenihan Tanaman Hutan	0	0	0	0
17.03	23	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	0	0	0	0
17.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	560.000.000	0	560.000.000
17.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	560.000.000	0	560.000.000
17.05	27	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	0	0	0	0
17.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	205.695.000	0	205.695.000
17.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	354.305.000	0	354.305.000
18.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.718.000.000	0	0	1.718.000.000
18.01	02			160.800.000	0	0	160.800.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
18.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	160.800.000	0	0	160.800.000
18.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.140.843	0	0	80.140.843
18.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80.140.843	0	0	80.140.843
18.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.820.000	0	0	174.820.000
18.01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	0	0	4.000.000
18.01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.720.000	0	0	18.720.000
18.01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.100.000	0	0	2.100.000
18.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	0	0	150.000.000
18.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	189.075.000	0	0	189.075.000
18.01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	189.075.000	0	0	189.075.000
18.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	883.824.157	0	0	883.824.157
18.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.763.517	0	0	97.763.517
18.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	786.060.640	0	0	786.060.640

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
18.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.340.000	0	0	229.340.000
18.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.980.000	0	0	17.980.000
18.01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	154.960.000	0	0	154.960.000
18.01	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.400.000	0	0	56.400.000
18.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	150.000.000	8.500.000.000	0	8.650.000.000
18.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	2.171.610.000	0	2.171.610.000
18.03	15	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	150.000.000	0	150.000.000
18.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	2.021.610.000	0	2.021.610.000
18.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan	0	150.000.000	0	150.000.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)				
18.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	150.000.000	0	150.000.000
18.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	0	150.000.000	0	150.000.000
18.03	17	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	0	150.000.000	0	150.000.000
18.03	17	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	0	0	0	0
18.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	1.699.840.000	0	1.699.840.000
18.03	18	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	0	0	0
18.03	18	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	1.022.840.000	0	1.022.840.000
18.03	18	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	677.000.000	0	677.000.000
18.03	18	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	0	0	0	0
18.03	19		Pelaksanaan	0	4.478.550.000	0	4.478.550.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				
18.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	0	0	0	0
18.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	354.000.000	0	354.000.000
18.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	4.124.550.000	0	4.124.550.000
18.04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	100.000.000	0	0	100.000.000
18.04	26		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	100.000.000	0	0	100.000.000
18.04	26	04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	100.000.000	0	0	100.000.000
18.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI	0	1.650.000.000	0	1.650.000.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			BIDANG KEHUTANAN				
18.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	1.650.000.000	0	1.650.000.000
18.05	27	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	0	125.000.000	0	125.000.000
18.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	1.155.000.000	0	1.155.000.000
18.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	370.000.000	0	370.000.000
19.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.468.000.000	208.800.000	0	1.676.800.000
19.01	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	208.800.000	0	208.800.000
19.01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	208.800.000	0	208.800.000
19.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	179.880.000	0	0	179.880.000
19.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	179.880.000	0	0	179.880.000
19.01	05		Administrasi	63.300.000	0	0	63.300.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Kepegawaian Perangkat Daerah				
19.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28.300.000	0	0	28.300.000
19.01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000	0	0	35.000.000
19.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	272.718.564	0	0	272.718.564
19.01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.444.250	0	0	10.444.250
19.01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.174.314	0	0	20.174.314
19.01	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	0	0	30.000.000
19.01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.800.000	0	0	39.800.000
19.01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.300.000	0	0	28.300.000
19.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.000.000	0	0	144.000.000
19.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	131.900.000	0	0	131.900.000
19.01	07	05	Pengadaan Mebel	73.300.000	0	0	73.300.000
19.01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.600.000	0	0	58.600.000
19.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.266.536	0	0	449.266.536
19.01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	0	0	5.000.000
19.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	78.000.000	0	0	78.000.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Daya Air dan Listrik				
19.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	366.266.536	0	0	366.266.536
19.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	370.934.900	0	0	370.934.900
19.01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	56.192.300	0	0	56.192.300
19.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	281.642.600	0	0	281.642.600
19.01	09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.100.000	0	0	33.100.000
19.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	300.000.000	12.105.425.000	0	12.405.425.000
19.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	5.305.707.700	0	5.305.707.700
19.03	15	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	435.000.000	0	435.000.000
19.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana	0	4.870.707.700	0	4.870.707.700

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Prasarana Operasionalisasi KPH				
19.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	0	80.500.000	0	80.500.000
19.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	80.500.000	0	80.500.000
19.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	150.000.000	187.800.000	0	337.800.000
19.03	16	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	150.000.000	0	0	150.000.000
19.03	17	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	0	187.800.000	0	187.800.000
19.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	1.986.754.400	0	1.986.754.400
19.03	18	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	1.986.754.400	0	1.986.754.400
19.03	18	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	0	0	0	0
19.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	150.000.000	4.544.662.900	0	4.694.662.900

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
19.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	150.000.000	0	0	150.000.000
19.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	544.000.000	0	544.000.000
19.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	4.000.662.900	0	4.000.662.900
19.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	885.775.000	0	885.775.000
19.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	885.775.000	0	885.775.000
19.05	27	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	0	73.800.000	0	73.800.000
19.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	587.475.000	0	587.475.000
19.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	224.500.000	0	224.500.000
20.01			PROGRAM	1.518.000.000	0	0	1.518.000.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
20.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	179.880.000	0	0	179.880.000
20.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	179.880.000	0	0	179.880.000
20.01	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	33.600.000	0	0	33.600.000
20.01	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.600.000	0	0	33.600.000
20.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91.400.000	0	0	91.400.000
20.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.000.000	0	0	25.000.000
20.01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	66.400.000	0	0	66.400.000
20.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	264.952.452	0	0	264.952.452
20.01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	0	0	6.000.000
20.01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.606.452	0	0	15.606.452
20.01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.250.000	0	0	40.250.000
20.01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.096.000	0	0	3.096.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
20.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	0	0	200.000.000
20.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	183.100.000	0	0	183.100.000
20.01	07	05	Pengadaan Mebel	40.000.000	0	0	40.000.000
20.01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	143.100.000	0	0	143.100.000
20.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575.084.048	0	0	575.084.048
20.01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	0	0	3.000.000
20.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.000.000	0	0	78.000.000
20.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	494.084.048	0	0	494.084.048
20.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.983.500	0	0	189.983.500
20.01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.983.500	0	0	39.983.500
20.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.000.000	0	0	110.000.000
20.01	09	06	Pemeliharaan	10.000.000	0	0	10.000.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Peralatan dan Mesin Lainnya				
20.01	09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	0	0	30.000.000
20.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	250.000.000	9.380.000.000	0	9.630.000.000
20.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	2.030.000.000	0	2.030.000.000
20.03	15	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	150.000.000	0	150.000.000
20.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	1.880.000.000	0	1.880.000.000
20.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	0	100.000.000	0	100.000.000
20.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	100.000.000	0	100.000.000
20.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	150.000.000	0	0	150.000.000
20.03	17	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin	150.000.000	0	0	150.000.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi				
20.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000
20.03	18	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000
20.03	18	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	0	0	0
20.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	100.000.000	6.250.000.000	0	6.350.000.000
20.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	100.000.000	0	0	100.000.000
20.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	350.000.000	0	350.000.000
20.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	5.900.000.000	0	5.900.000.000
20.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	620.000.000	0	620.000.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
20.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	620.000.000	0	620.000.000
20.05	27	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	0	0	0	0
20.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	430.000.000	0	430.000.000
20.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	190.000.000	0	190.000.000
21.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.468.000.000	0	0	1.468.000.000
21.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	150.720.000	0	0	150.720.000
21.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	150.720.000	0	0	150.720.000
21.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.050.000	0	0	57.050.000
21.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	27.050.000	0	0	27.050.000
21.01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	0	0	30.000.000
21.01	06		Administrasi Umum	272.415.393	0	0	272.415.393

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Perangkat Daerah				
21.01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.199.473	0	0	7.199.473
21.01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.574.970	0	0	35.574.970
21.01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.440.950	0	0	9.440.950
21.01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	1.920.000	0	0	1.920.000
21.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218.280.000	0	0	218.280.000
21.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.098.600	0	0	111.098.600
21.01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.698.600	0	0	86.698.600
21.01	07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	24.400.000	0	0	24.400.000
21.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	648.655.878	0	0	648.655.878
21.01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	0	0	6.000.000
21.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.349.622	0	0	61.349.622
21.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	581.306.256	0	0	581.306.256
21.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.060.129	0	0	228.060.129

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
21.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.683.800	0	0	113.683.800
21.01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.470.000	0	0	18.470.000
21.01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	76.800.000	0	0	76.800.000
21.01	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.106.329	0	0	19.106.329
21.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	300.000.000	7.998.084.504	0	8.298.084.504
21.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	3.362.621.679	0	3.362.621.679
21.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	3.362.621.679	0	3.362.621.679
21.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	150.000.000	0	0	150.000.000
21.03	17	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	150.000.000	0	0	150.000.000
21.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar	0	1.638.359.092	0	1.638.359.092

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Kawasan Hutan Negara				
21.03	18	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	0	0	0
21.03	18	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	1.408.439.222	0	1.408.439.222
21.03	18	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	229.919.870	0	229.919.870
21.03	18	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	0	0	0	0
21.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	150.000.000	2.997.103.733	0	3.147.103.733
21.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	150.000.000	0	0	150.000.000
21.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	346.715.500	0	346.715.500
21.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	2.650.388.233	0	2.650.388.233
21.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG	0	751.915.496	0	751.915.496

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			KEHUTANAN				
21.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	751.915.496	0	751.915.496
21.05	27	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	0	165.840.000	0	165.840.000
21.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	325.955.496	0	325.955.496
21.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	260.120.000	0	260.120.000
22.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.750.000.000	0	0	1.750.000.000
22.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	167.760.000	0	0	167.760.000
22.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	167.760.000	0	0	167.760.000
22.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.900.000	0	0	79.900.000
22.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	79.900.000	0	0	79.900.000
22.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.420.000	0	0	310.420.000
22.01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	61.300.000	0	0	61.300.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Kantor				
22.01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.850.400	0	0	95.850.400
22.01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.291.600	0	0	11.291.600
22.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.978.000	0	0	141.978.000
22.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.060.200	0	0	85.060.200
22.01	07	05	Pengadaan Mebel	85.060.200	0	0	85.060.200
22.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	841.474.788	0	0	841.474.788
22.01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.800.000	0	0	10.800.000
22.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.256.132	0	0	187.256.132
22.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	643.418.656	0	0	643.418.656
22.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.385.012	0	0	265.385.012
22.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	239.919.292	0	0	239.919.292
22.01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.465.720	0	0	25.465.720

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
22.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	200.000.000	14.299.734.500	0	14.499.734.500
22.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	10.833.109.650	0	10.833.109.650
22.03	15	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	101.600.000	0	101.600.000
22.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	10.731.509.650	0	10.731.509.650
22.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	100.000.000	0	0	100.000.000
22.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	100.000.000	0	0	100.000.000
22.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	2.733.731.050	0	2.733.731.050
22.03	18	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	0	0	0
22.03	18	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	2.733.731.050	0	2.733.731.050
22.03	18	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	0	0	0	0

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
22.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	100.000.000	732.893.800	0	832.893.800
22.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	100.000.000	0	0	100.000.000
22.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	186.979.800	0	186.979.800
22.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	545.914.000	0	545.914.000
22.03	23		Perbenihan Tanaman Hutan	0	0	0	0
22.03	23	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	0	0	0	0
22.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	200.265.500	0	200.265.500
22.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	200.265.500	0	200.265.500
22.27	27	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	0	0	0	0

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan/ DBH DR (Rp)	Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
22.27	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	49.966.000	0	49.966.000
22.27	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	150.299.500	0	150.299.500

Nomenklatur Program dan Kegiatan yang disajikan diatas berbeda dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya perubahan Permendagri yang semula didasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Permendagri No. 90 Tahun 2019. Pada tahun 2020 Dinas Kehutanan memiliki 18 program dan 85 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
 - Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
 - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
 - Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)
5. Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan
 - Kegiatan Pendampingan Penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA
 - Kegiatan Perencanaan dan Tata Hutan
 - Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

- Kegiatan Penyelesaian Penggunaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
- 6. Program Pengelolaan DAS dan RHL
 - Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - Kegiatan Pengelolaan DAS
 - Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan
- 7. Program Perlindungan dan KSDAE
 - Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan Hutan
 - Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
 - Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya
- 8. Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial
 - Kegiatan Penyuluh Kehutanan
 - Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial
 - Kegiatan Pembinaan Hutan Hak dan Hutan Adat
- 9. Program Penyuluhan (DBH DR)
 - Kegiatan Pendampingan Kegiatan RHL
 - Kegiatan Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)
 - Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)
 - Kegiatan Metode dan Materi Penyuluhan
 - Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh
 - Kegiatan Pembangunan unit percontohan penyuluhan kehutanan/demplot (DBH DR)
 - Kegiatan Pemenuhan kebutuhan sapsras penyuluhan kehutanan (DBH DR)
 - Kegiatan Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)
- 10. Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)
 - Kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial
 - Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan
 - Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat
 - Kegiatan Pembinaan
- 11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)
 - Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)
 - Kegiatan Pelatihan/Pembekalan/Inhousetraining/Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)

- Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhut (DBH SDA DR)
- Kegiatan Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran (DBH SDA DR)
- Kegiatan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)
- Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)
- Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)
- Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)
- Kegiatan Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)
- Kegiatan Penerapan Agroforestry, Agrosilvopastura, Silvopastura dan Kegiatan Sejenisnya (DBH SDA DR)
- Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL (DBH SDA DR)
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Operasional Pemadaman dan Penanganan Paska Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)
- Kegiatan Investigasi Sebab-Sebab Kebakaran (DBH SDA DR)
- Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)
- Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)
- Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)
- Kegiatan Pembuatan Sekat Kanal, Embung dan Kantong Air (DBH SDA DR)
- Kegiatan Penaksiran Luas (DBH SDA DR)
- Kegiatan Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)
- Kegiatan Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)
- Kegiatan Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)
- Kegiatan Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)
- Kegiatan Deteksi Dini (DBH SDA DR)
- Kegiatan Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)

12. Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH SDA DR)
 - Kegiatan Sosialisasi
 - Kegiatan Koordinasi
 - Kegiatan Patroli Pengamanan
13. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)
 - Kegiatan Perencanaan
 - Kegiatan Pelaksanaan
 - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
14. Program Pengembangan Perbenihan (DBH SDA DR)
 - Kegiatan Penyediaan Benih
 - Kegiatan Penyediaan Bibit
 - Kegiatan Pengedaran Benih dan Bibit
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih
 - Kegiatan Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)
 - Kegiatan Penyelenggaraan sertifikasi perbenihan (DBH DR)
 - Kegiatan Pembinaan perbenihan tanaman hutan (bimtek, monev, pelayanan perijinan dan peningkatan kualitas SDM) (DBH DR)
15. Program Pengelolaan Tahura
 - Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - Kegiatan Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Wisata di Tahura (DAK)
 - Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Wisata di Tahura (Pendamping DAK)
16. Program Pengelolaan KPHP
 - Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - Kegiatan Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Kegiatan Pembangunan Kantor Resort KPH (DAK)
 - Kegiatan Pembangunan Kantor Resort KPH (Dana Pendamping DAK)
 - Kegiatan Pemeliharaan Tanaman (DAK)
 - Kegiatan Pemeliharaan Tanaman (Dana Pendamping DAK)
 - Kegiatan Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)
17. Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)
 - Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)
18. Program Pengelolaan KPH Lindung
 - Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - Kegiatan Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat

2.2. Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan haruslah didasarkan pada prinsip efektif, efisien dan akuntabilitas (pertanggungjawaban). Efektivitas bermakna bahwa segala sumber daya (aset non tunai dan aset tunai/ kas) yang ada hendaknya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dijadikan indikator keluaran di DPA. Efisien diartikan penggunaan sumberdaya harus seminimum mungkin dalam mencapai tujuan. Melalui ketiga prinsip tersebut diharapkan anggaran yang diamanahkan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban (akuntabel), pengelola keuangan dituntut dapat mengetahui, mengelola dan menjelaskan penggunaan dana yang telah diamankan sebagaimana yang tertuang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Realisasi pelaksanaan anggaran secara garis besar tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas per tanggal tertentu. Realisasi pendapatan pada tahun ini adalah sebesar Rp. 0, nilai ini tidak tercapai dari targetnya sebesar Rp. 150.000.000 atau sebesar 0 %. Bila dibandingkan pada tahun lalu maka dapat diketahui terjadi penurunan sebesar Rp. 46.400.000. atau sebesar 100 % dari realisasi pendapatan tahun lalu sebesar Rp. 46.400.000. Realisasi belanja pada tahun ini adalah sebesar Rp. 248.500.759.861,38, nilai ini tidak mencapai target sebesar Rp. 463.954.634.702 atau sebesar 53,56 %. Bila dibandingkan pada tahun lalu maka dapat diketahui terjadi penurunan sebesar Rp. 105.485.154.654,31 atau sebesar 42,44 % dari realisasi belanja tahun lalu sebesar Rp. 353.985.914.515,69. Adapun penjelasan atas kenaikan/penurunan pendapatan dan belanja akan dijabarkan pada Bab V.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki target kinerja dalam program dan kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2 Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	141.772.084.000	0	<i>Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan</i>	82 %
01.01	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.280.000.000	0	Nilai AKIP	70 Nilai AKIP
01.01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	650.000.000	0	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Anggaran	11 dokumen
01.01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	630.000.000	0	Tersedianya Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen dan 11 laporan
01.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	134.357.299.000	0	Laporan Pembukuan Penyesuain Belanja, Penyesuaian Pendapatan, Saldo Awal Pada Neraca Keuangan yang berbasis Akrual	12 laporan
01.01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	133.717.579.000	0	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun
01.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	623.400.000	0	Jumlah Tenaga Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan
01.01	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	16.320.000	0	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	12 bulan
01.01	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	145.000.000	0	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan LBMD pada	12 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
						SKPD	
01.01	03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	145.000.000	0	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD	10 laporan
01.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	359.532.700	0	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	12 laporan
01.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	223.432.700	0	Tersedianya Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	248 stel
01.01	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	136.100.000	0	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 orang
01.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.657.872.300	0	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000	0	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan
01.01	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70.074.300	0	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan
01.01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.600.000	0	Jumlah Bahan Logistik Kantor	12 bulan
01.01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85.000.000	0	Jumlah Penggandaan/ Fotocopy	18 buku dan 47.642 lembar
01.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.445.198.000	0	Jumlah Perjalanan Dinas	258 OT
01.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	678.000.000	0	Jumlah unit pengadaan barang milik	48 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Pemerintah Daerah			daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	
01.01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	678.000.000	0	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	48 unit
01.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.128.160.000	0	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
01.01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	0	Tersedianya penyediaan Jasa surat menyurat	12 bulan
01.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	488.760.000	0	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	12 bulan
01.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.627.400.000	0	Tersedianya Jasa Tenaga Non ASN (38 OB)	12 bulan
01.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.166.220.000	0	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	61 unit
01.01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	263.020.000	0	Tersedianya unit kendaraan yang dipelihara	6 unit
01.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	377.750.000	0	Tersedianya kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan Suku Cadang, BBM dan Oli	55 unit
01.01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.950.000	0	Tersedianya Peralatan Kantor yang terpelihara	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
						(10 unit)	
01.01	09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	374.500.000	0	Tersedianya sarpras kantor yang terpelihara	1 unit
01.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.856.195.000	25.979.325.020	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu	49500000 M3 dan 7 Ton
01.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	3.888.039.020	Jumlah Dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	3 dokumen
01.03	15	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	194.330.000	Tersusunnya Dokumen Perencanaan oleh KPH	1 dokumen
01.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	3.693.709.020	Tersedianya sarana prasarana operasionalisasi KPH	1 dokumen
01.03	15	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	0	0	Tersedianya Laporan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian	3 dokumen
01.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	0	0	Dokumen RPH yang sudah disusun	1 RPHJP
01.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	0	Tersedianya Unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui	36 unit usaha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
						pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)	
01.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2.550.000.000	0	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	394 Ha
01.03	17	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	600.000.000	0	Tersedianya Dokumen Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	7 dokumen
01.03	17	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	200.000.000	0	Tersedianya Dokumen Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Lindung	2 dokumen
01.03	17	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	1.750.000.000	0	Tersedianya Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	57 laporan
01.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	220.000.000	15.091.286.000	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	400 Ha
01.03	18	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	6.051.504.550	Terlaksananya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	400 Ha
01.03	18	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	0	7.037.952.450	Luas Penghijauan Lingkungan yang ditanam dan dipelihara	380 Ha
01.03	18	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka	220.000.000	2.001.829.000	Tersedianya laporan pembinaan dan atau	10 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Pengembangan Rehabilitasi Lahan			pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	
01.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	215.895.000	7.000.000.000	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	4 kasus
01.03	19	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	0	0	Tersedianya Laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	38 laporan
01.03	19	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	108.900.000	0	Tersedianya Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	10 laporan
01.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	106.995.000	1.782.620.000	Tersedianya Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	9 laporan
01.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	5.217.380.000	Tersedianya Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (7 dokumen)	157 dokumen
01.03	21		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	258.900.000	0	Tersedianya Laporan Pembinaan pada Industri dan TPKO	12 unit manajemen
01.03	21	02	Pembinaan dan Pelaksanaan	258.900.000	0	Tersedianya Laporan	12 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun			Pembinaan pada Industri dan TPKO	
01.03	23		Perbenihan Tanaman Hutan	611.400.000	0	Tersedianya Laporan pengawasan peredaran benih dan bibit dan SK Pengada Pengedar Benih/Bibit terdaftar	9/3 SK/ Sertifikat
01.03	23	01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	407.310.000	0	SK Pengada Pengedar Benih/Bibit terdaftar dan Sertifikat Benih yang diterbitkan	15 SK
01.03	23	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	204.090.000	0	Tersedianya Laporan pengawasan peredaran benih dan bibit	30 laporan
01.04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	519.300.000	0	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	≤ 1,5%
01.04	26		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	519.300.000	0	Tersedianya Laporan Penguatan Kapasitas & Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	6000 Ha
01.04	26	05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	519.300.000	0	Tersedianya Laporan Penguatan Kapasitas & Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	10 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
						(10 laporan)	
01.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.820.000.000	19.768.401.680	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
01.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.820.000.000	19.768.401.680	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	15 laporan
01.05	27	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	732.601.000	13.818.401.680	Jumlah Penyuluh yang Mengikuti Pelatihan dan Pembinaan	42 orang
01.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	2.998.203.950	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif pada KTH dan Izin Perhutanan Sosial	40 unit
01.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.087.399.000	2.951.796.050	Terlaksananya Permohonan HD, HKM, HTR, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan	35000 Ha
01.06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	810.000.000	0	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	13,98 %
01.06	28		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah	810.000.000	0	Tersedianya Laporan Pemberdayaan	14 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS	
01.06	28	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	340.000.000	0	DAS/SUB DAS yang dimonitoring	1 DAS/ SUB DAS
01.06	28	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	200.000.000	0	Tersedianya Laporan Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS	19 laporan
01.06	28	06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	270.000.000	0	Tersedianya Laporan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	19 laporan
02.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.498.511.500	0	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	82%
02.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	159.720.000	0	Terlaksananya Penyediaan Pengadministrasian	12 laporan
02.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	159.720.000	0	Terlaksananya Penyediaan Pengadministrasian	12 bulan
02.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	114.165.000	0	Meningkatnya Disiplin ASN dan Non ASN	12 laporan
02.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	114.165.000	0	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas ASN dan Non ASN beserta perlengkapannya	129 stel
02.01	06		Administrasi Umum Perangkat	174.717.700	0	Terlaksananya Pengadministrasi	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Daerah			an Umum	
						Perangkat Daerah	
02.01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.052.500	0	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan
02.01	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.784.000	0	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 bulan
02.01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.516.800	0	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan
02.01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.452.000	0	Tersedianya Barang Penjilidan, Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan
02.01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	1.920.000	0	Tersedianya Bahan Bacaan	12 bulan
02.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.992.400	0	Jumlah Kegiatan Koordinasi (Laporan)	5 laporan
02.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.120.000	0	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	1 unit
02.01	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	240.120.000	0	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	1 unit
02.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	678.315.800	0	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
02.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.508.000	0	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
						dan Listrik	
02.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	531.807.800	0	Tersedianya Jasa Tenaga Non ASN	169 orang
02.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.473.000	0	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	14 unit
02.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.363.000	0	Jumlah unit yang mendapatkan pajak perijinan	10 unit
02.01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.110.000	0	Jumlah Unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35 unit
02.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	163.199.900	4.448.800.000	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	4950000 M3 dan 7 Ton
02.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	163.199.900	0	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disahkan	1 dokumen
02.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	163.199.900	0	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	4 laporan
02.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	0	4.448.800.000	Terlaksananya Laporan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan	24 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
						Hutan Produksi	
02.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	1.399.550.000	Tersedianya Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	5 laporan
02.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	3.049.250.000	Terpeliharanya Kawasan TAHURA Provinsi Kalimantan Timur	5 laporan
02.04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	106.288.600	3.801.200.000	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	≤ 1,5%
02.04	24		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	106.288.600	3.801.200.000	Luas kawasan hutan TAHURA yang dikelola	64814 Ha
02.04	24	01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	0	3.801.200.000	Jumlah Laporan Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	24 laporan
02.04	24	02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	0	0	Jumlah Laporan Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	24 laporan
02.04	24	03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	106.288.600	0	Jumlah Laporan Kegiatan Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	6 laporan
02.04	24	05	Pemulihan Ekosistem atau	0	0	Jumlah Luasan Pemulihan	300 Ha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi			Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	
02.04	24	08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	0	0	Tersusunnya Laporan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi Kaltim	24 laporan
02.04	24	09	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi	0	0	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi Kaltim	4 laporan
02.04	26		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	0		Luas KBEP yang dikelola	972,21 Ha
02.04	26	04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	0		Jumlah Kegiatan Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	24 laporan
02.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	1.000.000.000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
02.27	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan	0	1.000.000.000	Terlaksananya Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan	24 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
02.27	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	0	Tersedianya Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Di Sekitar TAHURA Prov Kaltim	24 laporan
02.27	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	1.000.000.000	Tersusunnya Laporan Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	24 laporan
03.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.379.000.000	0	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	82 %
03.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	163.080.000	0	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan
03.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	163.080.000	0	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan
03.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000	0	Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 laporan
03.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15.000.000	0	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25 stell
03.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.705.421	0	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
03.01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	5.707.175	0	Tersedianya Komponen Instalasi	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Bangunan Kantor			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
03.01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.780.276	0	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan
03.01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.458.970	0	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan
03.01	06	07	Penyediaan Bahan/Material	1.785.000	0	Tersedianya Bahan dan Material	1 kegiatan
03.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	331.974.000	0	Terlaksananya Perjalanan Dinas	59 OT
03.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.966.511	0	Terlaksananya Pengadaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13 Unit
03.01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.966.511	0	Terlaksananya Pengadaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13 Unit
03.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	364.047.768	0	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
03.01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.075.000	0	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan
03.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.740.000	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan
03.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	246.232.768	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan
03.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	399.200.300	0	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang	33 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Daerah			Urusan Pemerintahan Daerah	
03.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.210.300	0	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Roda 2 dan Roda 4	30 unit
03.01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.540.000	0	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan
03.01	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000	0	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 kegiatan
03.01	09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	273.450.000	0	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 kegiatan
03.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	389.000.000	16.127.355.902	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	4950000 M3 dan 7 Ton
03.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	3.598.011.000	Tersedianya unit dan laporan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana operasional KPH	6 Unit
03.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	3.598.011.000	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan sarana Operasional KPH	6 laporan
03.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	765.670.000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disahkan	1 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)				
03.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	765.670.000	Luas Kawasan Hutan Yang dikelola	25 Ha
03.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	200.000.000	0	Terlaksananya Pengendalian Izin Usaha atau kerjasama pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	110790 Ha
03.03	17	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	200.000.000	0	Jumlah Laporan Izin Usaha atau kerjasama pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	10 unit manajemen
03.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	3.316.555.000	Terlaksananya rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	30 Ha
03.03	18	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	0	Rancangan Kegiatan Penanaman	50 Ha
03.03	18	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	3.316.555.000	Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Luas Hutan dan Lahan Kritis yang di Rehabilitasi	30 Ha
03.03	18	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	0	0	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	8 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
03.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	189.000.000	8.447.119.902	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	2 kasus
03.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	189.000.000	0	Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun	1,95 %
03.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	718.551.700	Jumlah laporan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	2 laporan/ kasus
03.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penang- gulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	7.728.568.202	Persentase Luas Kebakaran Menurun	0,25 %
03.03	23		Perbenihan Tanaman Hutan	0	0	Tersedianya Pengada dan Pegedar Benih atau Bibit yang Bersertifikasi	6 SK/ Sertifikat
03.03	23	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	0	0	Tersedianya SK Pengada dan Pegedar Benih atau Bibit, Sertifikasi Sumber Benih	6 SK/ Sertifikat
03.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	687.573.100	<i>Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)</i>	32000 Ha
03.27	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan	0	687.573.100	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan	9 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Masyarakat di Bidang Kehutanan			Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
03.27	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	219.336.100	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	3 unit
03.27	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	468.237.000	Jumlah usulan permohonan HD, HKm, HTR, dan Kemitraan kehutanan	6 izin
04.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.568.000.000	240.000.000	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	82%
04.01	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	240.000.000	Dokumen Perencanaan Renbis KPH	2 dokumen
04.01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	240.000.000	Dokumen Perencanaan Renbis KPH	2 dokumen
04.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	172.680.000	0	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan
04.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	172.680.000	0	Terlaksananya penyediaan pengadministrasi	12 bulan
04.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.800.000	0	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	12 laporan
04.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	53.800.000	0	Tersedianya Pakaian Dinas dan	79 stell

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Atribut Kelengkapannya			Kelengkapannya	
04.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.864.514	0	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
04.01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.399.600	0	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan
04.01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.336.264	0	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan
04.01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.400.000	0	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 bulan
04.01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.768.650	0	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	14127 lembar
04.01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	5.760.000	0	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	12 bulan
04.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.200.000	0	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 OP
04.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	195.600.000	0	Tersedianya Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit
04.01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	195.600.000	0	Tersedianya Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit
04.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600.404.486	0	12 bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
						Daerah	
04.01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000	0	Tersedianya penyediaan Jasa surat menyurat	550 lembar
04.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171.265.046	0	Tersedianya penyediaan Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan
04.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	418.639.440	0	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan
04.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.651.000	0	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32 Unit
04.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	232.501.000	0	Unit Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	32 Unit
04.01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.150.000	0	Jumlah unit yang dipelihara	11 Unit
04.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	272.400.000	7.277.500.000	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	4950000 M3 dan 7 Ton
04.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	884.380.000	Luas kawasan hutan yang dikelola	1 dokumen
04.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	884.380.000	Luas kawasan hutan yang dikelola	33500 Hektar

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
04.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	150.000.000	0	Dokumen rencana pengelolaan KPH	1 dokumen
04.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	150.000.000	0	Dokumen Pengelolaan Hutan	1 dokumen
04.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	2.972.100.000	Luas hektar pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	100 Ha
04.03	18	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	2.972.100.000	Tersedianya bibit untuk rehabilitasi di luar kawasan hutan/penghijauan di luar kawasan hutan	3000 Bibit
04.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	122.400.000	3.421.020.000	Tindak Pidana Kehutanan Yang Ditangani	3 kasus
04.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	122.400.000	0	Laporan pencegahan kawasan hutan	5 laporan
04.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	322.670.000	Jumlah koordinasi, jumlah patroli, jumlah sosialisasi	10 laporan
04.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	3.098.350.000	Kegiatan patroli PKHL, Pemadaman Langsung, Pembekalan/ Penyegaran/Bimtek PKHL, Pembentukan/	35 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
						Pembinaan MPA dan Penetapan Posko	
04.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	882.500.000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
04.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	882.500.000	Pendampingan Kelompok Tani Hutan	80,07 %
04.05	27	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	0	32.500.000	ASN yang melaksanakan Diklat	80,07 %
04.05	27		Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	0	Sosialisasi Pendampingan KTH	0 %
04.05	27		Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	850.000.000	Sosialisasi dan Pengembangan Perhutanan Sosial	80,07 %
05.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.656.000.000	0	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	82%
05.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	239.300.000	0	Terlaksananya administrasi perkantoran	12 laporan
05.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	239.300.000	0	Terlaksananya administrasi perkantoran	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			ASN				
05.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91.430.000	0	Terlaksananya tugas ASN	12 laporan
05.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	91.430.000	0	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	38 stell
05.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	513.796.068	0	Tersedianya penyediaan, peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan
05.01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	303.536.068	0	tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan
05.01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	0	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan
05.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.260.000	0	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	12 bulan
05.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	386.225.932	0	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 12 bulan	12 bulan
05.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.315.980	0	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan
05.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	309.909.952	0	jumlah honorarium PTT yang dibayarkan	12 bulan
05.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	425.248.000	0	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	10 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
						Daerah	
05.01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	28.600.000	0	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan	5 unit
05.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	246.648.000	0	Terpenuhinya Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional	5 unit
05.01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000	0	Terpeliharanya peralatan dan mesin	12 bulan
05.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	212.000.000	19.495.909.000	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	4950000 M3 dan 7 Ton
05.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	11.201.374.750	Terlaksananya Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	
05.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	11.201.374.750	Tersedianya Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	
05.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	0	0	Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1 dokumen
05.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	0	Tersedianya unit usaha Rencana bisnis KPH	1 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
05.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	106.000.000	0	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	21362 Ha
05.03	17	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	106.000.000	0	jumlah laporan kordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau krjasama pemanfaatan dikawasan hutan produksi	5 laporan
05.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	5.677.387.050	Luas rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha
05.03	18	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	0	Tersusunnya dokumen RTnRL	1 kegiatan
05.03	18	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	2.410.860.450	Luas Hutan Rakyat yang di tanam dan di pelihara	30 Ha
05.03	18	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	3.266.526.600	jumlah bibit untuk untuk rehabilitasi lahan yang dibuat	50000 bibit
05.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	106.000.000	2.617.147.200	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	2 kasus
05.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	106.000.000	0	Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	46 laporan
05.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	0	576.392.000	Laporan koordinasi, sinkronisasi dan	50 Ha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Perlindungan Hutan			pelaksanaan perlindungan hutan	
05.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	2.040.755.200	Laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	105 laporan
05.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	504.091.000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
05.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	504.091.000	Terlaksananya Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	8 laporan
05.05	27	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	0	230.004.000	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	10 kegiatan
05.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	0	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	8 KTH
05.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	274.087.000	Jumlah Laporan penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial	16 laporan
06.01			PROGRAM	1.696.000.000	0	Skor Kepuasan	82 %

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			<i>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</i>			<i>Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan</i>	
06.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	162.480.000	0	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan
06.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	162.480.000	0	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan
06.01	02		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.870.000	0	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	12 laporan
06.01	02	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	69.870.000	0	Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 kegiatan
06.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	232.588.982	0	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	12 bulan
06.01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.388.702	0	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan
06.01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.980.280	0	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan
06.01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.300.000	0	Tersedianya Barang Cetakan	100 buku dan 8500 lembar
06.01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	1.920.000	0	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
						Undangan	
06.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	0	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan
06.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.272.000	0	Terlaksananya Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	15 unit
06.01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	190.272.000	0	Jumlah Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	15 unit
06.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	597.763.518	0	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
06.01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.200.000	0	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 bulan
06.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.505.150	0	Terlaksananya Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan
06.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	499.058.368	0	Tersedianya Jasa pelayanan umum kantor	12 bulan
06.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.025.500	0	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	12 unit
06.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	197.627.700	0	Jumlah Unit penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 unit
06.01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32.398.800	0	Terpeliharanya Peralatan dan	20 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Lainnya			Mesin	
06.01	09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	212.999.000	0	Terlaksananya pemeliharaan bangunan penunjang gedung kantor	1 kegiatan
06.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	262.000.000	8.620.678.900	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	4950000 M3 dan 7 Ton
06.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	1.304.518.220	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 dokumen
06.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	1.304.518.220	Jumlah Unit Usaha produktif Kehutanan	6 unit
06.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	0	250.000.000	Dokumen RPH yang sudah disusun	1 dokumen
06.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	250.000.000	Tersusunnya Dokumen RPH	1 dokumen
06.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	128.000.000	1.317.680.121	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	137495 Ha
06.03	17	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin	128.000.000	0	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi	2 koordinasi

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi			Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	
06.03	17	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	1.317.680.121	0	Terlaksananya kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	1 kegiatan
06.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	2.148.286.100	Luas rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Hektar
06.03	18	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	0	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman	50 Ha
06.03	18	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	1.639.584.100	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	30 Ha
06.03	18	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	0	0	Terlaksananya Bangunan Konservasi Tanah dan Air	1 unit
06.03	18	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	508.702.000	Monitoring Penanaman BIbit	90 OT
06.03	18	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	0	0	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RHL	60 OT
06.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	134.000.000	1.682.087.500	Terlaksananya Kegiatan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2 kasus
06.03	19	01	Pencegahan dan Pembatasan	134.000.000	0	Terlaksananya Pencegahan dan	2 kegiatan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Kerusakan Hutan			Pembatasan Kerusakan Hutan	
06.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	399.350.700	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 kegiatan, 100 OT Koordinasi dan 200 OT Patroli Pengamana n dan Perlindung an Hutan
06.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	1.282.736.800	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0,25 %
06.03	20		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	0	1.918.106.959	Terlaksananya Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	2 Unit
06.03	20	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	0	1.370.632.559	Terlaksananya Pengolahan Bahan Baku HHBK Hayati	1 unit
06.03	20	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	0	547.474.400	Terlaksananya pembudidayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya	1 unit
06.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	629.321.100	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
06.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan	0	629.321.100	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan	10 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
06.05	27	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	0	77.040.000	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan kompetensi penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	2 kegiatan
06.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	370.579.300	Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha	300 peserta
06.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	181.701.800	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	10 KTH
07.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.303.000.000	0	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	82 %
07.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	221.730.180	0	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan
07.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	221.730.180	0	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	85 %
07.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	111.400.000	0	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	12 laporan
07.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	81.400.000	0	Tersedianya pakaian dinas	100 stell

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Atribut Kelengkapannya			beserta atribut kelengkapannya	
07.01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	0	Tersedianya orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Bimtek / Diklat berkontribusi	3 orang
07.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	261.119.520	0	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	12 bulan
07.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	261.119.520	0	Terlaksananya Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	12 bulan
07.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.000.000	0	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	8 unit
07.01	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.000.000	0	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasaranan	9 unit
07.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.365.344	0	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
07.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.600.000	0	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 bulan
07.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	343.765.344	0	Tersedianya Honor Pegawai Non PNS Tenaga Tekhnis / Non Tekhnis	12 bulan
07.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	208.384.956	0	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik	3 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Urusan Pemerintahan Daerah			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
07.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.190.300	0	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	3 unit
07.01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.760.000	0	Terpeliharanya kendaraan operasional	12 bulan
07.01	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	101.434.656	0	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 bulan
07.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	465.000.000	14.098.000.000	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	4950000 M3 dan 7 Ton
07.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	757.112.500	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2 dokumen
07.03	15	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	200.000.000	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi penyusunan dan/atau penguatan RPHJP dan RPHJPd	2 dokumen
07.03	15	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	0	Luas blok pengelolaan	267068 Hektar
07.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	0	557.112.500	Jumlah unit pengadaan barang	10 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Operasionalisasi KPH				
07.03	15	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	0	0	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	6 laporan
07.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	400.000.000	0	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	267068 Hektar
07.03	17	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	110.000.000	0	Jumlah data/Laporan	3 laporan
07.03	17	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	110.000.000	0	Jumlah Laporan Kegiatan	3 laporan
07.03	17	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	70.000.000	0	Jumlah laporan koordinasi	4 laporan
07.03	17	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	110.000.000	0	Tersedianya areal pemanfaatan hutan	15 Hektar
07.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	4.183.937.500	Luas rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	125 Hektar
07.03	18	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	0	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman	70 Hektar
07.03	18	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar	0	1.300.000.000	Terlaksananya luas penanaman	75 Hektar

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Kawasan Hutan Negara				
07.03	18	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	0	300.000.000	Terlaksananya luas penanaman	125 Hektar
07.03	06		Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	2.583.937.500	Jumlah bibit	8000 bibit
07.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	65.000.000	9.156.950.000	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	2 kasus
07.03	19	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	0	0	Tersusunnya laporan kegiatan	12 laporan
07.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	65.000.000	0	jumlah laporan Pencegahan	3 laporan
07.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	1.225.592.000	Tersusunnya laporan koordinasi	12 laporan
07.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	7.931.358.000	Tersediannya Pengadaan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan	10 posko
07.03	23		Perbenihan Tanaman Hutan	0	0	Jumlah SK Pengada dan Penedar Benih/Bibit terdaftar; Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	12 SK/ Sertifikat
07.03	23	05	Pengawasan Peredaran Benih	0	0	jumlah laporan pengawasan	20 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			dan/atau Bibit				
07.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	1.602.000.000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
07.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	1.602.000.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	8 laporan
07.05	27	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	0	202.000.000	Terlaksannya kegiatan Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM	4 laporan
07.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	400.000.000	Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha	120 peserta
07.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	1.000.000.000	Tersusunnya Laporan Kegiatan	4 laporan
09.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.479.000.000	0	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	82 %
09.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	246.080.000	0	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan
09.01	02	02	Penyediaan	246.080.000	0	Tersedianya	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			administrasi pelaksanaan tugas ASN	
09.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.740.500	0	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	12 laporan
09.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42.740.500	0	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	76 stell
09.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	374.369.198	0	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
09.01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.080.271	0	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	12 bulan
09.01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.688.927	0	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan
09.01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.600.000	0	Tersedianya jumlah barang cetak dan penggandaan	12 bulan
09.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	318.000.000	0	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan
09.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.550.000	0	Unit Kerja yang memiliki kinerja pelayanan kinerja tepat waktu	12 unit
09.01	07	05	Pengadaan Mebel	23.400.000	0	Tersedianya Mebel	3 unit
09.01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.150.000	0	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	9 unit
09.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	325.195.302	0	Tingkat kepuasan terhadap	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Pemerintahan Daerah			pelayanan UPTD	
09.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.575.862	0	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi (internet), Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan
09.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.619.440	0	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan
09.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	362.065.000	0	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	33 unit
09.01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	38.200.000	0	Terlaksananya Jasa Biaya Pajak dan Kir	40 unit
09.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	323.865.000	0	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan Kendaraan	33 unit
09.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	280.000.000	23.237.080.000	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	4950000 M3 dan 7 Ton
09.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	10.000.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 dokumen
09.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi	0	10.000.000.000	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	137 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			KPH			Operasionalisasi KPH	
09.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	170.000.000	0	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	1000 Ha
09.03	17	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	170.000.000	0	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	4 laporan
09.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	8.494.275.000	Luasan Kawasan yang direhabilitasi	500 Ha
09.03	18	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	0	Terlaksananya Penyusunan RTnRL	2 dokumen
09.03	18	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	2.228.159.000	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	600 Hektar
09.03	18	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	6.266.116.000	Jumlah Bibit Untuk Rehabilitasi Lahan yang Dibuat	8324 bibit
09.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	110.000.000	4.742.805.000	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	2 kasus
09.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	110.000.000	0	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	8 laporan
09.19	04		Koordinasi, Sinkronisasi dan	0	420.950.000	Jumlah Laporan Koordinasi,	8 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Pelaksanaan Perlindungan Hutan			Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	
09.19	05		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penang- gulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	4.321.855.000	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penan- ggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1 laporan
09.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	2.662.920.000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
09.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	2.662.920.000	Tingkat Keterampilan dan Pengetahuan SDM penyuluh	8 laporan
09.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	2.428.570.000	Jumlah Laporan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	4 laporan
09.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	234.350.000	Jumlah Laporan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	4 laporan
10.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.368.000.000	0	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	82 %

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
10.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	177.480.000	0	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan
10.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	177.480.000	0	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan
10.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	125.750.000	0	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	12 laporan
10.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33.950.000	0	Terlaksananya Pengadaan Atribut Pakaian Dinas	55 stell
10.01	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	37.800.000	0	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar Daerah	9 laporan
10.01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16.800.000	0	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	1 laporan
10.01	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	20.400.000	0	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	2 kegiatan
10.01	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	16.800.000	0	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	1 laporan
10.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	358.200.000	0	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
10.01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.000.000	0	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target
						Perlengkapan Kantor UPTD KPHP Batu Ayau
10.01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.000.000	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD KPHP Batu Ayau 12 bulan
10.01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	6.000.000	0	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Peraturan Perundang Undangan 12 bulan
10.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.200.000	0	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 15 laporan
10.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.878.468	0	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10 unit
10.01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.878.468	0	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10 unit
10.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396.691.532	0	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 bulan
10.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.260.028	0	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHP Batu Ayau 12 bulan
10.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	234.431.504	0	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
						Kantor UPTD KPHP Batu Ayau	
10.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.000.000	0	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 unit
10.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	190.000.000	0	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Sarana Prasarana UPTD KPHP Batu Ayau	12 bulan
10.01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	0	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya UPTD KPHP Batu Ayau	5 unit
10.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	200.000.000	8.489.626.600	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	4950000 M3 dan 7 Ton
10.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	3.997.632.300	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 dokumen
10.03	15	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	358.421.000	Terlaksananya Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan dalam RPHJP dan RPHJPd KPH	1 dokumen
10.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	3.639.211.300	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Operasionalisasi	102 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
						KPHP Batu Ayau dalam Pembangunan Gedung dan Sapras KPH	
10.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	0	0	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disahkan	4 dokumen
10.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	0	Jumlah dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan	4 dokumen
10.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	200.000.000	0	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	69911 Ha
10.03	17	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	0	0	Jumlah laporan penyediaan data dan informasi wilayah usaha dikawasan hutan produksi	10 laporan
10.03	17	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	0	0	Jumlah laporan penyediaan data dan informasi wilayah usaha dikawasan hutan lindung	10 laporan
10.03	17	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan	200.000.000	0	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di	7 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Produksi			kawasan hutan produksi	
10.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	291.506.000	Luas rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Hektar
10.03	18	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	0	Jumlah dokumen rencana tahunan rehabilitasi hutan dan lahan (RTnRHL)	1 dokumen
10.03	18	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	291.506.000	Luas pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara	50 Ha
10.03	18	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	0	0	Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	4 laporan
10.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	0	4.200.488.300	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	2 kasus
10.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	792.712.000	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan	24 laporan
10.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	3.407.776.300	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	24 laporan
10.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN	200.000.000	1.010.373.400	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			<i>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</i>				
10.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	200.000.000	1.010.373.400	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	30 laporan
10.05	27	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	0	0	Terciptanya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan Lainnya	10 laporan
10.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	200.000.000	389.483.600	Terlaksananya Kelompok Tani yang dilakukan Pendampingan dan Penguatan	10 KTH
10.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	620.889.800	Terlaksananya Laporan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	10 laporan
11.01			<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</i>	1.448.000.000	0	<i>Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan</i>	82%
11.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	148.080.000	0	Terlaksananya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 laporan
11.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	148.080.000	0	Terlaksananya penyediaan administrasi	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			ASN			pelaksanaan tugas ASN	
11.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	119.500.000	0	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 laporan
11.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56.500.000	0	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	34 set
11.01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	63.000.000	0	Tersedianya Pegawai yang Memiliki Kompetensi	15 OP
11.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.832.000	0	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
11.01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	0	Tersedianya penyediaan komponen listrik/penerangan kantor	10 Jenis
11.01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	0	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	32 Jenis
11.01	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.475.000	0	Tersedianya penyediaan peralatan rumah tangga	45 Jenis
11.01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.032.000	0	Tersedianya makanan dan minuman rapat	1668 kotak
11.01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.925.000	0	Tersedianya barang cetak	4 Jenis
11.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.400.000	0	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	52 OT
11.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	320.546.000	0	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik	19 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Pemerintah Daerah			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
11.01	07	05	Pengadaan Mebel	72.285.000	0	Terlaksananya Pengadaan Mebel	23 unit
11.01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	248.261.000	0	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22 unit
11.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.926.700	0	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
11.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	0	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan
11.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	294.926.700	0	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan
11.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.115.300	0	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 unit
11.01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	10.685.300	0	Tersedianya pemeliharaan, jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan jenis jabatan	3 jenis
11.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.270.000	0	Tersedianya pemeliharaan, jasa pemeliharaan dan kendaraan dinas operasional atau lapangan	9 unit
11.01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.560.000	0	Tersedianya pemeliharaan	24 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Lainnya			peralatan dan mesin lainnya	
11.01	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.600.000	0	Tersedianya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit
11.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	320.000.000	8.921.960.000	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	4950000 M3 dan 7 Ton
11.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	5.850.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 dokumen
11.03	15	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	700.000.000	Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	1 dokumen
11.03	15	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	0	Tersusunnya Laporan Kegiatan tata batas blok/petak pengelola KPH	2 laporan
11.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	5.150.000.000	Tersedianya unit sarana prasarana oprasional KPH, tersedianya operasional KPH	10 unit
11.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	0	0	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disahkan	3 dokumen
11.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	0	Dokumen rencana pengelolaan KPH	3 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
11.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	200.000.000	565.000.000	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	25 Ha
11.03	17	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	0	0	Jumlah Data dan Informasi Wilayah Usaha KPH	5 laporan
11.03	17	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	200.000.000	565.000.000	Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan	3 laporan
11.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	530.098.000	Luas rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	10 Hektar
11.03	18	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	0	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan	1 dokumen
11.03	18	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	530.098.000	Jumlah Ha yang akan dicapai	10 Ha
11.03	18	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	0	0	Laporan Pengawasan Pengembangan RL	3 laporan
11.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	120.000.000	1.976.862.000	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	5 kasus
11.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	120.000.000	0	Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	2 laporan
11.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	267.530.000	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan	10 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
						Hutan	
11.19	05		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	1.709.332.000	Hasil Laporan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	10 laporan
11.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	578.040.000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
11.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	578.040.000	Terlaksananya Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	6 laporan
11.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	229.190.000	KTH yang mengikuti proses penguatan dan pendampingan kelembagaan	3 KTH
11.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	348.850.000	Laporan Kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial	6 laporan
12.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.733.000.000	0	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	82 %
12.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	246.439.003	0	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
12.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	246.439.003	0	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan
12.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87.860.000	0	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 laporan
12.01	02	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	87.860.000	0	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya	148 stell
12.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	331.169.048	0	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
12.01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.995.648	0	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan
12.01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165.497.000	0	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 unit
12.01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	0	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan
12.01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.276.400	0	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan
12.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.400.000	0	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan
12.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.900.000	0	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	11 unit
12.01	07	05	Pengadaan Mebel	38.900.000	0	Jumlah Pengadaan Mebel	11 unit
12.01	08		Penyediaan Jasa	824.749.149	0	Jumlah bulan	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	
12.08	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.046.601	0	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan
12.08	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	668.702.548	0	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	17 orang
12.09	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.882.800	0	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
12.09	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.432.800	0	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan
12.09	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.450.000	0	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan
12.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	250.000.000	11.300.000.000	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	4950000 M3 dan 7 Ton
12.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	4.043.730.000	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 dokumen
12.03	15	03	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan	0	760.580.000	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi	137 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Pengelolaan Hutan			KPH	
12.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	3.283.150.000	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	2 dokumen
12.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	0	100.800.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 dokumen
12.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	100.800.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	2 dokumen
12.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	150.000.000	338.620.000	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	272566 Hektar
12.03	17	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	150.000.000	0	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan hutan Produksi	15 laporan
12.03	17	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	0	221.400.000	Terlaksananya Kegiatan Pemanfaatan Hutan di KPH	1 kegiatan
12.03	17	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa	0	117.220.000	Terlaksananya Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu	3 kegiatan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Lingkungan			dan/atau Jasa Lingkungan	
12.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	2.070.760.000	Terlaksananya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	100 hektar
12.03	18	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	0	Tersusunnya Dokumen RTnRL	1 dokumen
12.03	18	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	0	Terlaksananya Pembangunan Luas Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	100 hektar
12.03	18	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	1.220.760.000	Terlaksananya pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	1500 bibit
12.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	100.000.000	4.166.850.000	Terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2 kasus
12.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	0	0	Terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	27 laporan
12.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	100.000.000	600.000.000	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	5 laporan
12.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	3.566.850.000	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	69 lpaoran

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
12.03	20		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	0	579.240.000	Jumlah Unit Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	2 unit
12.03	20	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	0	579.240.000	Terlaksananya Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	2 unit
12.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	1.000.000.000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
12.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	1.000.000.000	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2 laporan
12.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	500.000.000	Terlaksananya ekonomi produktif pada KTH/KUPS	2 KTH
12.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	500.000.000	Terlaksananya Unit Usaha Kelompok PS	3 kegiatan
13.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.382.000.000	214.000.000	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	82 %

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
13.01	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	214.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen
13.01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	214.000.000	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen
13.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	126.720.000	0	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan
13.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	126.720.000	0	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 OB
13.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	161.511.000	0	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 laporan
13.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	59.610.000	0	Tersediannya Pakaian Dinas dan Kelengkapannya untuk ASN	47 stell
13.01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	101.901.000	0	Terlaksananya ASN yang mengikuti dan Pelatihan	4 OK
13.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	403.230.000	0	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
13.01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.910.000	0	Terlaksananya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32 buah
13.01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.000.000	0	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	41 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
						Kantor	
13.01	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.500.000	0	Tersediannya Peralatan Rumah Tangga	58 buah
13.01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.400.000	0	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1645 buah
13.01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.740.000	0	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	5967 lembar
13.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275.680.000	0	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 OT
13.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	153.472.200	0	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 unit
13.01	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	153.472.200	0	Tersedianya unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit
13.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	347.066.800	0	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
13.01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	0	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	12 bulan
13.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.411.500	0	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perkantoran	12 bulan
13.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	276.655.300	0	Terselenggaranya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
13.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.000.000	0	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
13.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	190.000.000	0	Terselenggaranya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan
13.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	386.000.000	6.703.780.000	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	4950000 M3 dan 7 Ton
13.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	2.184.000.000	Terlaksananya Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1 dokumen
13.03	15	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	545.000.000	Terlaksanya Dokumen RPH yang disusun	1 dokumen
13.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	1.639.000.000	Luas Kawasan Hutan yang di kelola	25 Ha
13.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	204.000.000	0	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	301650 hektar
13.03	17	08	Pelaksanaan	204.000.000	0	Jumlah	6 ijin

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Pemanfaatan Hutan di KPH			Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan oleh Unit Manajemen pemegang ijin di wilayah kphp	
13.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	1.350.000.000	Terlaksananya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	50 hektar
13.03	18	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	1.200.000.000	Terlaksananya Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	50 hektar
13.03	18	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	0	150.000.000	Terlaksananya Penghijauan Lingkungan yang ditanam	10 hektar
13.03	18	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	0	Jumlah Bibit	2000 bibit
13.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	182.000.000	3.169.780.000	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	2 kasus
13.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	0	0	Tersusunnya laporan Koordinasi, Sosialisasi dan Patroli Pengamanan Hutan	24 laporan
13.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	182.000.000	440.000.000	Terlaksana Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 laporan
13.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	2.729.780.000	Persentase Luas Kebakaran Hutan	0,25 %

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
13.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	775.220.000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
13.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	775.220.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	6 laporan
13.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	203.220.000	Jumlah Pendampingan KTH	2 KTH
13.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	572.000.000	Jumlah Pendampingan, Fasilitasi PS dan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	4 ijin
14.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.450.000.000	0	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	82 %
14.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	206.335.000	0	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan
14.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	206.335.000	0	Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan
14.01	05		Administrasi	96.150.000	0	Terlaksananya	12 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Kepegawaian Perangkat Daerah			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
14.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26.550.000	0	Tersedianya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	36 stell
14.01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	69.600.000	0	Terlaksananya Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 OT
14.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	221.237.200	0	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
14.01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.237.200	0	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan
14.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	198.000.000	0	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan
14.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	477.911.672	0	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	18 unit
14.01	07	05	Pengadaan Mebel	25.500.000	0	Jumlah Pengadaan Mebel	5 unit
14.01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	240.304.372	0	Jumlah Unit Pengadaan peralatan dan mesin	12 unit
14.01	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	212.107.300	0	Jumlah Unit Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit
14.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340.366.128	0	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
						Daerah	
14.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.808.000	0	Terlaksananya Pelaksanaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan
14.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	251.558.128	0	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan
14.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.000.000	0	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 unit
14.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.000.000	0	Terlaksananya Pemeliharaan barang dan kendaraan milik daerah	12 bulan
14.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	318.000.000	4.937.920.000	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	4950000 M3 dan 7 Ton
14.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	0	1.334.805.000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disahkan	1 dokumen
14.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	1.334.805.000	Luasan Kawasan Hutan yang di kelola	25 Hektar
14.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	166.000.000	0	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi	301650 hektar

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
						dan hutan lindung yang dapat dikelola	
14.03	17	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	166.000.000	0	Jumlah Pembinaan atau Pemantauan Unit Manajemen Pemegang Ijin dalam Kawasan KPHP	3 unit manajemen
14.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	657.580.000	Luas rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	15 Hektar
14.03	18	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	0	Rancangan kegiatan penanaman	50 Hektar
14.03	18	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	559.840.000	luas hutan dan lahan kritis yang di rehabilitasi	15 Hektar
14.03	18	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	0	97.740.000	Luasan hutan dan lahan kritis yang di rehabilitasi	15 Hektar
14.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	152.000.000	2.680.155.000	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	1 kasus
14.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	152.000.000	0	Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	8 laporan
14.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	614.185.000	jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	1 kasus
14.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	0	2.065.970.000	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0,25 %

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				
14.03	23		Perbenihan Tanaman Hutan	0	265.380.000	Jumlah SK Pengada dan Pongedar Benih/Bibit terdaftar; Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	1 SK/ Sertifikat
14.03	23	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	0	265.380.000	jumlah bibit	4000 bibit
14.05			<i>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</i>	0	562.080.000	<i>Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)</i>	32000 Ha
14.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	562.080.000	Terlaksananya Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	4 laporan
14.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	240.320.000	Usaha ekonomi produktif KTH	1 unit
14.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	321.760.000	Izin penyiapan dan pengembangan usaha perhutanan sosial	3 izin
15.01			<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</i>	1.334.000.000	0	<i>Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan</i>	82 %

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			DAERAH PROVINSI				
15.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	163.246.000	0	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan
15.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	163.246.000	0	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan
15.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.835.000	0	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 laporan
15.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	27.835.000	0	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31 stell
15.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.000.000	0	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
15.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	0	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44 OT
15.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	439.939.000	0	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	65 unit
15.01	07	05	Pengadaan Mebel	75.912.000	0	Jumlah Unit Pengadaan Mebel	30 unit
15.01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	264.027.000	0	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35 unit
15.01	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	0	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	1 kegiatan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
						Lainnya	
15.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335.928.000	0	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
15.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.100.000	0	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan
15.01	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.630.000	0	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33 unit
15.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	242.198.000	0	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan
15.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.052.000	0	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 unit
15.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	167.052.000	0	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 unit
15.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	434.000.000	7.311.334.500	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	4950000 M3 dan 7 Ton
15.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	0	2.408.184.700	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disahkan	2 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Kewenangan Provinsi				
15.03	15	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	89.600.000	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RPHJP dan RPHJPD	2 dokumen
15.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	2.318.584.700	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH	12 bulan
15.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	234.000.000	0	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	151828,16 Hektar
15.03	17	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	234.000.000	0	Terlaksananya pembinaan/ pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP	6 unit manajemen
15.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	368.688.000	Terlaksananya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	8000 batang
15.03	18	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	368.688.000	Terlaksananya Pengadaan Bibit	8000 batang
15.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	200.000.000	4.534.461.800	Terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 kasus
15.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	200.000.000	0	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Dan Pembatasan Kerusakan	8 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
						Kawasan Hutan	
15.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	1.463.150.000	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 kasus
15.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	3.071.311.800	Persentase Luas Kebakaran Hutan	0,25 %
15.03	23		Perbenihan Tanaman Hutan	0	0	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih/Bibit terdaftar; Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	1 SK/ Sertifikat
15.03	23	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	0	0	Jumlah Pesemaian yang di buat	1 unit
15.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	1.656.665.500	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
15.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	1.656.665.500	Terlaksananya Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	5 laporan
15.05	27	02	Penguatan dan	0	1.084.174.500	Jumlah Usaha	2 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Ekonomi Produktif Pada KTH	usaha
15.27	03		Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	572.491.000	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	3 usulan izin
16.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.368.000.000	0	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	82 %
16.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	114.600.000	0	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan
16.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	114.600.000	0	Terselenggaranya administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan
16.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.640.000	0	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 laporan
16.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	47.440.000	0	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	54 stell
16.01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52.200.000	0	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9 orang
16.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	297.583.412	0	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
16.01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.294.000	0	Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan kantor	12 bulan
16.01	06	02	Penyediaan Peralatan dan	37.652.912	0	Tersedianya peralatan dan	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Perlengkapan Kantor			kelengkapan sarana prasarana	
16.01	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.456.500	0	Tersedianya kelengkapan peralatan rumah tangga	12 bulan
16.01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.480.000	0	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan
16.01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.700.000	0	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan
16.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.000.000	0	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 kali
16.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	365.700.000	0	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73 unit
16.01	07	05	Pengadaan Mebel	84.400.000	0	Tersedianya pengadaan mebel	42 unit
16.01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	281.300.000	0	Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	31 unit
16.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361.498.088	0	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
16.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.400.000	0	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 bulan
16.01	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.325.000	0	Tersedianya jasa peralatan dan kelengkapan kantor	10 unit
16.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	242.773.088	0	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
16.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.978.500	0	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11 unit
16.01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	1.500.000	0	Terselenggaranya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	1 unit
16.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.150.000	0	Terselenggaranya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas lapangan	10 unit
16.01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	119.328.500	0	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas	11 unit
16.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	400.000.000	8.361.980.600	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	4950000 M3 dan 7 Ton
16.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	1.949.856.490	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 dokumen
16.03	03	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	1.949.856.490	Terselenggaranya luasan hutan yang dikelola	240603,63 hektar
16.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	200.000.000	0	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disahkan	1 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Konservasi (KPHK)				
16.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	200.000.000	0	Tersedianya laporan pengelolaan rencana KPH	2 laporan
16.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	0	Terlaksananya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	100 hektar
16.03	16	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	0	0	Terselenggaranya luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	100 hektar
16.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	200.000.000	6.412.124.110	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	1 kasus
16.03	19	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	0	0	persentasi luas kebakaran menurun	0,25 %
16.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	200.000.000	399.815.000	jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	2 laporan
16.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	6.012.309.110	persentasi luas kebakaran menurun	0,25 %
16.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	637.269.400	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
16.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	637.269.400	Terlaksananya Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	7 laporan
16.05	02		Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	283.086.400	Terselenggaranya usaha ekonomi produktif pada KTH	5 unit usaha
16.05	03		Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	354.183.000	Terselenggaranya usulan izin perhutanan sosial	2 usulan izin
16.06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	0	493.750.000	<i>Luas kawasan yang direhabilitasi</i>	50 Ha
16.06	28		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0	493.750.000	Terlaksananya Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50 Ha
16.06	28	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	0	493.750.000	Terselenggaranya rehabilitasi hutan	50 Ha
17.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.368.000.000	0	<i>Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan</i>	82 %
17.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	348.000.000	0	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan
17.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	348.000.000	0	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			ASN			ASN	
17.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	176.852.000	0	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	12 laporan
17.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.916.000	0	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25 stell
17.01	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	153.936.000	0	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	17 laporan
17.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	192.260.000	0	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
17.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.260.000	0	jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
17.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	153.400.000	0	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 unit
17.01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	153.400.000	0	Tercapainya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 unit
17.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396.238.000	0	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
17.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.907.312	0	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan
17.01	08	04	Penyediaan Jasa	316.330.688	0	Terselenggaranya	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Pelayanan Umum Kantor			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
17.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.250.000	0	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 unit
17.01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	31.150.000	0	Tercapainya Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 unit
17.01	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.100.000	0	Tercapainya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	1 unit
17.01	09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	0	Tercapainya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit
17.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	400.000.000	7.690.000.000	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	4950000 M3 dan 7 Ton
17.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	1.191.600.000	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 dokumen
17.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	0	1.191.600.000	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan	1 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Operasionalisasi KPH			Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	
17.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	200.000.000	0	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	1 hektar
17.03	17	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	200.000.000	0	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	15 laporan
17.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	0	Luas rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Hektar
17.03	18	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	0	Tercapainya Jumlah Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	1 laporan
17.03	18	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	0	0	Jumlah Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	1 laporan
17.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	200.000.000	6.498.400.000	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	3 kasus
17.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	200.000.000	0	Tercapainya Jumlah Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	16 laporan
17.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	383.430.000	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan	15 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
						Hutan	
17.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	6.114.970.000	Tercapainya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	40 laporan
17.03	23		Perbenihan Tanaman Hutan	0	0	Jumlah SK Pengada dan Penedar Benih/Bibit terdaftar	5 SK
17.03	23	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	0	0	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	4 laporan
17.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	560.000.000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
17.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	560.000.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	5 laporan
17.05	27	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	0	0	Tercapainya jumlah Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi penyuluh Kehutan dan SDM Bidang Kehutanan	11 laporan
17.05	27	02	Penguatan dan	0	205.695.000	Jumlah Usaha	4 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Ekonomi Produktif pada KTH dan Izin Perhutanan Sosial	
17.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	354.305.000	Terpenuhi Tersusunnya Laporan PS dan PUPS	4 laporan
18.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.718.000.000	0	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	82 %
18.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	160.800.000	0	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan
18.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	160.800.000	0	Terlaksananya administrasi perkantoran	12 bulan
18.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.140.843	0	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 laporan
18.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80.140.843	0	Tersedianya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	90 stell
18.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.820.000	0	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
18.01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	0	Tersedianya alat listrik dan elektronik	12 bulan
18.01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.720.000	0	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan
18.01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.100.000	0	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan
18.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	150.000.000	0	Meningkatnya Kapasitas	23 OT

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			dan Konsultasi SKPD			Kelembagaan Pemerintah Daerah	
18.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.075.000	0	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35 unit
18.01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	189.075.000	0	Tersedianya peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	19 unit
18.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	883.824.157	0	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
18.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.763.517	0	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan
18.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	786.060.640	0	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan
18.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.340.000	0	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 unit
18.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.980.000	0	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan
18.01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	154.960.000	0	Tersedianya peralatan dan	8 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Lainnya			Kelengkapan Sarana dan Prasarana	
18.01	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.400.000	0	Jumlah unit bangunan yang dipelihara	2 unit
18.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	150.000.000	8.500.000.000	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	4950000 M3 dan 7 Ton
18.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	2.171.610.000	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 dokumen
18.03	15	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	150.000.000	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 dokumen
18.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	2.021.610.000	jumlah sarana prasarana operasional KPH	10 unit
18.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	0	150.000.000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disahkan	2 dokumen
18.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	150.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	2 dokumen
18.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan	150.000.000	0	Luas Areal Pemanfaatan	37578 hektar

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Hutan Produksi dan Hutan Lindung			Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	
18.03	17	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	150.000.000	0	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	3 laporan
18.03	17	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	0	0	Jumlah Ijin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi Yang di Kendalikan	20 Ha
18.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	1.699.840.000	Luas rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha
18.03	18	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	0	Tersedianya Dokumen RTnRL yang disusun	1 dokumen
18.03	18	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	1.022.840.000	Luasan Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	25 Ha
18.03	18	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	677.000.000	Jumlah Bibit Untuk Rehabilitasi Lahan Yang Dibuat	50000 bibit
18.03	18	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	0	0	Tersedianya laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	10 laporan
18.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan	0	4.478.550.000	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang	2 kasus

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Produksi			Ditangani	
18.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	0	0	Tersedianya Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan, Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (Kasus)	2 kasus
18.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	354.000.000	Tersedianya Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	18 laporan
18.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	4.124.550.000	Tersedianya Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	85 laporan
18.04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	100.000.000	0	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	<1,5%
18.04	26		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	100.000.000	0	Jumlah Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Yang di Kelola	1 hektar
18.04	26	04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	100.000.000	0	Jumlah Dokumen Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan	2 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
						Basah	
18.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	1.650.000.000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat	32000 Ha
18.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	1.650.000.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	5 laporan
18.05	27	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	0	125.000.000	Meningkatnya Kapasitas Penyuluh Kehutanan / SDM Kehutanan	1 kegiatan
18.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	1.155.000.000	Meningkatnya jumlah ekonomi produktif pada KTH/KUPS	6 KUPS/ KTH
18.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	370.000.000	Jumlah Usulan Izin Perhutanan Sosial	3 usulan
19.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.468.000.000	208.800.000	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	82 %
19.01	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	208.800.000	Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	1 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
						Perangkat Daerah	
19.01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	208.800.000	Tersedianya Dokumen Perencanaan	1 dokumen
19.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	179.880.000	0	Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 laporan
19.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	179.880.000	0	Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 bulan
19.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.300.000	0	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 laporan
19.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28.300.000	0	Terpenuhinya Pakaian Dinas	46 stell
19.01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000	0	Jumlah Pegawai Mengikuti Pelatihan	5 orang
19.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	272.718.564	0	Terseleenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
19.01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.444.250	0	Tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor	12 bulan
19.01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.174.314	0	Tersedianya Peralatan Kantor dan perlengkapan kantor	12 bulan
19.01	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	0	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 bulan
19.01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.800.000	0	Tersedianya Makanan dan Minuman	1600 porsi
19.01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan	28.300.000	0	Tersedianya Barang Cetak dan	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Pengandaan			Pengandaan	
19.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.000.000	0	Jumlah perjalanan Dinas Rapat, koordinasi, konsultasi, dll	32 OT
19.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.900.000	0	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	20 unit
19.01	07	05	Pengadaan Mebel	73.300.000	0	Tersedianya pengadaan mebel pada UPTD KPHP Damai	24 unit
19.01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.600.000	0	Tersedianya Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	13 unit
19.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.266.536	0	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
19.01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	0	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Selama 12 bulan	12 bulan
19.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.000.000	0	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan
19.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	366.266.536	0	Tersedianya Tenaga Non ASN Teknis dan Non Teknis	117 OB
19.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	370.934.900	0	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	37 unit
19.01	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	56.192.300	0	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	1 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Pajak Kendaraan Perorangan				
19.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	281.642.600	0	Terpenuhinya Biaya Perizinan kendaraan dinas / operasional	6 unit
19.01	09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.100.000	0	Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana Pendukung gedung dan bangunan lainnya (Halaman Kantor)	2500 M2
19.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	300.000.000	12.105.425.000	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	4950000 M3 dan 7 Ton
19.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	5.305.707.700	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 dokumen
19.03	15	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	435.000.000	Jumlah Dokumen Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 dokumen
19.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	4.870.707.700	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	246 unit
19.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	0	80.500.000	Terlaksananya Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan	3 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
						Hutan Konservasi (KPHK)	
19.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	80.500.000	Tersusunnya Dokumen RPHJP/Revisi	3 dokumen
19.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	150.000.000	187.800.000	Terlaksananya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	132792 hektar
19.03	17	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	150.000.000	0	Jumlah Laporan Identifikasi Potensi Pemanfaatan Kawasam hutan	5 laporan
19.03	17	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	0	187.800.000	Terlaksananya Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	1 kegiatan
19.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	1.986.754.400	Luas rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	30 Ha
19.03	18	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	1.986.754.400	Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi	30 Ha
19.03	18	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	0	0	Luas Penghijauan Lingkungan yang ditanam dan dipelihara	123,4 Ha
19.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	150.000.000	4.544.662.900	Terlaksananya Kegiatan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2 kasus
19.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan	150.000.000	0	Jumlah laporan pencegahan dan	10 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Kerusakan Kawasan Hutan			pembatasan kerusakan kawasan hutan	
19.03	04		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	544.000.000	Jumlah Lokasi Patroli Perlindungan (DBH DR)	10 lokasi
19.03	05		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	4.000.662.900	Jumlah Kegiatan Pemadaman (DBH DR)	10 kegiatan
19.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	885.775.000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
19.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	885.775.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	15 laporan
19.05	27	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	0	73.800.000	Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan SDM Penyuluh dan Perhutanan	2 kegiatan
19.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	587.475.000	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif pada KTH dan Izin Perhutanan Sosial	10 KPS
19.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	224.500.000	Jumlah Pengembangan Usaha PS	5 unit usaha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
20.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.518.000.000	0	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	82 %
20.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	179.880.000	0	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan
20.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	179.880.000	0	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan
20.01	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	33.600.000	0	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 laporan
20.01	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.600.000	0	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 laporan
20.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91.400.000	0	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 laporan
20.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.000.000	0	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	41 stell
20.01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	66.400.000	0	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	10 orang
20.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	264.952.452	0	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
20.01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	6.000.000	0	Tersedianya Komponen Instalasi	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Bangunan Kantor			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
20.01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.606.452	0	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan
20.01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.250.000	0	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1160 kotak
20.01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.096.000	0	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	768 lembar
20.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	0	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 OP
20.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	183.100.000	0	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	43 unit
20.01	07	05	Pengadaan Mebel	40.000.000	0	Tersedianya Pengadaan Mebel	28 unit
20.01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	143.100.000	0	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	18 unit
20.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575.084.048	0	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
20.01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	0	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 bulan
20.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.000.000	0	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan
20.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	494.084.048	0	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan
20.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	189.983.500	0	Terlaksananya Pemeliharaan	11 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Urusan Pemerintahan Daerah			Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
20.01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	39.983.500	0	Jumlah unit kendaraan jabatan yang dipelihara	1 unit
20.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.000.000	0	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	6 unit
20.01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	0	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	15 unit
20.01	09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	0	Jumlah bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	12 bulan
20.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	250.000.000	9.380.000.000	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	4950000 M3 dan 7 Ton
20.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	2.030.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 dokumen
20.03	15	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	150.000.000	Tersusunnya Dokumen Perencanaan oleh KPH	14 laporan
20.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana	0	1.880.000.000	Terlaksananya penyediaan dan	1 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Prasarana Operasionalisasi KPH			pemeliharaan sarana prasarana operasionalisasi KPH	
20.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	0	100.000.000	Terlaksananya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	4 dokumen
20.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	100.000.000	Tersedianya Unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)	4 dokumen
20.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	150.000.000	0	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	85751 hektar
20.03	17	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	150.000.000	0	Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Unit Manajemen	8 unit manajemen
20.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	1.000.000.000	Luas rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	20 Ha
20.03	18	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	1.000.000.000	Luas Pembangunan Hutan Rakyat	40 Ha
20.03	18	06	Pengembangan	0	0	Tersedianya Bibit	1285 bibit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan			untuk ditanam	
20.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	100.000.000	6.250.000.000	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	2 kasus
20.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	100.000.000	0	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pembatas Kerusakan Kawasan Hutan	4 laporan
20.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	350.000.000	Jumlah Patroli Pengamanan terpadu dengan TNI/POLRI/MMP	10 kegiatan
20.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	5.900.000.000	Tersedianya Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	10 kegiatan
20.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	620.000.000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
20.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	620.000.000	Terlaksananya Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	6 laporan
20.05	27	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi	0	0	Tersedianya Monev Kegiatan dan Sarpras	2 kegiatan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan			Penyuluh	
20.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	430.000.000	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif pada KTH dan Izin Perhutanan Sosial	2 KTH
20.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	190.000.000	Terlaksananya Permohonan HD, HKM, HTR, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan	3 usulan
21.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.468.000.000	0	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	82%
21.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	150.720.000	0	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan
21.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	150.720.000	0	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan
21.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.050.000	0	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 laporan
21.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	27.050.000	0	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	41 stell
21.01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	0	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	2 orang
21.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	272.415.393	0	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
21.01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.199.473	0	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan kantor	12 bulan
21.01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.574.970	0	Tersedianya Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 bulan
21.01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.440.950	0	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	14517 lembar
21.01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	1.920.000	0	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	12 bulan
21.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218.280.000	0	Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	12 bulan
21.01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.098.600	0	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	7 unit
21.01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.698.600	0	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 unit
21.01	07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	24.400.000	0	Jumlah Pengadaan Papan Nama Kantor dan Gorden	35 M2 Dan 1 unit
21.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	648.655.878	0	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
21.01	08	01	Penyediaan Jasa	6.000.000	0	Terlaksananya Jasa	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Surat Menyurat			Surat Menyurat	
21.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.349.622	0	Terlaksananya Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	12 bulan
21.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	581.306.256	0	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan
21.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.060.129	0	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	22 unit
21.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.683.800	0	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	20 unit
21.01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.470.000	0	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan
21.01	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	76.800.000	0	Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan
21.01	09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.106.329	0	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor	1 kegiatan
21.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	300.000.000	7.998.084.504	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	4950000 M3 dan 7 Ton
21.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	3.362.621.679	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			(KPH) Kewenangan Provinsi				
21.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	3.362.621.679	Tersedianya Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	19 unit
21.03	17		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	150.000.000	0	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	249,649 hektar
21.03	17	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	150.000.000	0	Tersedianya Dokumen Pemanfaatan Hutan di KPH	1 dokumen
21.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	1.638.359.092	Luas rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	64 Hektar
21.03	18	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	0	Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (DBH SDA DR)	128 Ha
21.03	18	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	1.408.439.222	Luas Hutan Rakyat yang Ditanam (DBH SDA DR)	64 Ha
21.03	18	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	229.919.870	Terlaksananya Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	96 Ha
21.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	150.000.000	2.997.103.733	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	3 kasus
21.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	150.000.000	0	Tersusunnya laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan	10 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
						Kawasan Hutan	
21.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	346.715.500	Terselenggaranya Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 laporan
21.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	2.650.388.233	Luas Areal Kebakaran Hutan yang Semakin Menurun (DBH SDA DR)	100 Ha
21.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	751.915.496	<i>Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)</i>	32000 Ha
21.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	751.915.496	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	10 laporan
21.05	27	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	0	165.840.000	Jumlah Fasilitasi Pembuatan Rencana Kerja/ Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial	3 KTH
21.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	325.955.496	Jumlah Kegiatan Penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial	5 KTH
21.05	27	03	Penyiapan dan	0	260.120.000	Jumlah Penyiapan	2 kegiatan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Pengembangan Perhutanan Sosial			dan Pengembangan Perhutanan Sosial (DBH SDA DR)	
22.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS	1.750.000.000	0	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	82 %
22.01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	167.760.000	0	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan
22.01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	167.760.000	0	Terselenggaranya administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan
22.01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.900.000	0	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 laporan
22.01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	79.900.000	0	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	53 stell
22.01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.420.000	0	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	12 bulan
22.01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.300.000	0	Tersedianya peralatan dan kelengkapan sarana prasarana	12 bulan
22.01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.850.400	0	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan
22.01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.291.600	0	Tersedianya barang cetak dan pengadaan	13350 lembar
22.01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.978.000	0	Terselenggaranya rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	28 OP
22.01	07		Pengadaan Barang	85.060.200	0	Tersedianya	12 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
22.01	07	05	Pengadaan Mebel	85.060.200	0	Tersedianya pengadaan mebel	25 unit
22.01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	841.474.788	0	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
22.01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.800.000	0	Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan
22.01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.256.132	0	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan
22.01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	643.418.656	0	Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan
22.01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.385.012	0	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 unit
22.01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	239.919.292	0	Terselenggaranya unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dina operasional atau lapangan	25 unit
22.03	09	06	Pemeliharaan	25.465.720	0	Terselenggaranya	20 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Peralatan dan Mesin Lainnya			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
22.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	200.000.000	14.299.734.500	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	4950000 M3 dan 7 Ton
22.03	15		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	10.833.109.650	Terlaksananya Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1 dokumen
22.03	15	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	101.600.000	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RPHJPD	1 dokumen
22.03	15	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	10.731.509.650	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH	12 bulan
22.03	16		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	100.000.000	0	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disahkan	1 dokumen
22.03	16	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	100.000.000	0	Tersedianya Laporan Pengelolaan Rencana KPH	3 laporan
22.03	18		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	2.733.731.050	Luas rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha
22.03	18	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	2.733.731.050	Terselenggaranya Luas Hutan dan Lahan Kritis yang	50 Ha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
						Direhabilitasi	
22.03	19		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	100.000.000	732.893.800	Terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2 kasus
22.03	19	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	100.000.000	0	Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	4 laporan
22.03	19	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	186.979.800	Jumlah bulan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	12 bulan
22.03	19	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	545.914.000	Jumlah Bulan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penangulangan Kebakaran Hutan & Lahan	12 bulan
22.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	200.265.500	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
22.05	27		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	200.265.500	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	24 laporan
22.05	27	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi	0	0	Jumlah Bulan Peningkatan	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran DBH (Rp)	Target	
			Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan			Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	
22.05	27	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	49.966.000	Jumlah Bulan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	12 bulan
22.05	27	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	150.299.500	Jumlah Bulan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	12 bulan

Dalam pencapaian target-target tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (keminimuman penggunaan dana) anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa dipantau melalui evaluasi berkala secara internal di Dinas dan evaluasi berkala melalui Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalog) dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD). Efektif diukur dengan tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2021 akan dijelaskan secara rinci pada Bab III.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (01)**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 172.387.395.500 pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 131.605.882.269 atau 76,34 %. Program ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi tidak ada pada tahun anggaran 2020.

- ***Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.942.800.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.297.634.740 atau 66,79 %. Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak ada pada tahun anggaran 2020.

- ❖ **Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.312.800.000 dan terealisasi sebesar Rp. 823.915.690 atau 62,76 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah tidak ada pada tahun anggaran 2020.

- ❖ **Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 630.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 473.719.050 atau 75,19 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak ada pada tahun anggaran 2020.

- ***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 138.092.309.183 dan terealisasi sebesar Rp. 102.920.472.501 atau 74,53%. Kegiatan ini tidak bisa

dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 133.717.579.000 dan terealisasi sebesar Rp. 99.440.329.524 atau 74,37 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.358.410.183 dan terealisasi sebesar Rp. 3.463.822.977 atau 79,47 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 16.320.000 dan terealisasi sebesar Rp. 16.320.000 atau 100 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tidak ada pada tahun anggaran 2020.

- ***Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 178.600.000 dan terealisasi sebesar Rp. 166.184.600 atau 93,05 %. Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 145.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 133.008.400 atau 91,73%. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 33.600.000 dan terealisasi sebesar Rp. 33.176.200 atau 98,74 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa

dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD tidak ada pada tahun anggaran 2020.

- ***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.124.827.043 dan terealisasi sebesar Rp. 1.666.549.579 atau 78,43 %. Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.225.020.043 dan terealisasi sebesar Rp. 1.060.000.078 atau 86,53 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 191.736.000 dan terealisasi sebesar Rp. 153.674.000 atau 80,15 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 534.771.000 dan terealisasi sebesar Rp. 373.410.313 atau 69,83%. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.400.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 152.900.000 dan terealisasi sebesar Rp. 79.465.188 atau 51,97 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang tidak ada pada tahun anggaran 2020.

- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.528.871.772 dan terealisasi sebesar Rp. 6.600.885.169 atau 87,67 %. Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 119.471.619 dan terealisasi sebesar Rp. 111.103.497 atau 93 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 886.584.387 dan terealisasi sebesar Rp. 703.264.644 atau 79,32 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 153.289.800 dan terealisasi sebesar Rp. 151.711.200 atau 98,97 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 421.829.476 dan terealisasi sebesar Rp. 395.737.395 atau 93,81 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 275.449.570 dan terealisasi sebesar Rp. 214.416.730 atau 77,84 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 17.520.000 dan terealisasi sebesar Rp. 10.890.000 atau 62,16 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.785.000 dan terealisasi sebesar Rp. 825.000 atau 46,22 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.652.941.920 dan terealisasi sebesar Rp. 5.004.676.703 atau 88,53 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tidak ada pada tahun anggaran 2020.

- ***Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.347.489.651 dan terealisasi sebesar Rp. 3.762.046.264 atau 86,53 %. Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Pengadaan Mebel**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 518.757.200 dan terealisasi sebesar Rp. 469.629.800 atau 90,53%. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.017.632.951 dan terealisasi sebesar Rp. 2.507.893.109 atau 83,11 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 24.400.000 dan terealisasi sebesar Rp. 22.937.700 atau 94,01%. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 312.107.300 dan terealisasi sebesar Rp. 309.480.655 atau 99,16 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 240.120.000 dan terealisasi sebesar Rp. 229.010.000 atau 95,37 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 234.472.200 dan terealisasi sebesar Rp. 223.095.000 atau 95,15 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak ada pada tahun anggaran 2020.

- ***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 12.255.247.954 dan terealisasi sebesar Rp. 10.949.516.461 atau 89,35 %. Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 60.575.000 dan terealisasi sebesar Rp. 41.794.650 atau 69,00 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.591.572.750 dan terealisasi sebesar Rp. 1.728.042.831 atau 66,68 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 24.955.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.620.000 atau 18,51 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 9.578.145.204 dan terealisasi sebesar Rp. 9.175.058.980 atau 95,79 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tidak ada pada tahun anggaran 2020.

- ***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.917.249.897 dan terealisasi sebesar Rp. 4.242.592.955 atau 71,70 %. Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 469.331.100 dan terealisasi sebesar Rp. 373.984.402 atau 79,68 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.391.285.792 dan terealisasi sebesar Rp. 2.358.052.791 atau 69,53 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 783.143.020 dan terealisasi sebesar Rp. 466.176.331 atau 59,53 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 325.334.656 dan terealisasi sebesar Rp. 279.840.877 atau 86,02 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 374.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 218.760.000 atau 58,41 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 573.655.329 dan terealisasi sebesar Rp. 545.778.554 atau 95,14 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak ada pada tahun anggaran 2020.

- **Program Pengelolaan Hutan (03)**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 245.092.289.426 pada Program Pengelolaan Hutan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 96.436.387.811 atau 39,35 %. Program ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Program Pengelolaan Hutan tidak ada pada tahun anggaran 2020.

- ***Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 76.961.488.009 dan terealisasi sebesar Rp. 34.570.376.846 atau 44,92 %. Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi tidak ada pada tahun anggaran 2020.

- ❖ **Sub Kegiatan Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.684.531.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.055.524.855 atau 55,79 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan tidak ada pada tahun anggaran 2020.

- ❖ **Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 73.276.957.009 dan terealisasi sebesar Rp. 32.514.851.991 atau 44,37 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH tidak ada pada tahun anggaran 2020.

- ***Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.394.974.900 dan terealisasi sebesar Rp. 2.477.794.940 atau 72,98 %. Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.394.974.900 dan terealisasi sebesar Rp. 2.477.794.940 atau 72,98 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan tidak ada pada tahun anggaran 2020.

- ***Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.917.100.121 dan terealisasi sebesar Rp. 5.521.527.828 atau 69,74 %. Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 710.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 388.896.700 atau 54,77 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 310.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 103.358.302 atau 33,34 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.474.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.778.150.621 atau 79,97 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.800.400.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.371.576.579 atau 76,18 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.622.700.121 dan terealisasi sebesar Rp. 879.545.626 atau 54,20 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan tidak ada pada tahun anggaran 2020.

- ***Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 56.431.143.192 dan terealisasi sebesar Rp. 12.248.442.469 atau 21,71 %. Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.796.140.722 dan terealisasi sebesar Rp. 5.341.952.821 atau 20,71%. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.585.692.450 dan terealisasi sebesar Rp 1.824.270.800 atau 24,05 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.230.098.920 dan terealisasi sebesar Rp 4.519.501.320 atau 86,41 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa

dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.221.829.000 dan terealisasi sebesar Rp 562.717.528 atau 25,33 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan tidak ada pada tahun anggaran 2020.

- ***Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 96.754.556.245 dan terealisasi sebesar Rp. 38.891.923.188 atau 40,20%. Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 189.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 113.487.600 atau 60,05 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.709.400.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.448.138.769 atau 84,72 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 108.900.000 dan terealisasi sebesar Rp 90.557.500 atau 83,16 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 14.177.188.700 dan terealisasi sebesar Rp 6.858.653.136 atau 48,38 %. Sub Kegiatan ini tidak

bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 80.570.067.545 dan terealisasi sebesar Rp 30.381.086.183 atau 37,71 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan tidak ada pada tahun anggaran 2020.

- ***Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.497.346.959 dan terealisasi sebesar Rp. 1.836.318.006 atau 73,53 %. Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.370.632.559 dan terealisasi sebesar Rp 1.211.431.716 atau 88,38 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.126.714.400 dan terealisasi sebesar Rp 624.886.290 atau 55,46%. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya tidak ada pada tahun anggaran 2020.

- ***Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 258.900.000 dan terealisasi sebesar Rp. 239.237.632 atau 92,41 %. Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 258.900.000 dan terealisasi sebesar Rp 239.237.632 atau 92,41 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun tidak ada pada tahun anggaran 2020.

- ***Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 876.780.000 dan terealisasi sebesar Rp. 650.766.902 atau 74,22 %. Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengekar Benih dan/atau Bibit Terdaftar**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 407.310.000 dan terealisasi sebesar Rp 223.275.072 atau 54,82 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengekar Benih dan/atau Bibit Terdaftar tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 469.470.000 dan terealisasi sebesar Rp 427.491.830 atau 91,06 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit tidak ada pada tahun anggaran 2020.

• **Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (04)**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 4.526.788.600 pada Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 552.143.752 atau 12,20 %. Program ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak ada pada tahun anggaran 2020.

- ***Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.907.488.600 dan terealisasi sebesar Rp. 97.659.221 atau 2,50 %. Kegiatan ini tidak bisa

dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.801.200.000 dan terealisasi sebesar Rp 0 atau 0 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 106.288.600 dan terealisasi sebesar Rp 97.659.221 atau 91,88 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi tidak ada pada tahun anggaran 2020.

- ***Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 619.300.000 dan terealisasi sebesar Rp. 454.484.531 atau 73,39%. Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 59.530.675 atau 59,53%. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 519.300.000 dan terealisasi sebesar Rp 394.953.856 atau 76,06 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penguatan

Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi tidak ada pada tahun anggaran 2020.

- **Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (05)**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 40.644.411.176 pada Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 17.264.230.139 atau 42,48 %. Program ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan tidak ada pada tahun anggaran 2020.

- ***Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.644.411.176 dan terealisasi sebesar Rp. 17.264.230.139 atau 42,48 %. Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan tidak ada pada tahun anggaran 2020.

- ❖ **Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.457.186.680 dan terealisasi sebesar Rp 6.733.471.170 atau 43,56%. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan tidak ada pada tahun anggaran 2020.

- ❖ **Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 12.300.255.346 dan terealisasi sebesar Rp 4.855.345.758 atau 39,47 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 12.886.969.150 dan terealisasi sebesar Rp 5.675.413.211 atau 44,04 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial tidak ada pada tahun anggaran 2020.

• **Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) (06)**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 1.303.750.000 pada Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 1.117.339.399 atau 85,70 %. Program ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak ada pada tahun anggaran 2020.

- ***Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.303.750.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.117.339.399 atau 85,70 %. Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 833.750.000 dan terealisasi sebesar Rp 648.356.400 atau 77,76 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 199.992.000 atau 99,996 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS tidak ada pada tahun anggaran 2020.

❖ **Sub Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS**

Pada tahun 2021 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 270.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 268.990.999 atau 99,63 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa

dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS tidak ada pada tahun anggaran 2020.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain:

- Kekurangan personil teknis karena banyak yang telah pensiun sementara belum ada tenaga pengganti.
- Petunjuk teknis yang seringkali berubah.
- Faktor cuaca yang tidak mendukung seringkali dijumpai saat melaksanakan kegiatan pemantauan (*monitoring*).
- Pandemi COVID-19 membatasi pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), tidak bertindak selaku pengkonsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD.

4.2 Basis Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur selaku entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka mengacu pada kebijakan akuntansi yang sama. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang digunakan adalah nilai historis.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2021 dan berakhir 31 Desember 2021. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Penerapan kebijakan akuntansi akrual telah dilakukan sejak tahun 2015, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013. Melalui penerapan akuntansi berbasis akrual, laporan keuangan diharapkan semakin berkualitas sehingga keputusan yang diambil tepat.

4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi

Kebutuhan untuk pertanggungjawaban menuntut proses pengelolaan keuangan yang dimulai anggaran, penatausahaan dan pembukuan harus terintegrasi dan memiliki rekam jejak transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menjamin terintegrasinya ketiga proses dan terekamnya jejak transaksi maka digunakan aplikasi-aplikasi berbasis sistem informasi. Dalam penyusunan laporan keuangan ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menggunakan beberapa aplikasi berbasis sistem informasi, yaitu:

- Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
Aplikasi ini dipergunakan untuk perencanaan dan penganggaran (penyajian evaluasi penganggaran Mendagri)
- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan
Aplikasi ini dipergunakan untuk penganggaran, penatausahaan dan pembukuan (penyajian laporan keuangan).
- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD)
Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan aset tetap dan aset tidak berwujud.
- Aplikasi Sistem Informasi Kaltim untuk Aset Persediaan (SIKAP)
Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan persediaan.

4.4.2 Defenisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan

4.4.2.1 Pendapatan – LRA

- Defenisi

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini kas di bendahara penerimaan termasuk bagian dari Kas Umum Daerah.

- Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah di terima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Bendahara Penerimaan atau entitas dengan pengesahan oleh BUD.

- **Pengukuran**

Pendapatan -LRA dicatat sebesar nilai bruto yang diterima.

Pendapatan diklasifikasikan menjadi pendapatan pajak daerah, restibusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

4.4.2.2 Belanja

- **Defenisi**

Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam perioda tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali.

- **Pengakuan**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

- **Pengukuran**

Belanja dicatat sebesar nilai bruto yang telah dikeluarkan

Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Masing-masing jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial
- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud.

4.4.2.3 Pendapatan - LO

- **Defenisi**

Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- **Pengakuan**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

- **Pengukuran**

Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak dan menambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan sebesar nilai bruto. Apabila pendapatan-LO yang diterima berupa barang/jasa dinilai sebesar harga perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan mengungkapkannya di CaLK.

- **Penyajian**

Pendapatan-LO disajikan di Laporan Operasional dengan mengklasifikasikannya berdasarkan sumber pendapatannya yaitu:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah

4.4.2.4 Beban

- **Defenisi**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam perioda pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- **Pengakuan**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- **Pengukuran**

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada perioda tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang/ jasa dinilai sebesar perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan menjelaskannya di CaLK.

- **Penyajian**

Beban disajikan di Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonominya yaitu:

- Beban Pegawai
- Beban Barang dan Jasa
- Beban Hibah
- Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban Penyisihan Piutang
- Beban Lain-Lain

4.4.2.5 Aset

- Defenisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yaitu:

1. Aset lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang pajak, piutang retribusi, piutang lainnya, penyisihan piutang, beban dibayar dimuka, persediaan dan asuransi dibayar dimuka.

2. Aset non lancar

Selain aset lancar maka termasuk sebagai aset non lancar. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

- Pengakuan

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan di peroleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

- Pengukuran

Sehubungan berbeda-bedanya karakteristik antar jenis aset maka pengakuan masing-masing jenis aset dapat dirinci sebagai berikut:

- Kas dan setara diukur sebesar nilai nominalnya
- Persediaan diukur sebesar nilai pembeliannya bila diperoleh dengan cara membeli, sebesar nilai standar bila dihasilkan dengan memproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar bila diperoleh dari donasi atau rampasan. Pada saat disajikan pada akhir tahun maka dilakukan perhitungan secara periodik dengan metode FIFO (Frist in First out).
- Piutang diukur sebesar nilai yang menjadi hak pemerintah daerah. Pada saat penyajian di neraca maka ia dinilai sebesar nominal yang dapat direalisasikan (nilai nominal dikurangi nilai penyisihan piutang)
- Beban dibayar dimuka diukur sebesar nilai tersisa yang masih memiliki manfaat ekonomi/sosial di tahun mendatang,

- Investasi jangka pendek diukur sebesar nilai perolehan atau nilai wajarnya
- Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya, apabila tidak diketahui nilai perolehannya maka menggunakan nilai wajar.
- Aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya, bila tidak dimungkinkan didapat data harga perolehan maka digunakan nilai wajar. Seluruh biaya yang timbul setelah aset tetap tersebut diperoleh dapat di kapitalisasi bila seluruh persyaratan dibawah ini terpenuhi:
 - Menambah kapasitas/volume atau memperpanjang masa manfaat atau menambah fungsi atau peningkatan standar kinerja dan;
 - Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terpenuhi, yaitu: Perolehan konstruksi sebesar Rp. 20.000.000 ke atas dan Perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.500.000 ke atas.
- Aset tidak berwujud diukur sebesar nilai perolehannya, bila diperoleh secara swakelola maka diukur dengan menjumlahkan seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan aset tersebut.
- Aset lain-lain diukur sebesar nilai perolehannya.

- **Penyajian**

Aset disajikan di Neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya dengan urutan sebagai berikut:

ASET

ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas

Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di BLUD
Kas di Bendahara FKTP
Kas di Bendahara BOS
Kas Lainnya
Setara Kas

Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek Lainnya

Piutang Pendapatan

Piutang Pajak Daerah
Piutang Retribusi
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Lainnya

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Uang Muka

Panjar Kegiatan

Piutang Kelebihan Pungut Pph

Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang Lainnya

Beban Dibayar Dimuka

Beban Pegawai Dibayar Dimuka

Beban Barang Dibayar Dimuka

Beban Jasa Dibayar Dimuka

Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka

Beban Lainnya Dibayar Dimuka

Persediaan

Persediaan Bahan Pakai Habis

Persediaan Bahan/Material

Persediaan Barang Lainnya

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

Investasi dalam Obligasi

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Dana Bergulir

Deposito Jangka Panjang

Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tidak Berwujud

Aset Lain-lain

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

4.4.2.6 Kewajiban

- **Defenisi**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

- **Pengakuan**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dimasa mendatang akibat kewajiban sekarang dan nilai penyelesaian tersebut dapat diukur dengan handal. Selain itu kewajiban juga dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat timbulnya kewajiban.

- **Pengukuran**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

- **Penyajian**

Kewajiban disajikan di Neraca berdasarkan tingkat kesegeraan pelunasannya dengan rincian sebagai berikut:

- **KEWAJIBAN**

- **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- Pendapatan Diterima Dimuka
- Utang Beban
- Utang Jangka Pendek Lainnya

- **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**

- Utang Dalam Negeri
- Utang Jangka Panjang Lainnya

4.4.2.7 Ekuitas

- **Defenisi**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

- **Penyajian**

Ekuitas disajikan di Neraca dengan rincian sebagai berikut:

- **EKUITAS**

- EKUITAS

- Surplus/Defisit-LO
- Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

Sebagai entitas akuntansi, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan meliputi Lapran Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual. Dalam rangka memenuhi amanah tersebut serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah diamanahkan, maka bersama ini akan dijabarkan rincian pos laporan keuangan yang merupakan hasil pengelolaan dana tersebut selama Tahun Anggaran 2021.

5.1.1. Pendapatan

Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0,00%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan penerimaan di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Pendapatan terlampir. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 hanya menargetkan Objek Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – ruangan (sewa gedung/aula/ruang serbaguna). Rincian anggaran dan realisasi masing-masing rincian obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021		31 Desember 2020	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
PENDAPATAN - LRA	150.000.000,00	0,00	0,00	46.400.000,00	(-1)
<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</u>	150.000.000,00	0,00	0,00	46.400.000,00	(-1)
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	-	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	150.000.000,00	0,00	0,00	46.400.000,00	(-1)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	-	-	-	-	-
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	-	-	-	-	-

Pendapatan secara total melampaui mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas diketahui terdapat pendapatan yang tidak melampaui target dan sebagian lagi tidak masuk dalam Objek Pendapatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun penjelasan dari masing-masing rincian obyek pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut

5.1.1.1. Pendapatan pajak

Pendapatan pajak daerah adalah pendapatan yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penarikan pajak sebagai salahsatu pendapatan daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pajak daerah yang dipungut oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0% dari anggaran yang telah ditetapkan. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Pendapatan Pajak. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4 Realisasi Anggaran Pajak Daerah Tahun 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021		31 Desember 2020	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
Pajak Air Permukaan	-	-	-	-	-
Pajak Rokok	-	-	-	-	-

5.1.1.1.1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

5.1.1.1.2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

5.1.1.1.3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

5.1.1.1.4. Pajak Air Permukaan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Pendapatan Pajak Air Permukaan.

5.1.1.1.5. Pajak Rokok

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Pendapatan Pajak Rokok.

5.1.1.2. Retribusi

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Penarikan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah didasarkan pada tiga peraturan daerah, yaitu:

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Jasa Umum
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Jasa Usaha
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi daerah yang dipungut oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 dari target sebesar Rp. 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %, bila dibandingkan dengan tahun 2020 maka terdapat penurunan sebesar Rp. 46.400.000,00 atau -1 %. Penyebab tercapai/ tidak tercapainya target serta kenaikan/ penurunan antara tahun 2021 dan tahun 2020 akan dijelaskan terinci di penjelasan masing-masing rincian pendapatan. Secara garis besar retribusi terbagi menjadi tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, adapun rincian anggaran dan realisasi ketiga kategori pendapatan retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Realisasi Anggaran Retribusi Tahun 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021		31 Desember 2020	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Retribusi Jasa Umum	-	-	-	-	-
- Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-	-
- Retribusi Pengujian Kendaraan Diatas Air	-	-	-	-	-
- Retribusi Pelayanan Pendidikan	-	-	-	-	-
Retribusi Jasa Usaha	-	-	-	-	-
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	150.000.000	0,00	0,00	46.400.000,00	(-1)
- Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	-	-	-	-
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	-	-	-	-	-
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	-	-
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	-	-	-	-	-
- Retribusi Kartu Perpustakaan	-	-	-	-	-
- Retribusi Pelayanan Sertifikasi, Pengujian Benih Tanaman	-	-	-	-	-
- Retribusi Penggunaan Sarana Proteksi / Perlindungan Tanaman	-	-	-	-	-
- Retribusi Jasa Teknis Pengujian dan Kalibrasi	-	-	-	-	-
Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-	-
- Retribusi Izin Trayek	-	-	-	-	-
- Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	-	-	-	-
- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada TKA	-	-	-	-	-

5.1.1.2.1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menargetkan memperoleh pendapatan dari tiga obyek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa umum dengan uraian sebagai berikut:

5.1.1.2.1.1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga tidak ada pungutan dari jasa tersebut.

5.1.1.2.1.2. Retribusi Pengujian Kendaraan Diatas Air

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi pengujian kendaraan diatas air, sehingga tidak ada pungutan dari jasa tersebut.

5.1.1.2.1.3. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi pelayanan pendidikan kepada masyarakat, sehingga tidak ada pungutan dari jasa tersebut.

5.1.1.2.1.4. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menargetkan memperoleh pendapatan dari obyek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa usaha dengan uraian sebagai berikut:

5.1.1.2.1.5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menarik retribusi pendapatan kepada masyarakat atas layanan berupa sewa gedung/aula/ruang serbaguna. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari target sebesar Rp. 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %, hal ini disebabkan sebagai berikut:

- Daya minat konsumen untuk menyewa gedung Aula/Ruang Serba Guna pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
- Lokasi Gedung Aula/Ruang Serbaguna Sangat Strategis

Bila Pendapatan retribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 maka terjadi penurunan sebesar Rp. -46.400.000,00

atau sebesar 0.00 %, hal ini disebabkan oleh adanya wabah *corona*, yang mana dilarang berkerumun/mengumpulkan massa agar tidak menularkan virus covid-19.

5.1.1.2.1.6. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi tempat khusus parkir, sehingga tidak ada pungutan dari jasa tersebut.

5.1.1.2.1.7. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, sehingga tidak ada pungutan dari jasa tersebut.

5.1.1.2.1.8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi penjualan produksi usaha daerah, sehingga tidak ada pungutan dari jasa tersebut.

5.1.1.2.1.9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi tempat rekreasi dan olah raga kepada masyarakat, sehingga tidak ada pungutan dari jasa tersebut.

5.1.1.2.1.10. Retribusi Kartu Perpustakaan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi pelayanan kartu perpustakaan kepada masyarakat, sehingga tidak ada pungutan dari jasa tersebut.

5.1.1.2.1.11. Retribusi Pelayanan Sertifikasi, Pengujian Benih Tanaman

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi pelayanan sertifikasi, pengujian benih tanaman kepada masyarakat, sehingga tidak ada pungutan dari jasa tersebut.

5.1.1.2.1.12. Retribusi Penggunaan Sarana Proteksi / Perlindungan Tanaman

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi penggunaan sarana proteksi/perlindungan tanaman kepada masyarakat, sehingga tidak ada pungutan dari jasa tersebut.

5.1.1.2.1.13. Retribusi Jasa Teknis Pengujian dan Kalibrasi

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi jasa teknis pengujian dan kalibrasi, sehingga tidak ada pungutan dari jasa tersebut.

5.1.1.2.2. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi yang ditarik atas pemberian izin, permohonan, rekomendasi dan surat keterangan kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menargetkan memperoleh pendapatan dari tiga obyek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa usaha dengan uraian sebagai berikut:

5.1.1.2.2.1. Retribusi Izin Trayek

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi izin trayek kepada masyarakat, sehingga tidak ada pungutan dari jasa tersebut.

5.1.1.2.2.2. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi izin usaha perikanan kepada masyarakat, sehingga tidak ada pungutan dari jasa tersebut.

5.1.1.2.2.3. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada TKA

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi pelayanan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) kepada, sehingga tidak ada pungutan dari jasa tersebut.

5.1.1.3. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengelola pencatatan Lain-Lain PAD yang sah. Penjelasan rinci atas Lain-Lain PAD yang sah dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.3.1. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA, sehingga tidak ada pungutan dari pendapatan tersebut.

5.1.1.3.2. Pendapatan Denda Pajak – LRA

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik Pendapatan Denda Pajak – LRA, sehingga tidak ada pungutan dari pendapatan tersebut.

5.1.1.3.3. Pendapatan Denda Retribusi – LRA

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik Pendapatan Denda Retribusi – LRA, sehingga tidak ada pungutan dari pendapatan tersebut.

5.1.1.3.4. Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah – LRA

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah – LRA, sehingga tidak ada pungutan dari pendapatan tersebut.

5.1.1.3.5. Pendapatan BLUD – LRA

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak mempunyai Pendapatan BLUD – LRA, sehingga tidak ada pungutan dari pendapatan tersebut.

5.1.2. Belanja

Belanja yang ditargetkan sebesar Rp 463.954.634.702,00 terealisasi sebesar Rp. 248.526.989.861,38 atau sebesar 53,55 %. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan pengeluaran di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Belanja terlampir. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

pada tahun 2021 telah menargetkan tiga jenis belanja, yaitu belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021		31 Desember 2020	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja	463.954.634.702,00	248.526.989.861,38	53,55	353.985.914.515,69	
<i>Belanja Operasi</i>	361.587.233.866,00	197.616.664.658,00	54,65	242.779.253.631,00	
Belanja Pegawai	138.449.149.000,00	102.848.891.524,00	74,29	85.654.719.017,00	
Belanja Barang dan Jasa	223.138.084.866,00	50.910.325.203,38	42,47	157.124.534.614,00	
Belanja Hibah	-	-	-	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	
<i>Belanja Modal</i>	102.367.400.836,00	50.910.325.203,38	49,73	111.206.660.884,69	
Belanja Modal Tanah	83.450.000,00	-	-	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.999.902.635,00	38.929.826.012,98	61,79	92.339.276.052,00	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.039.865.911,00	11.722.599.190,40	33,60	18.000.061.023,69	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.070.982.290,00	152.130.000,00	3,74	645.151.809,00	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	173.200.000,00	55.770.000,00	32,20	222.172.000,00	
<i>Belanja Tidak Terduga</i>	-	-	-	-	

Belanja secara total dapat dikatakan mencapai/tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas diketahui terdapat sebagian belanja yang mencapai target dan sebagian lagi tidak mencapai target. Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi memiliki persentase terbesar diantara komponen jenis belanja yaitu sebesar 77,94 %. Dari target sebesar Rp 361.587.233.866,00 terealisasi sebesar Rp. 197.578.909.658,00 atau 54,64 %. Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 7 Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021		%	31 Desember 2020	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
<i>Belanja Operasi</i>	361.587.233.866,00	197.616.664.658,00	54,65	242.779.253.631,00	(18,62)
Belanja Pegawai	138.449.149.000,00	102.848.891.524,00	74,29	85.654.719.017,00	20,07
Belanja Barang dan Jasa	223.138.084.866,00	50.910.325.203,38	42,47	157.124.534.614,00	(39,71)

▪ Belanja Pegawai

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp 361.587.233.866,00 untuk memberikan kompensasi kepada pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. Anggaran belanja pegawai tersebut terrealisasi sebesar Rp. 197.578.909.658,00 atau sebesar 53,55 %.

Tabel 8 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021		%	31 Desember 2020	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
<u>Belanja Pegawai</u>	138.449.149.000,00	102.848.891.524,00	74,29	85.654.719.017,00	20,07
Belanja Gaji dan Tunjangan	68.628.379.000,00	43.738.051.524,00	63,73	43.575.926.767,00	0,37
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	65.089.200.000,00	55.702.278.000,00	85,58	42.078.792.250,00	32,38
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.731.570.000,00	3.408.562.000,00	72,04	-	-
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	-	-
Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	-
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-

Tersisanya anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 35.600.257.476,00 atau sebesar 34,61 % disebabkan oleh adanya beberapa pegawai yang pensiun, meninggal dunia dan pindah tugas ke SKPD lain atau Ke Pemerintah Provinsi lain.

▪ Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2021 Dinas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengganggarkan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan sebesar Rp. 223.138.084.866,00 atau sebesar 42,45%.

Tabel 9 Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021		31 Desember 2020	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
<u>Belanja Barang dan Jasa</u>			α		
<u>Belanja Barang dan Jasa</u>	223.138.084.866,00	94.730.018.134,00	42,45	157.124.534.614,00	1,15
Belanja Bahan Pakai Habis	45.997.839.999,10	15.986.569.083,00	34,76	6.458.509.100,00	1,16
Belanja Bahan Tak Habis Pakai	66.062.300,00	44.637.000,00	67,57	-	-
Belanja Bahan/Material				37.393.394.938,00	-
Belanja Jasa Kantor	25.574.045.120,90	17.433.102.482,00	68,17	23.319.734.557,00	-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	-	-	1.325.748.746,00	-
Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-	-	1.223.900.067,00	-
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	-	-	-	590.450.000,00	-
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	-	-	1.048.945.762,00	-
Belanja Makanan dan Minuman	-	-	-	3.879.380.430,00	-
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-	648.655.850,00	-
Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	342.420.257,00	-
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	-	-	-	502.966.744,00	-
Belanja Perjalanan Dinas	100.305.352.600,00	46.918.181.708,00	46,78	65.384.635.557,00	71,75
Belanja Pemeliharaan	38.454.581.700,00	10.119.086.016,00	26,31	953.586.416,00	9,42
Belanja Jasa Konsultansi	-	-	-	2.058.106.350,00	-

Uraian	31 Desember 2021		31 Desember 2020	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	-	-	-	38.600.000,00	-
Belanja Honorarium PNS	-	-	-	6.123.012.500,00	-
Belanja Honorarium Non PNS	-	-	-	4.000.000,00	-
Belanja Pengadaan Alat-alat Bengkel	-	-	-	990.000,00	-
Belanja Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	-	-	2.678.490.640,00	-
Belanja Pengadaan Peralatan Komputer	-	-	-	49.990.000,00	-
Belanja Pengadaan Alat-alat Studio	-	-	-	13.300.200,00	-
Belanja Pengadaan Peralatan Dapur	-	-	-	63.807.500,00	-
Belanja Pengadaan Alat-alat Ukur	-	-	-	53.150.000,00	-
Belanja Pengadaan Buku/Kepustakaan	-	-	-	16.764.000,00	-
Belanja Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	-	-	-	348.645.000,00	-
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	-	-	-	2.603.350.000,00	-

Tersisanya anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 128.408.066.732,00 atau sebesar 57,55 % disebabkan oleh terkendala oleh waktu

5.1.2.2 Belanja Modal

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 102.367.400.836,00 untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terrealisasi sebesar Rp. 50.856.625.205,38 atau sebesar 49.68 %.

Tabel 10 Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021		31 Desember 2020	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Modal	102.367.400.836,00	50.856.625.205,38	49,68	111.206.660.884,69	(54,27)
Belanja Modal Tanah	83.450.000,00	-	-	-	-

Uraian	31 Desember 2021		31 Desember 2020	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.999.902.635,00	38.876.126.014,98	61,71	92.339.276.052,00	(57,90)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.039.865.911,00	11.772.599.190,40	33,60	18.000.061.023,69	(34,60)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.070.982.290,00	152.130.000,00	3,74	645.151.809,00	(76,42)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	173.200.000,00	55.770.000,00	32,20	222.172.000,00	(74,90)
Belanja Modal BLUD	-	-	-	-	-

Belanja modal sebesar Rp. 102.367.400.836,00 dipergunakan untuk menambah aset berupa:

- Peralatan Dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya

Masih tersisanya anggaran belanja modal sebesar Rp. 51.510.775.630,62 atau sebesar 50,32 % disebabkan oleh waktu

5.1.3. Pendapatan LO

Pada tahun 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh pendapatan LO sebesar Rp 0,00 nilai ini jika dibandingkan dengan Pendapatan LO tahun 2020 sebesar Rp. 46.400.000,00 .maka terdapat Penurunan sebesar Rp. 0.00 atau sebesar 0.00 %. Perbandingan realisasi masing-masing rincian obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 11 Realisasi Pendapatan LO Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020	% Naik (Turun)
1	2	3	4=((2-3)/3)
PENDAPATAN - LO	-	46.400.000,00	0.00
<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</u>	-	46.400.000,00	0.00
Pendapatan Pajak Daerah – LO	-	-	
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	-	46.400.000,00	0.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	-	-	

Uraian	2021	2020	% Naik (Turun)
1	2	3	4=((2-3)/3)
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	-	-	
<u>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</u>	-	-	
Pendapatan Lainnya - LO	-	-	
<u>PENDAPATAN LUAR BIASA - LO</u>	-	-	
Pendapatan Luar Biasa - LO	-	-	

5.1.3.1. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 memperoleh Pendapatan Pajak Daerah – LO sebesar Rp 0,00. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 0,00 , maka dapat diketahui terdapat kenaikan/ penurunan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Rincian pendapatan pajak daerah - LO tahun 2020 dikomparasikan dengan tahun 2019 disajikan sebagai berikut:

Tabel 12 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020	% Naik (Turun)
1	2	3	4=((2-3)/3)
Pajak Kendaraan Bermotor-LO	-	-	-
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	-	-	-
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	-	-	-
Pajak Air Permukaan-LO	-	-	-
Pajak Rokok-LO	-	-	-

5.1.3.1.1. Pajak Kendaraan Bermotor-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor – LO.

5.1.3.1.2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO.

5.1.3.1.3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor– LO.

5.1.3.1.4. Pajak Air Permukaan-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Pendapatan Pajak Air Permukaan – LO.

5.1.3.1.5. Pajak Rokok-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Pendapatan Pajak Rokok – LO.

5.1.3.2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 memperoleh Pendapatan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp 0.00 Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 46.400.000,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp. 0.00 Atau 0.00 %. Rincian pendapatan pajak daerah - LO tahun 2020 kmparasion dengan tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel 13 Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
- Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	-	-	-
- Retribusi Pengujian Kendaraan Diatas Air-LO	-	-	-
- Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	-	-	-
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	-	Rp. 46.400.000,00	0.00
- Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	-	-	-
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/V illa-LO	-	-	-

Uraian	2021	2020	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	-	-	-
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LO	-	-	-
- Retribusi Kartu Perpustakaan-LO	-	-	-
- Retribusi Pelayanan Sertifikasi, Pengujian Benih Tanaman-LO	-	-	-
- Retribusi Penggunaan Sarana Proteksi / Perlindungan Tanaman-LO	-	-	-
- Retribusi Jasa Teknis Pengujian dan Kalibrasi-LO	-	-	-
- Retribusi Izin Trayek-LO	-	-	-
- Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	-	-	-
- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada TKA-LO	-	-	-

5.1.3.2.1. Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO.

5.1.3.2.2. Retribusi Pengujian Kendaraan Diatas Air-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Diatas Air – LO.

5.1.3.2.3. Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan – LO.

5.1.3.2.4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO

Bila Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0,0 %, hal ini disebabkan antara lain :

- Pandemi Virus Corona (covid-19)
- Adanya larangan berkumpul/berkerumunan dalam rangka mengantisipasi penularan virus Corona

5.1.3.2.5. Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO.

5.1.3.2.6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa – LO.

5.1.3.2.7. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO.

5.1.3.2.8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga – LO.

5.1.3.2.9. Retribusi Kartu Perpustakaan-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Retribusi Kartu Perpustakaan – LO.

5.1.3.2.10. Retribusi Pelayanan Sertifikasi, Pengujian Benih Tanaman-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Retribusi Pelayanan Sertifikasi, Pengujian Benih Tanaman – LO.

5.1.3.2.11. Retribusi Penggunaan Sarana Proteksi / Perlindungan Tanaman-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Retribusi Penggunaan Sarana Proteksi / Perlindungan Tanaman – LO.

5.1.3.2.12. Retribusi Jasa Teknis Pengujian dan Kalibrasi-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Retribusi Jasa Teknis Pengujian dan Kalibrasi – LO.

5.1.3.2.13. Retribusi Izin Trayek-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Retribusi Izin Trayek – LO.

5.1.3.2.14. Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan – LO.

5.1.3.2.15. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada TKA-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada TKA – LO.

5.1.3.3. Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur juga mengelola pencatatan Lain-Lain PAD yang sah – LO. Lain-lain PAD yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Adapaun rincian Lain-Lain PAD yang Sah – LO dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.3.3.1 Pendapatan Denda Pajak – LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Pendapatan Denda Pajak – LO.

5.1.3.3.2 Pendapatan Denda Retribusi – LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Pendapatan Denda Retribusi – LO.

5.1.3.3.3 Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah – LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah – LO.

5.1.3.3.4 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda – LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda – LO.

5.1.3.3.5 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LO.

5.1.3.3.6 Pendapatan BLUD – LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Pendapatan BLUD – LO.

5.1.3.3.7 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Objek Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LO.

5.1.4. Beban LO

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada tahun 2021 sebesar Rp. 196.046.363.309,64 Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp.262.389.309.886,67 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp. 65.418.183.555,03 Atau 24,93 %. Rincian Beban LO tahun 2021 komparasian dengan tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel 14 Realisasi Beban LO Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Beban LO	196.971.126.331,64	262.389.309.886,67	(24,93)
Beban Operasional	196.971.126.331,64	262.389.309.886,67	(24,90)
- Beban Pegawai	102.848.891.524,00	85.654.719.017,00	20,07
- Beban Persediaan	15.457.022.670,64	53.656.439.049,67	(71,05)
- Beban Jasa	21.672.412.413,00	35.622.460.906,00	(39,17)
- Beban Pemeliharaan	10.100.848.016,00	2.279.335.162,00	343,15
- Beban Perjalanan Dinas	46.891.951.708,00	65.384.635.557,00	(28,28)
- Beban Penyusutan - Peralatan dan Mesin		16.128.820.194,00	0
- Beban Penyusutan – Gedung dan Bangunan		3.144.976.269,00	0
- Beban Penyusutan – jalan, Jaringan dan Irigasi		527.301.229,00	0
- Beban Penyisihan Piutang			

5.1.4.1. Beban Operasi

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 menanggung beban operasi sebesar Rp. 196.046.363.309,64. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 262.389.309.886,67 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp. -65.418.183.555,03 Atau 24,90 %. Rincian Beban Operasi tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.4.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemberian kompensasi kepada pegawai atas tugas yang diberikan kepadanya. Bila Beban Pegawai tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 17.194.172.507,00 atau sebesar 20,07 %, hal ini disebabkan antara lain:

- Kenaikan TPP

- Pembayaran TPP

5.1.4.1.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian persediaan untuk menunjang operasional pelayanan. Bila Beban Persediaan tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 38.120.371.143,03 atau sebesar 71,05 %, hal ini disebabkan

5.1.4.1.3. Beban Jasa

Beban Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas layanan yang diberikan oleh pihak lain. Bila beban jasa tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 13.953.856.751,00 atau sebesar 39,17 %, hal ini disebabkan adanya penambahan perangkat kerja sehingga berpengaruh terhadap beban jasa

5.1.4.1.4. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas pemeliharaan aset yang dilakukan oleh pihak lain. Bila Beban pemeliharaan tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 7.821.512.854,00 atau sebesar 343,15 %

5.1.4.1.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi kepada pegawai atau nonpegawai yang melaksanakan tugas kedinasan yang kegiatannya diluar wilayah tempat kerjanya. Bila Beban perjalanan dinas tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 18.492.683.849,00 atau sebesar 28,28 %, hal ini disebabkan banyaknya bimbingan teknis dan sosialisai untuk pencegahan kebakaran hutan serta kenaikan anggaran tahun 2021

5.1.4.1.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat penggunaan aset tetap berwujud (penyusutan) dan aset tidak berwujud (amortisasi). Beban Penyusutan belum bisa disajikan karena masih melakukan proses menghitung beban penyusutan akhir tahun dan Beban amortisasi (ATB) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak disajikan karena tidak ada pembelian Aset Tidak Berwujud.

5.1.4.1.7. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat kemungkinan tidak dapat tertagihnya piutang. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak disajikan karena tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang.

5.1.5. Aset

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset sebesar Rp.305.580.828.350,27 pada tahun 2021. Bila dibandingkan dengan aset tahun lalu yaitu sebesar Rp. 254.259.491.085,53 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 51.321.337.264,74 atau 83,21 %. Rincian pendapatan aset tahun 2021 beserta komparasian dengan tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel 15 Perbandingan Aset Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Aset	305.580.828.350,27	254.259.491.085,53	20,18
Aset Lancar	995.883.551,69	662.520.467,33	50,32
- Kas di Bendahara Penerimaan			
- Kas di Bendahara Pengeluaran	155.572,00		0
- Kas di BLUD			
- Kas Lainnya			
- Piutang Pajak			
- Piutang Bukan Pajak			
- Piutang Retribusi			
- Piutang Lainnya			

Uraian	2021	2020	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
- Penyisihan Piutang Tak Tertag			
- Persediaan	995.727.979,69	662.520.467,33	50,29
- Belanja dibayar dimuka			
Aset Non lancar			
- Investasi Jangka Panjang			
- Aset Tetap	301.084.128.594,58	250.096.154.414,20	20,39
- Aset Lainnya	3.500.816.204,00	3.500.816.204,00	0

5.1.5.1. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lancar sebesar Rp 995.883.551,69. Bila dibandingkan dengan aset lancar tahun lalu yaitu sebesar Rp.662.520.467,33 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 333.363.084,36 Atau 50,32 %. Perubahan nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini

5.1.5.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Pada akhir tahun 2021 tidak terdapat uang di Kas di Bendahara Penerimaan. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara yang mengharuskan uang yang ada di bendahara penerimaan disetor paling lambat pada setiap akhir kerja. Tidak adanya nilai kas di Bendahara Penerimaan tahun ini sama dengan sebagaimana tahun 2020 yang lalu.

5.1.5.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran telah menyetorkan seluruh sisa uang persediaan pada akhir tahun 2021, sehingga tidak terdapat sisa uang Kas di Bendahara Pengeluaran. Sesuai amanah Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/6013/2569-IV/BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir

Tahun Anggaran 2021 dan Awal Tahun Anggaran 2022 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 , bendahara keuangan harus sudah menyetorkan sisa uangnya sebelum tanggal 31 Desember 2021. Tidak adanya nilai kas di Bendahara Pengeluaran tahun ini sama dengan sebagaimana tahun 2020 yang lalu.

Masih terdapat uang di Kas Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 155.572,00 Uang ini merupakan Uang STS yang Sudah di setor sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disebabkan Bank Penyetor salah menyetorkan ke bank kas kabupaten Uang tersebut telah disetor pada tanggal 3 Januari 2022 Kedepan akan diupayakan agar tidak terdapat lagi uang Kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun.

5.1.5.1.3. Kas di BLUD

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) PP Nomor 23 Tahun 2005, pengelolaan kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus ditujukan dan mampu meningkatkan layanan kepada masyarakat. Badan Layanan Umum Daerah merupakan unit pemerintah yang memiliki fleksibilitas, di mana pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan tidak perlu disetor ke kas daerah. Per 31 Desember 2021 terdapat uang kas di BLUD sebesar Rp. 0,00.

5.1.5.1.4. Kas Lainnya

Rekening kas lainnya merupakan rekening kas yang dipergunakan untuk menyajikan nilai kas di sekolah. Nilai kas di sekolah per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00

5.1.5.1.5. Piutang Pajak

Piutang pajak merupakan tunggakan pungutan pajak yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah. Nilai piutang pajak Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00

5.1.5.1.6. Piutang Retribusi

Piutang retribusi merupakan tunggakan pungutan retribusi yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah. Nilai piutang retribusi Per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,

5.1.5.1.7. Piutang Lainnya

Piutang lainnya merupakan tunggakan pungutan diluar pajak dan retribusi yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah. Nilai piutang lainnya Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00

5.1.5.1.8. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengalokasian cadangan yang dibentuk dari piutang pada tahun 2021 sebesar Rp. 0,00

5.1.5.1.9. Persediaan

Barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan ke masyarakat Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 995.727.979,69 bila dibandingkan dengan Persediaan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 662.520.467,33 , maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 333.363.084,36 atau 66,52 %. Hal ini dikarenakan ada persediaan yang diserahkan ke masyarakat.

Persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat pada tahun ini sebesar Rp 466.925.000,00 yang terdiri dari:

- Bahan/Bibit Tanaman

5.1.5.1.10. Belanja dibayar dimuka

Pada tahun 2020 Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membayar beberapa jasa atau fasilitas yang masa manfaatnya sampai dengan tahun 2021. Manfaat yang masih tersisa untuk tahun mendatang tersebut sebesar Rp 0.00 bila dibandingkan dengan belanja dibayar dimuka tahun lalu yaitu sebesar Rp. 0.00

5.1.5.2. Aset Non lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset non lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset non lancar sebesar Rp 419.068.463.083,58 Bila dibandingkan dengan aset non lancar tahun lalu yaitu sebesar Rp. 368.080.488.903,20 maka dapat diketahui terdapat kenaikan penurunan sebesar Rp. 50.987.974.180,38 Atau 87,83 %. Perubahan nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.2.1. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset non lancar yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat/pihak lain dan dipergunakan sendiri dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Pada tahun 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap sebesar Rp 419.068.463.083,58. Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp. 368.080.488.903,20, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 50.987.974.180,38 Atau 83,05 %. Perubahan nilai aset tetap tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

Tabel 16 Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 2021

Uraian	2020	Bertambah	Berkurang	2021	% Naik (Turun)
1	2	3	4	5=(2+3-4)	4=(5-23)
Aset Tetap	250.096.154.414,20			301.131.348.494,58	83,05
Tanah	26.242.247.872,17	-	11.250.000,00	26.230.997.872,17	0,042
Peralatan dan Mesin	227.464.223.770,50	38.591.275.690,98	-	266.055.499.461,48	14,50
Gedung dan Bangunan	103.390.163.789,53	10.902.174.056,40	-	114.292.337.845,93	9,53
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.268.000.044,00	1.059.481.576,00	-	7.327.481.620,00	16,90
Aset Tetap Lainnya	4.619.677.177,00	0,00	0	4.619.677.177,00	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	96.176.250,00	493.512.757,00	-	589.689.007,00	83,69
Akumulasi Penyusutan	-117.984.334.489,00	0,00	0	(117.984.334.489,00)	0

5.1.5.2.1.1. Tanah

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanah sebesar Rp 26.230.997.872,17 Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp. 26.242.247.872,17 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp. 11.250.000,00 Atau 100,04 %. Perubahan nilai tanah tersebut dapat dirincikan sebagai berikut

Pengurangan

Aset yang dimutasikan : Rp. 11.250.000,00

Aset yang dimutasikan ke Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah provinsi Kalimantan Timur pada UPTD Telake

5.1.5.2.1.2. Peralatan dan Mesin

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peralatan dan mesin sebesar Rp 266.055.499.461,48. Bila dibandingkan dengan peralatan dan mesin tahun lalu yaitu sebesar Rp. 227.464.223.770,50 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 38.591.275.690,98 atau 85,51 %. Perubahan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dirincikan sebagai berikut

Penambahan

Belanja Modal : Rp.39.043.139.314,98

Belanja Barjas Menjadi Aset Tetap : Rp. 452.694.870,00

BM Gedung dan Bangunan Menjadi Peralatan dan Mesin: Rp. 100.400.000,00

BM Aset Tetap Lainnya Menjadi Peralatan dan Mesin : Rp. 53.770.000,00

Keterangan

Dinas Kehutanan Belanja Modal Rp. 4.306.177.200,00, UPTD Tahura Bukit Soeharto Belanja Modal Rp. 53.000.000,00, UPTD KPHP Berau Barat Belanja Modal Rp. 1.476.130.950,00, Reklasifikasi Antar Aset Tetap Belanja Modal Gedung dan bangunan menjadi Peralatan dan Mesin (Drone) Rp. 89.600.000,00, UPTD KPHP Meratus Belanja Modal Rp. 2.012.500.200,00, Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset Tetap (Pengadaan Peralatan Kantor) Rp. 55.942.735,00. UPTD KPHP Kendilo Belanja Modal Rp. 764.612.736,00, Reklasifikasi Antar Aset Tetap Belanja Modal Gedung dan Bangunan Menjadi Peralatan dan Mesin Rp. 10.800.000,00, UPTD KPHP Santan Belanja Modal Rp. 74.812.000,00, UPTD KPHP Das Belayan Belanja Modal Rp. 876.765.900,00, Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset Tetap Rp. 47.219.900,00, UPTD KPHP Bengalon Belanja Modal Rp. 279.260.000,00, UPTD KPHP Batu Ayau Belanja Modal Rp. 2.735.603.392,00, Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset Tetap Drone Rp. 172.000.000,00, Kamera Aksi Rp. 20.839.500,00, Furniture Rp. 100.750.000,00, UPTD KPHL Batu Rook Belanja Modal Rp. 2.896.308.400,00, UPTD KPHP Berau Utara Belanja Modal Rp. 769.034.590,00, UPTD KPHP Berau Tengah Belanja Modal Rp. 588.516.629,00, UPTD KPHP Berau Pantai Belanja Modal Rp. 2.240.590.775,00, UPTD KPHP Manubar Belanja Modal Rp. 2.854.959.130,00, UPTD KPHP Kelinjau Belanja Modal Rp. 1.402.960.100,00, UPTD KPHP Delta Mahakam Belanja Modal Rp. 2.075.204.915,00, UPTD KPHP Damai Rp. 4.724.471.095,98, Reklasifikasi Antar Aset Tetap Rp. 53.770.000,00, UPTD KPHP Mook Manor Bulatn Belanja Modal Rp. 3.868.771.200,00, UPTD KPHP Telake Belanja Modal Rp. 2.012.500.200,00, Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset Tetap (Pengadaan/Peralatan

Kantor) Rp. 55.942.735,00, UPTD KPHL Balikpapan Belanja Modal 2.717.483.500,00

Pengurangan

Nilai dibawah Kapitalisasi	: Rp.	359.971.118,00
BM tidak Menjadi Aset	: Rp.	266.885.500,00
BM Reklas ke Barjas	: Rp.	117.889.000,00
Reklas Peralatan dan Mesin Menjadi JIJ	: Rp.	130.000.000,00

Keterangan :

UPTD KPHP Berau barat Belanja Modal Reklas Kea rang dan jasa Hardisk 6 Buah Rp. 5.244.000,00, Pengadaan Helm dan Sepatu Rp. 69.690.000,00, Sleeping Bag Rp. 13.200.000,00, Masker Rp. 29.775.000,00 dan Ekstrakom Rp. 6.120.000,00, UPTD KPHP Bongan Ekstrakomp Rp. 20.720.000,00 dan Reklasifikasi antar Aset Tetap Belanja Modal Peralatan dan Mesin Menjadi Jalan Irigasi dan Jaringan (Pembuatan Sumur) Rp. 130.000.000,00, UPTD KPHP Meratus Ekstrakom Rp. 38.973159,00, UPTD KPHP Bengalon Ekstrakom 2021 (alat ukur) (CCTV) Rp. 19.550.000,00, UPTD KPHP Batu Ayau Belanja Modal Tidak menjadi asset Tetap Rp. 99.715.000,00, UPTD KPHL Batu Rook Belanja Modal tidak menjadi set Tetap (Baterai Drone) Rp. 17.900.000,00, Ekstrakomtable 2021 Rp. 21.962.500,00, UPTD KPHP Berau Utara Belanja Modal tidak menjadi asset (Kursi rapat) Rp. 9.990.000,00, Masker Rp. 17.600.000,00, UPTD KPHP Berau Tengah Ekstrakomp Rp. 9.880.000,00, UPTD KPHP Berau Pantai Ekstrakomp Rp. 10.120.200,00, UPTD KPHP Manubar Nilai Ekstrakomp Rp. 1.250.000,00, UPTD KPHP Delta Mahakam Ekstrakomp Rp. 4.620.000,00, UPTD KPHP Damai Ekstrakomtable Rp. 164.489.600,00, Belanja Modal Tidak menjadi Aset Tetap Slepings Bag Rp. 12.540.000,00, Thermometer Rp. 2.100.000,00, Masker Debu Rp. 36.630.000,00, UPTD KPHP Mook Manor Bulatn Ekstrakomtable 2021 Rp. 6.935.000, Belanja Modal Tidak emnjadi asset Tetap Rp. 24.948.000,00, UPTD KPHP Telake Ekstrakomp Rp. 38.973.159,00, UPTD KPHL Balikpapan Eksatrakomtable Rp. 38.340.000,00, Belanja Modal Tidak menjadi Aset Tetap (Personal Use/Sleeping Bag) Rp. 15.400.000,00.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset peralatan dan mesin dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan peralatan dan mesin yang bernilai Rp. 1.500.000 keatas.

- Nilai pemeliharaan peralatan dan mesin yang bernilai Rp. 1.500.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

Atas peralatan dan mesin yang nilai perolehannya sebesar Rp. 1.500.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (extracountable). Per 31 Desember 2021 nilai peralatan dan mesin yang termasuk dalam extracountable sebesar Rp. 359.971.118,00 Bila dibandingkan dengan peralatan dan mesin extracountable tahun lalu yaitu sebesar Rp. 109.718.401,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 250.252.717,00 atau 30,47 %.

5.1.5.2.1.3. Gedung dan Bangunan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki gedung dan bangunan sebesar Rp 114.292.337.845,93 Bila dibandingkan dengan gedung dan bangunan tahun lalu yaitu sebesar Rp.103.390.163.789,53 maka dapat diketahui terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp. 10.902.174.056,40. Atau 9,53 %. Perubahan nilai gedung dan bangunan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut

Penambahan

- Belanja Modal : Rp. 11.698.734.190,40
- Belanja barjas Menjadi Aset Tetap : Rp 231.870.000,00
- Aset yang dimutasikan : Rp. 402.504.000,00

Keterangan

UPTD KPHP Berau Barat Belanja Modal Rp. 370.584.880,00, Belanja modal Menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Pekerjaan Lantai Parkir dan kamopi) Rp. 199.000.000,00, UPTD KPHP Bongan Belanja Modal Rp. 198.414.000,00, UPTD KPHP Kendilo Belanja Modal Rp. 1.419.541.225,00, Barang dan jasa menjadi asset tetap (jasa konsultasi pengawasan pembangunan gedung display, rehab gudang peralatan, rehab mess jaga patrol dan pembangunan pagar kantor Rp. 29.810.000,00, UPTD KPHP Bengalon Belanja Modal Rp. 4.451.353.052,00, UPTD KPHP Berau Utara Belanja Modal Rp. 352.713.000,00, UPTD KHPP Berau Tengah Belanja Modal Rp. 713.716.051,00, Reklas dari barjas menjadi asset tetap Rp. 13.570.000,00, UPTD KPHP Berau Pantai Belanja Modal Rp. 813.477.282,00, UPTD KPHP Manubar Dropping dari UPD KPHP Bangalon (Gudang) Rp. 313.543.714,00, Dropping dari UPTD KPHP Bengalon (Tempat Parkir) Rp. 347.685.936,00, UPTD KPHP Kelinjau Belanja Modal Rp. 844.683.974,00 , Belanja barang dan Jasa Menjadi Aset Tetap Rp. 3.060.000,00, UPTD KPHP Delta Mahakam Belanja Modal Rp. 252.427.000,40,

UPTD KPHP Damai Rp. 885.014.846,00, Mutasi Gedung dan Bangunan dari UPTD KPHP Batu Ayau Berdasarkan Surat Permohonan Mutasi asset pada UPTD KPHP Batu Ayau No. 028/2151/DK-I/2021 Rp.402.504.000,00, UPTD KPHP Mook Manor Bulatn Rp. 1.201.166.880, UPTD KPHL Balikpapan Belanja Modal Rp. 197.642.000,00.

Pengurangan

- Aset yang dimutasikan : Rp. 1.790.503.301,00
- BM Gedung dan bangunanke Perlatan dam Mesin : Rp. 100.400.000,00
- BM Gedung dan bangunan ke KDP : Rp. 1.167.545.757,00
- Reklas dari Barjas menjadi asset tetap : Rp. 13.570.700,00
- Reklas gedung dan bangunana menjadi JIJ : Rp. 519.921.076,00

Keterangan

UPTD KPHP Berau Barat Reklasifikasi Antar Aset Tetap Belanja Modal Geung dan Bangunan Mnjadi Peraltan dan Mesin (Drone) Rp. 89.600.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan menjadi Konstruksi dalam pekerjaan Jasa konsultan Perencanaan Pembangunan Resort Segah Rp. 73.994.550,00, Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Workshop Karhutla Rp. 71.269.550,00, Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Pengembangan Perhutanan Sosial Rp. 65.769.550,00, UPTD KPHP Meratus Aset yang dimutasikan ke Dinas Perindustrian, perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah provinsi Kalimantan timur Rp. 32.770.000,00, UPTD KPHP Kendilo Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Menjadi Perlatan dan Mesin Rp. 10.800.000,00, UPTD KPHP Bengalon Mutasi antar Aset Bangunan (UPTD KPHP Manubar) Rp. 661.229.651,00, Reklasifikasi antar asset tetap Gedung dan Bangunan Menjadi Jalan Irigasi dan jaringan Rp. 519.921.076,00, UPTD KPHP Batu Ayau Mutasi Gedung dan Bangunan permohonan Mutasi Aset pada UPTD KPHP Batu Ayau No. 028/2151/DK-I/2021 Tanggal 7 Juni 2021 Rp. 402.504.000,00, UPTD KPHP Berau Pantai Reklasifikasi antar asset tetap Belanja Modal Gedung dan Bangunan Menjadi Konstruksi dalam Pengerjaan (Perencanaan Pembangunan Resort UPTD KPHP Berau Pantai (1 Kegiatan) Rp. 92.161.107,00, UPTD KPHP Kelinjau Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke kKonstruksi dalam Pengerjaan (DED Gudang dan Gedung Parkir Kendaraan) Rp. 86.515.000,00, UPTD KPHP Telake Aset yang dimutasikan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Rp. 32.770.000,00,

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset gedung dan bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan gedung dan bangunan yang bernilai Rp. 20.000.000 keatas.
- Nilai pemeliharaan gedung dan bangunan yang bernilai Rp. 50.000.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

Atas gedung dan bangunan yang nilai perolehannya sebesar Rp. 20.000.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (ekstracountable). Per 31 Desember 2021 nilai gedung dan bangunan yang termasuk dalam ekstracountable sebesar Rp. 0.00. Bila dibandingkan dengan gedung dan bangunan ekstracountable tahun lalu yaitu sebesar Rp. 0,00, maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penurunan

5.1.5.2.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 7.327.481.620,00 Bila dibandingkan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 6.268.000.044, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 1.059.481.576,00 Atau 16,90 %. Perubahan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut

Penambahan

- Belanja Modal	: Rp.	152.130.000,00
- Reklas Gedung dan bangunan Ke JIJ	: Rp.	519.921.076,00
- Reklas Peralatan dan Mesin Ke JIJ	: Rp.	130.000.000,00
- Belanja barjas Menjadi Aset Tetap JIJ	: Rp.	257.430.500,00

Keterangan

UPTD KPHP Bongon Reklasifikasi antar aset tetap Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Jalan Irigasi dan Jaringan Rp. 130.000.000,00, UPTD KPHP Bengalon Rp. 152.130.000,00, Reklasifikasi antar Aset Tetap Gedung dan Bangunan menjadi Jalan Irigasi dan Jaringan Rp 519.921.076,00, UPTD KPHP Kelinjau Belanja barang dan Jasa Menjadi asset Tetap Rp. 257.430.500

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bernilai Rp. 50.000.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.
- Atas gedung dan bangunan yang nilai pemeliharaannya sebesar Rp. 20.000.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (ekstracountable). Per 31 Desember 2021 nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang termasuk dalam ekstracountable sebesar Rp.0,00 maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penurunan

5.1.5.2.1.5. Aset Tetap Lainnya

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 4.619.677.177,00 Bila dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp. 4.619.677.177,00 maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penurunan

5.1.5.2.1.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp 589.689.007,00 Bila dibandingkan dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 96.176.250,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 493.512.757,00 Atau 83,69 %. Perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut

Penambahan

- BM Gedung dan Bangunan Menjadi KDP : Rp. 388.909.757,00
- Barjas Menjadi Aset Tetap : Rp. 30.738.000,00

Keterangan

UPTD KPHP Berau Barat Reklasifikasi antar asset tetap Belanja Modal Gedung dan Bangunan menjadi Konstruksi dalam pekerjaan Jasa konsultan Perencanaan Pembangunan Resort Segah Rp. 73.994.550,00, Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Workshop Karhutla Rp. 71.269.550,00, Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Pengembangan Perhutanan Sosial Rp. 65.769.550,00. UPTD KPHP Berau Utara Reklas dari Barang dan jasa menjadi asset tetap belanja jasa konsultan perencanaan pembangunan pagar Rp. 18.218.000,00, Belanja jasa Konsultan Perencanaan Rehabiltasi Ringan Bangunan Rumah Negara Rp. 12.500.000,00, UPTD KPHP Berau Pantai Reklasifikasi antar asset tetap Belanja Modal Gedung dan Bangunan Menjadi Konstruksi daalam pengerjaan (Perencanaan Pembangunan Resort UPTD KPHP Berau Pantai (1 Kegiatan) Rp. 92.161.107,00

5.1.5.2.1.7. Akumulasi Penyusutan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyisihkan penyusutan setiap tahunannya atas hilangnya manfaat ekonomik aset tetap yang dimiliki. Akumulasi penyusutan ini berfungsi sebagai acuan kapan waktu yang ideal untuk dilakukan penggantian aset tetap. Pada akhir tahun 2019 akumulasi penyusutan atas aset tetap Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur belum bisa disajikan karena belum melakukan perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

5.1.5.2.2. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Pada tahun 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lainnya sebesar Rp. 3.500.816.204,00. Bila dibandingkan dengan aset lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp. 3.500.816.204,00, maka tidak terdapat kenaikan/ penurunan. Perubahan nilai aset lainnya tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.2.2.1. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya adalah kas yang hanya dapat digunakan untuk suatu tujuan tertentu atau dapat berubah menjadi kas (aset lancar) bila persyaratannya telah terpenuhi. Pada tahun 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Kas yang Dibatasi Penggunaannya

5.1.5.2.2.2. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Pada tahun 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tidak Berwujud.

- Software

Pada tahun 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tidak berwujud yaitu software sebesar Rp. 75.000.000,00. Bila dibandingkan dengan Aset tidak berwujud yaitu software sebesar Rp. 75.000.000,00, maka tidak terdapat kenaikan/ penurunan.

- Aset Tidak Berwujud Lainnya

Pada tahun 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tidak berwujud lainnya sebesar Rp. 165.790.000,00 Bila dibandingkan dengan Aset tidak berwujud yaitu software sebesar Rp. 165.790.000,00, maka tidak terdapat kenaikan/penurunan.

5.1.5.2.2.3. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan kedalam aset lancar ataupun aset tetap atau aset lainnya. Aset yang termasuk dalam kategori ini meliputi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Aset Rusak Berat

Pada tahun 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap yang kondisinya rusak berat/Hilang/Lainnya sebesar Rp. 2.318.846.204,00 Bila dibandingkan dengan Aset Rusak Berat tahun lalu yaitu sebesar Rp. 2.318.846.204,00 , maka tidak terdapat kenaikan/ penurunan.

- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Pada tahun 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp. 1.181.970.000,00 Bila dibandingkan dengan Aset yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp. 1.181.970.000,00, maka tidak terdapat kenaikan/penurunan.

- Kredit Bibit Bergulir

Pada tahun 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Kredit Bibit Bergulir sebesar Rp. 0,00 Kredit Bibit Bergulir ini merupakan kredit yang Bila dibandingkan dengan Kredit Bibit Bergulir tahun lalu yaitu sebesar Rp. 0,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %.

- Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat

Rekening ini merupakan akumulasi penyusutan atas aset-aset dalam kondisi rusak berat. Pada akhir tahun 2021 terdapat Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat sebesar Rp. 0,00 Bila dibandingkan dengan Kredit Bibit Bergulir tahun lalu yaitu sebesar Rp. 0,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %.

5.1.6. Kewajiban

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi bernilai Rp.30.287.873,00 per 31 Desember 2021.

Pada akhir tahun 2021 terdapat kewajiban sebesar Rp. 30.287.873,00. Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun lalu yaitu sebesar Rp. 19.579.087,00, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 10.708.786,00 atau 64,43 %. Penjelasan atas kenaikan/penurunan masing-masing obyek rekening kewajiban dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.6.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00. Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun lalu yaitu sebesar Rp. 0,00, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %.

5.1.6.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima pembayarannya namun jasa atau barang belum diberikan ke masyarakat atau pihak lain. Pada akhir tahun 2021 terdapat Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp.0,00. Bila dibandingkan dengan Pendapatan Diterima Dimuka tahun lalu yaitu sebesar Rp.0,00, maka dapat diketahui terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %.

5.1.6.3. Utang Beban

Utang beban merupakan utang yang timbul akibat telah diterimanya layanan atau jasa namun belum dibayar atau dilunasi tagihannya. Pada akhir tahun 2021 terdapat Utang beban sebesar Rp. 30.287.873,00. Bila dibandingkan dengan Utang beban tahun lalu yaitu sebesar Rp. 19.579.087,00, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 10.708.786,00 atau 64,43 %.

5.1.7. Ekuitas

Kekayaan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2020 sebesar Rp.254.239.911.998,53. Nilai ini secara matematikatis merupakan selisih lebih dari aset atas kewajiban. Pada akhir tahun 2021 terdapat ekuitas sebesar Rp. 305.597.760.377,27. Bila dibandingkan dengan ekuitas tahun lalu yaitu sebesar Rp. 254.239.911.998,53 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 51.357.848.378,74 atau 83,19 %.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Struktur Organisasi

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jl. Kesuma Bangsa, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur Dalam melaksanakan tugas pelayanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki sejumlah UPTD/B sebagai unit teknis yang langsung berhadapan dengan masyarakat saat pelayanan. UPTD/B tersebut beralamat sebagai berikut:

- UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.

UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto memiliki wilayah/cakupan kerja yang meliputi Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Kantor beralamat di Jl. Biola Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Dadi Mulya kota Samarinda.

- UPTD KPHP Berau Barat.

UPTD KPHP Berau Barat dengan luas wilayah/ cakupan kerja adalah 786.021 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 234.305 Ha; Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 431.506 Ha; dan Hutan Produksi Tetap (HP) Seluas 114,210 Ha. Secara cakupan administrasi pemerintahan UPTD KPHP Berau Barat terletak dalam 4 wilayah administrasi pemerintahan kecamatan dari 13 wilayah kecamatan di kabupaten Berau. Kantor beralamat di Jln. Pemuda no. 22 kode pos 77311 Kab. Berau Kalimantan Timur

- UPTD KPHP Bongon

UPTD KPHP Bongon dengan luas wilayah/ cakupan kerja adalah 335.745,59 Ha. Secara administrasi pemerintahan terletak dalam 3 wilayah Kabupaten, yaitu : Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Uatara dan Kabupaten Paser. Wilayah kerja KPHP Bongon berada pada 7 Kecamatan dan 26 desa/kampung. Kantor teletak Jl. Ahmad Yani No 1, Kel Klandasan Ilir, Balikpapan.

- UPTD KPHP Meratus

UPTD KPHP Bongon dengan luas wilayah/ cakupan kerja adalah penetapan Wilayah KPHP Meratus lintas 5 Kabupaten/Kota yaitu Kabuaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser

Utara dan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang luasnya 387.488 ha. Dengan terbitnya SK.554/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, kemudian disesuaikan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 674/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur sehingga Luas KPHP Meratus berdasarkan hasil tata batas adalah 368.955 ha yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 1.371,70 ha; Hutan Produksi (HP) seluas 252.931,15 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 113.277,24 ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 1.374,41 ha. Kantor beralamat Jl. Marsma R Iswahyudi KM 10 Balikpapan.

➤ UPTD KPHP Kendilo

UPTD KPHP Kendilo dengan wilayah/ cakupan kerja meliputi Kawasan Hutan Das Sungai Kendilo dan Telake beralamat di Jl. Jendral Sudirman KM. 1 No. 09 Tanah Grogot Kabupaten Paser.

➤ UPTD KPHP Santan

UPTD KPHP Santan Luas dengan wilayah/ cakupan kerja didasarkan Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SK.674/Menhut-II/2011, Tanggal 1 Desember 2011 yaitu seluas 270.557 Ha. Kemudian disesuaikan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 718/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara dan peta perkembangan tata batas oleh BPKH wilayah IV Samarinda, sehingga Luas KPHP Santan adalah 267.068 Ha. Kantor beralamat Jl. Bangries No. 03 Samarinda 75125.

➤ UPTD KPHP Das Belayan

Penetapan Wilayah KPHP Sub DAS Belayan Sebagai KPH oleh Menteri Kehutanan, melalui surat Nomor : SK. 674/Menhut-II/2011 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur. KPHP Sub DAS Belayan mempunyai luas 1.033.151 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung ± 209.813,72 Ha; Hutan Produksi Terbatas (HPT) ± 531.382,49 Ha; Hutan Produksi Tetap (HP) ± 272.938,59 Ha; dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) ± 19.016,19 Ha. Kantor beralamat MT Haryono No. 30 Samarinda.

➤ UPTD KPHP Bengalon

UPTD KPHP Bengalon dengan wilayah/cakupan kerja meliputi 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Kabuapten Kutai Timur Sangatta.

➤ UPTD KPHP Batu Ayau

UPTD KPHP Batu Ayau beralamat di Jl. Ahmad Yani RT.11 Kecamatan Melak Kelurahan Melak Ulu Kabupaten/Kota Kutai Barat.

➤ UPTD KPHP Batu Rook

UPTD KPHP Batu Rook beralamat di Jl. Ahmad Yani RT.11 Kecamatan Melak Kelurahan Melak Ulu Kabupaten/Kota Kutai Barat

➤ UPTD KPHP Berau Utara

UPTD KPHP Berau Utara beralamat di Jl. Anggur Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau

➤ UPTD KPHP Berau Tengah

UPTD KPHP Berau Tengah beralamat di Jl. Anggur Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau

➤ UPTD KPHP Berau Pantai

UPTD KPHP Berau Pantai beralamat di Jl. Anggur Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau

➤ UPTD KPHP Manubar

UPTD KPHP Manubar dengan wilayah/cakupan kerja meliputi 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Kabuapten Kutai Timur Sangatta.

➤ UPTD KPHP Kelinjau

UPTD KPHP Kelinjau dengan wilayah/cakupan kerja meliputi 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Kabuapten Kutai Timur Sangatta.

➤ UPTD KPHP Delta Mahakam

UPTD KPHP Delta Mahakam beralamat di Jl. MT. Haryono No. 30 Samarinda.

➤ UPTD KPHP Damai

UPTD KPHP Damai beralamat di Jl. Ahmad Yani RT.11 Kecamatan Melak Kelurahan Melak Ulu Kabupaten/Kota Kutai Barat

- UPTD KPHP Mook Manor Bulatn

UPTD KPHP Mook Manor Bulatn beralamat di Jl. Ahmad Yani RT.11 Kecamatan Melak Kelurahan Melak Ulu Kabupaten/Kota Kutai Barat.

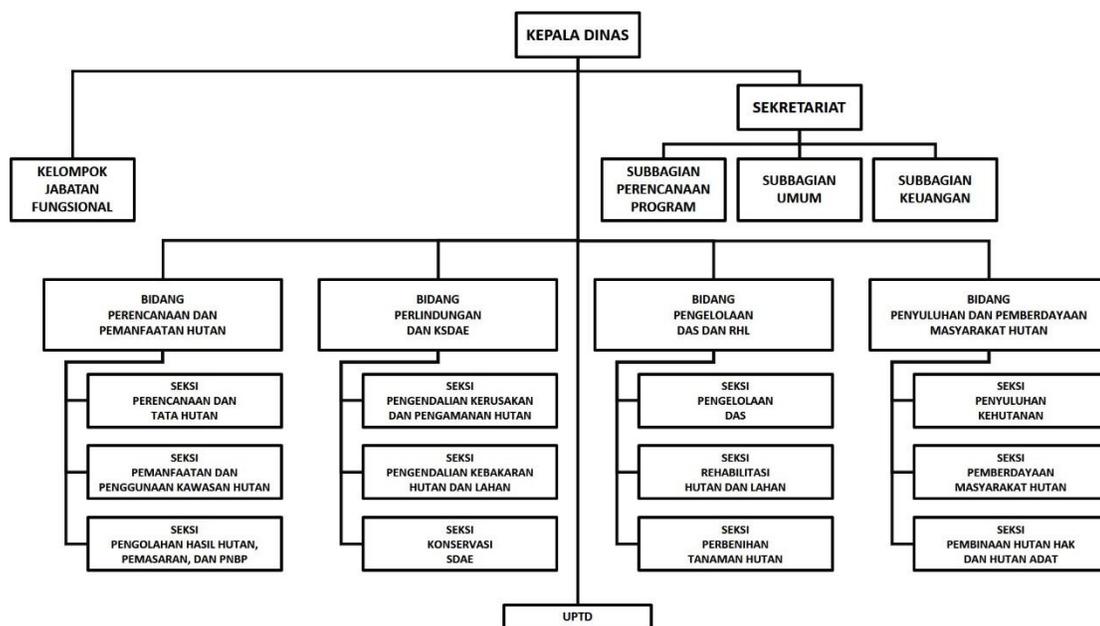
- UPTD KPHP Telake

UPTD KPHP Telake beralamat di Jl. Provinsi KM 25, kelurahan aru, Kecamatan Waru Kabupaten penajam Paser Utara.

- UPTD KPHP Balikpapan

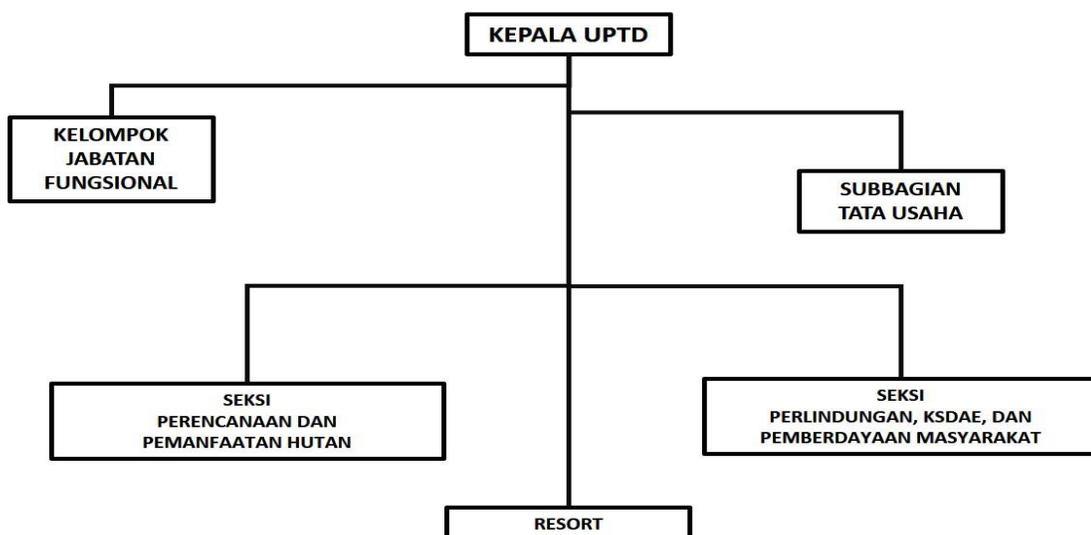
UPTD KPHP Balikpapan beralamat di Kelurahan Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

Demi menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antarpersonil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab maka dibentuklah struktur organisasi sebagaimana yang telah disahkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur secara garis besar terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris Dinas yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian (Perencanaan Program, Umum, dan Keuangan) serta 4 (Empat) Bidang yang masing – masing terdiri atas 3 (tiga) Seksi. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat disajikan bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebgai berikut.



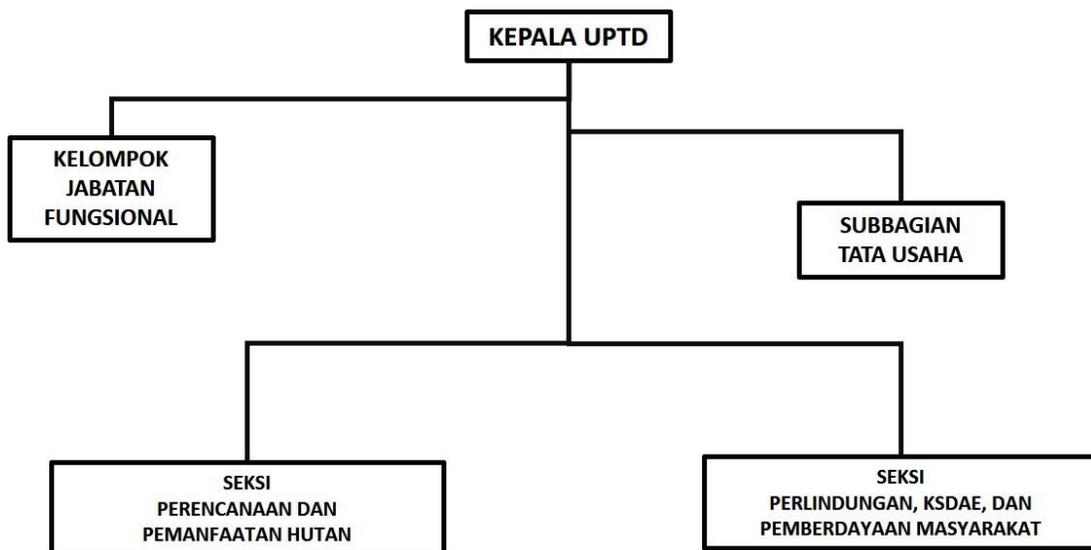
Gambar II-1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 69 Tahun 2016

Sementara berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016, tidak ada perbedaan struktur organisasi untuk keseluruhan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan, baik Produksi (KPHP) maupun Lindung (KPHL) Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dibantu Kepala Subbagian Tata Usaha serta Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat. Meskipun demikian, mempertimbangkan luas wilayah kelola UPTD KPH, maka jika dibutuhkan dapat dibentuk resort-resort untuk efektivitas kegiatan di lapangan, yang pelaksanaannya terdiri atas tenaga non struktural (Gambar II-2).



Gambar II-2. Struktur Organisasi UPTD KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016

Sedikit berbeda dengan struktur organisasi KPH, UPTD Tahura Bukit Soeharto tidak dilengkapi dengan resort-resort. Kepala UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto hanya dibantu Kepala Subbagian Tata Usaha dan 2 (dua) Seksi Pendukung yakni Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan Seksi Perlindungan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya (KSDAE), dan Pemberdayaan Masyarakat (Gambar II-3).



Gambar II-3. Struktur Organisasi UPTD Tahura Bukit Soeharto pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016

Masing-masing pihak yang termuat dalam struktur organisasi diatas memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam kegiatan operasional layanan. Penjabaran tugas dan fungsi pihak-pihak tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada subbab tugas dan fungsi.

6.2 Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi, hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*. Tugas dan fungsi masing-masing dinas dan UPTD/B dijabarkan sebagai berikut:

- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tugas yang mejadi tanggungjawab Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah tugas pokok secara struktural dijalankan oleh 12 Seksi yang berada dalam 4 Bidang, serta operasionalisasinya juga dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Secara lebih detil, tugas pokok unit-unit kerja tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan.

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan bertugas: (1) merumuskan kebijakan teknis; (2) memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan, pada kegiatan tata hutan, rencana pengelolaan hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kecuali Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), serta pemanfaatan hutan. Bidang ini membawahi 3 (tiga) Seksi dengan tugas masing-masing dijabarkan sebagai berikut:

a. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan:

- Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi, bimbingan teknis, dan evaluasi penatagunaan hutan, penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan promosi, investasi, kerjasama dan kemitraan, kelembagaan KPH, dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumberdaya hutan provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah provinsi.

b. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan:

- Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi di wilayah provinsi;

- Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada kawasan hutan produksi di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin penggunaan kawasan untuk kepentingan non kehutanan;
 - Menyiapkan bahan dalam pemberian pertimbangan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah provinsi.
- c. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak:
- Menyiapkan bahan dalam penilaian dan evaluasi perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun, dan perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam pengendalian dan pengawasan sumber bahan baku, penatausahaan dan peredaran pengolahan hasil hutan kayu dari industri primer hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan dan tertib peredaran hasil hutan di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan data dan bahan dugaan pelanggaran dan penyelesaiannya terhadap pelanggaran administratif usaha bidang kehutanan;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka pengenaan sanksi administratif pelanggaran usaha kehutanan;
2. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya.
- Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya bertugas: (1) merumuskan kebijakan bersifat teknis; (2) memberikan pelayanan administrasi dan regulasi, pelaksanaan perlindungan hutan di Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP); (3) perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Tahura lintas Kabupaten/Kota; (4) perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*Appendix*) CITES; (5) pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Bidang ini terdiri atas 3 (tiga) Seksi dengan tugas masing-masing sebagai berikut:
- a. Seksi Pengendalian dan Pengamanan Hutan:

- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengamanan hutan pada kawasan hutan dan penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pelatihan perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pembentukan forum/lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan.
- b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan:
- Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka pembentukan forum kolaboratif pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka pembangunan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
 - Monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan Tahura Kabupaten/Kota.
- c. Seksi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya:
- Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (Tahura) yang berada pada lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - Menyiapkan bahan dalam pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk *Appendix* CITES;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka identifikasi areal dan pihak terkait dalam kawasan bernilai konservasi tinggi, pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, serta pembentukan forum kolaborasi perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi;

- Monitoring dan evaluasi perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
3. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mempunyai tugas pokok: (1) merumuskan kebijakan teknis; (2) memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pengelolaan DAS di provinsi dan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; dan (3) melaksanakan evaluasi mitigasi iklim dan emisi gas rumah kaca (GRK) urusan kehutanan. Bidang ini terdiri atas 3 (tiga) Seksi dengan tugas-tugas yang dijabarkan masing-masing sebagai berikut:
- a. Seksi Pengendalian Daerah Aliran Sungai:
- Menyiapkan bahan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS, pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka pembentukan forum pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengelolaan DAS.
- b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan:
- Menyiapkan bahan dalam rangka Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara;
 - Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan melalui penghijauan (hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan rehabilitasi di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/ pesisir;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah provinsi;

- Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan penyusunan standar, kriteria, pedoman, prosedur, petunjuk teknis terkait kegiatan mitigasi emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi perencanaan aksi mitigasi iklim pada urusan kehutanan termasuk KPH;
 - Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan mitigasi iklim dan tingkat emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan.
- c. Seksi Pembenihan Tanaman Hutan:
- Menyiapkan bahan dalam rangka penetapan areal lokasi sumber daya genetik, perbenihan tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan bahan bimbingan dan evaluasi pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, dan sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah provinsi.
4. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan.
- Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan mempunyai tugas pokok: (1) merumuskan kebijakan bersifat teknis; (2) memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan, kegiatan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat, perhutanan sosial, dan promosi mitigasi iklim. Bidang ini terdiri atas 3 (tiga) Seksi dengan tugas masing-masing sebagai berikut:
- a. Seksi Penyuluhan Kehutanan:
- Menyiapkan bahan dalam rangka penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program dan materi penyuluhan di bidang kehutanan dalam provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam provinsi;
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan;
 - Menyiapkan bahan dalam promosi upaya mitigasi iklim urusan kehutanan kepada seluruh pemangku kepentingan.
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hutan:

- Menyiapkan bahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal kerja dan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan) dalam provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial dalam provinsi;
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dalam provinsi.
- c. Seksi Pembinaan Hutan Hak dan Hutan Adat:
- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat, dan pengelolaan hutan adat, serta penanganan konflik tenurial;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dan pengembangan kerjasama/kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam provinsi;
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan hutan adat dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam provinsi.
5. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
- Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bertugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan hutan produksi (KPHP) dan/atau lindung (KPHL). Kepala UPTD KPH membawahi 2 (dua) seksi dengan tugas masing-masing sebagai berikut:
- a. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan:
- Pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan hutan produksi dan/atau hutan lindung.
- b. Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat:
- Pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya serta pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan produksi dan/atau hutan lindung.

6. UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kehutanan Kaltim dalam penataan dan pengelolaan kawasan Tahura Bukit Soeharto yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Kepala UPTD Tahura Bukit Soeharto membawahi 2 (dua) Seksi dengan tugas sebagai berikut:

a. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan:

- Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan taman hutan raya.

b. Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat:

- Pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya serta pemberdayaan masyarakat di kawasan taman hutan raya.

Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki 8 (delapan) fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan di provinsi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di provinsi, yaitu meliputi: tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL); rencana pengelolaan KPHP dan KPHL; pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; pengolahan hasil hutan kayu; dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kepentingan religi;
3. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem di provinsi, meliputi: perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan Tahura lintas Kabupaten/Kota; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi; dan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
4. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di provinsi;

5. Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Kabupaten/Kota dan dalam Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi;
6. Pelaksanaan koordinasi dan kebijakan kehutanan di provinsi dengan instansi terkait lainnya di bidang kehutanan dan non bidang kehutanan;
7. Pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Gubernur.

Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya dijabarkan secara rinci dalam fungsi masing-masing Bidang sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Kaltim No. 69 Tahun 2016, serta fungsi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Tahura Bukit Soeharto sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016 dengan penjabaran fungsi dimaksud sebagai berikut:

1. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Guna menjalankan tugas-tugas pokoknya sesuai peraturan perundangan yang berlaku, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) provinsi;
- b. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan promosi, investasi, kerjasama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) provinsi;
- c. Penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
- d. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi pada wilayah provinsi;
- e. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah provinsi;

- f. Pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah provinsi;
 - g. Pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah provinsi;
 - h. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah provinsi;
 - i. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan dalam wilayah provinsi;
 - j. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu;
 - k. Penyiapan penyelesaian sanksi terhadap pelanggaran administratif di bidang kehutanan di wilayah provinsi.
2. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya
- Guna menyelenggarakan tugas-tugas pokoknya, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya memiliki fungsi:
- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
 - b. Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan Taman Hutan Raya (Tahura) lintas Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan;
 - c. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan dan pengendalian dalam rangka pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam daftar lampiran (*Appendix*) CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*/Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam);
 - d. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka

alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi di provinsi.

3. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Guna menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) memiliki fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah provinsi;
 - b. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, dan evaluasi rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/ penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah provinsi;
 - c. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan di dalam provinsi;
 - d. Menyusun standar, kriteria, pedoman, prosedur, petunjuk teknis kegiatan mitigasi emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan;
 - e. Melaksanakan koordinasi perencanaan aksi mitigasi perubahan iklim pada urusan kehutanan termasuk KPH;
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan mitigasi perubahan iklim dan tingkat emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan.
4. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan
Guna melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan memiliki fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan bidang kehutanan dalam wilayah provinsi;
 - b. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, kemitraan kehutanan dalam provinsi;
 - c. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan perhutanan sosial yang meliputi: Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam provinsi;

- d. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam provinsi;
 - e. Melaksanakan promosi upaya-upaya mitigasi perubahan iklim pada urusan kehutanan kepada seluruh pemangku kepentingan.
5. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan
- Guna melaksanakan tugas pokoknya, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan baik Produksi (KPHP) maupun Lindung (KPHL) menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan tata hutan pada wilayahnya;
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
 - d. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi;
 - e. Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam;
 - f. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan hingga pengendalian;
 - g. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan;
 - h. Pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan;
 - i. Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan;
 - j. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
 - k. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan pengelolaan hutan;
 - l. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - m. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. UPTD Tahura Bukit Soeharto
- Guna melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, UPTD Tahura Bukit Soeharto menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan rencana teknis operasional penataan dan pengelolaan Tahura;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional penataan dan pengelolaan Tahura;

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penataan dan pengelolaan Tahura;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

➤ UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.

Tugas pokok UPTD Tahura Bukit Soeharto yaitu melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan Tahura lintas Kabupaten/Kota dan melaksanakan urusan ketatausahaan. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Berau Barat

Tugas UPTD KPHP Berau Barat adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, KPHP Berau Barat selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Bongan

Tugas UPTD KPHP Bongan adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, KPHP Bongan selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Meratus

Tugas UPTD KPHP Meratus adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, KPHP Meratus selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Kendilo

Tugas UPTD KPHP Kendilo adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, KPHP Kendilo selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Santan.

Tugas UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Das Belayan

Tugas UPTD KPHP Das Belayan adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, UPTD KPHP Das Belayan selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Bengalon

Tugas UPTD KPHP Bengalon adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, UPTD KPHP Bengalon selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Batu Ayau

Tugas UPTD KPHP Batu Ayau adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, UPTD KPHP Batu Ayau selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada *peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki*. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam

pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

6.3 Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diberikan berbagai sumber daya yang dapat dipergunakan untuk menjalankan layanan. Diantara sumber daya yang ada, sumber daya manusialah yang paling memiliki peranan penting. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan serta jabatan, maka sumber daya manusia di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 17 Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil Tahun 2019

Jabatan	Pendidikan							
	S3	S2	S1	D IV	D III	SMA	SMP	SD
Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	-
Kepala Bidang	-	3	-	-	-	-	-	-
Kepala UPTD	-	16	2	-	-	-	-	-
Kepala Sub Bidang	-	32	39	-	-	-	-	-
Staf	-	22	201	-	70	199	12	6
Jumlah		74	242	-	70	199	12	6

Masing-masing personil senantiasa dituntut untuk memperbarui pengetahuan teknisnya baik dalam hal keterampilan pendukung, terlebih lagi pengetahuan terhadap peraturan-peraturan terbaru serta teknologi informasi.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan danantisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Semoga Allah *سبحانه و تعالی* meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Samarinda, Januari 2020
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur ,

DRS. H. AMRULLAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19611214 198703 1 010

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I	SPJ Fungsional per 31 Desember 2019
Lampiran II	Register SP2D s.d 31 Desember 2019 terdiri dari LS, GU, TU, TU/GU NIHIL
Lampiran III	Rekap Pengembalian sisa belanja selama tahun 2019 (yang telah diotorisasi)
Lampiran IV	Foto copy STS Pengembalian belanja sesuai rekap
Lampiran V	SK Pensiun Pegawai pada tahun 2019
Lampiran VI	Berita Acara rekonsiliasi Pendapatan s.d 31 Desember 2019 (jika terdapat Pendapatan)
Lampiran VII	Berita Acara rekonsiliasi Belanja s.d 31 Desember 2019
Lampiran VIII	Perjanjian Kerjasama dengan Pihak ketiga yang menghasilkan Pendapatan (jika ada)
Lampiran IX	Perjanjian Kerjasama dengan Pihak ketiga atau Kontrak Belanja yang menghasilkan Aset Tidak Berwujud (jika ada)
Lampiran X	Rekap tagihan Belanja tahun 2019 yang ditagih / dibayar tahun 2020 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XI	Rekap Pendapatan-LO hasil retribusi & pendapatan lainnya selain pajak tahun 2019 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XII	Rekening koran Bendahara Pengeluaran SKPD/UPTD per 31 desember 2019 dengan tanggal cetak diatas 31 des 2019 dengan Validasi Bank
Lampiran XIII	Berita Acara penutupan Kas akhir tahun 2019 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIV	Register Penutupan Kas akhir tahun 2019 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XV	Rekap Piutang dan Penyisihannya bila terdapat piutang (yang telah diotorisasi)

Lampiran XVI	Rekap Utang bila terdapat Utang (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVII	Rekap Belanja barang habis pakai tahun 2019 yang jadi Persediaan (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVIII	Berita acara Rekonsiliasi persediaan per 31 desember 2019 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIX	Berita acara hasil pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname) per 31 desember 2019 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XX	Rincian Hasil Pemeriksaan Barang Persediaan (stock opname) per 31 desember 2019 yang sesuai dengan butir 8 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XXI	Daftar rekapitulasi barang ke Neraca per 31 desember 2019 (berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan bidang BMD BPKAD)
Lampiran XXII	Analisis Perhitungan Vertikal dan Horizontal (Format untuk SKPD akan disesuaikan)